

SKRIPSI

**ANALISIS SIKAP MASYARAKAT DALAM MEDIA SOSIAL TERHADAP
NASIONALISME (STUDI KASUS GRUP *FACEBOOK* INFORMASI
KEJADIAN KOTA SORONG ATAU IKKS), PAPUA BARAT DAYA**



Disusun Oleh

AMIN

NIM : RPL12487205001

PRODI PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN

FAKULTAS PENDIDIKAN BAHASA, SOSIAL DAN OLAAHRAGA

UNIVERSITAS PENDIDIKAN MUHAMMDIYAH (UNIMUDA)

SORONG

2025

HALAMAN PERSETUJUAN

**ANALISIS SIKAP DALAM MEDIA SOSIAL TERHADAP
NASIONALISME (STUDI KASUS GRUP *FACEBOOK* INFORMASI
KEJADIAN KOTA SORONG ATAU IKKS), PAPUA BARAT DAYA**

NAMA : AMIN

NIM : RPL12487205001

Telah disetujui oleh Tim Pembimbing

Pada Tanggal 11 November 2025

Pembimbing I

Dr. IHSAN, S.Pd., M.PD.

NIDN : 141908901


.....

Pembimbing II

RONI ANDRI PRAMITA, M.Pd.

NIDN : 1411129001


.....

HALAMAN PENGESAHAN

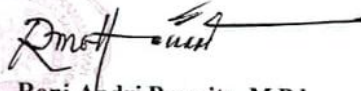
**ANALISIS SIKAP MASYARAKAT DALAM MEDIA SOSIAL TERHADAP
NASIONALISME (STUDI KASUS GRUP *FACEBOOK* INFORMASI
KEJADIAN KOTA SORONG ATAU IKKS), PAPUA BARAT DAYA**

**NAMA : AMIN
NIM : RPL12487205001**

Skripsi ini telah disetujui oleh Dekan Fakultas Pendidikan Bahasa, Sosial dan
Olahraga Univeristas Pendidikan Muhammadiyah (UNIMUDA) Sorong

Pada Tanggal 25 November 2025

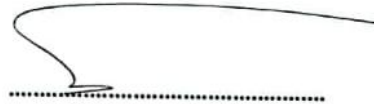
Dekan Fakultas Pendidikan Bahasa, Sosial dan Olahraga



**Roni Andri Pramita, M.Pd.
NIDN. 1411129001**

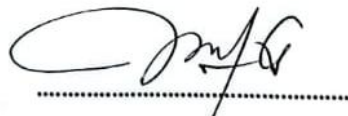
Ketua Penguji

**Dr. Budi Santoso, M.Pd.
NIDN. 1406029201**



Penguji I

**Lestari, M.Pd.
NIDN. 1402118401**



Penguji II

**Dr. IHSAN, S.Pd., M.Pd.
NIDN : 1419108901**



PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi. Sepanjang pengetahuan saya, juga tidak terdapat karya atau pendapat orang lain yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh pihak lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan penuh tanggung jawab. Apabila di kemudian hari ditemukan adanya ketidaksesuaian, saya bersedia menerima konsekuensi sesuai ketentuan yang berlaku.

Sorong, 23 November 2025

Yang membuat pernyataan,

AMIN

MOTO

**"Ragumu adalah rugimu. Sebab keraguan hanya menghambat langkah,
sementara keyakinan membuka jalan menuju keberhasilan."**

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur dan kerendahan hati, karya sederhana ini saya persembahkan kepada:

1. Allah SWT, yang selalu memberikan rahmat, kesehatan, dan kemudahan dalam setiap langkah.
2. Orang tua tercinta, Ayah dan Ibu, atas doa, kasih sayang, dukungan, dan pengorbanan tanpa batas.
3. Keluarga besar, yang menjadi sumber motivasi dan kekuatan.
4. Para dosen dan pembimbing, yang telah memberikan ilmu, bimbingan, serta arahan selama proses Perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini.
5. Teman-teman seperjuangan, yang selalu memberikan semangat dan membantu dalam berbagai kondisi.
6. Diriku sendiri, yang telah berusaha bertahan, belajar, dan tidak menyerah hingga karya ini terselesaikan.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis sikap separatist masyarakat Papua yang muncul dalam unggahan dan komentar pada Grup *Facebook* IKKS serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhinya. Selain itu, penelitian juga mencari solusi yang efektif untuk meredam narasi separatist di ruang digital. Latar belakang penelitian didasari dinamika identitas, ketidakadilan struktural, dan polarisasi isu Papua di media sosial.

Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif studi kasus dengan teknik pengumpulan data berupa analisis wacana komentar, dokumentasi unggahan, serta wawancara dengan informan kunci. Data diperkuat melalui observasi daring dan triangulasi sumber.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sikap separatist dalam grup IKKS muncul melalui narasi tokoh pejuang kemerdekaan, ketidakadilan sosial, penguatan identitas Papua, serta ajakan eksplisit maupun implisit menuju kemerdekaan. Sikap ini dipengaruhi oleh tiga faktor utama: historis-struktural, pengalaman personal secara kolektif, serta pendidikan dan literasi.

Solusi yang diusulkan menekankan pendekatan dialogis, komunikatif, dan edukatif, termasuk moderasi konten yang humanis, penguatan narasi positif kebangsaan, ruang dialog yang aman, dan peningkatan literasi digital serta wawasan kebangsaan.

Penelitian menegaskan bahwa media sosial adalah ruang penting dalam pembentukan identitas dan wacana separatisme, sehingga pengelolaan digital yang inklusif sangat diperlukan untuk memperkuat kohesi sosial di Papua.

Kata Kunci: sikap separatist, media sosial, IKKS, Papua, nasionalisme, identitas digital.

ABSTRACT

This study aims to analyze the separatist attitudes of Papuans emerging in posts and comments on the IKKS Facebook Group and identify the factors influencing them. Furthermore, the study seeks effective solutions to suppress separatist narratives in the digital space. The research background is based on identity dynamics, structural injustice, and the polarization of Papuan issues on social media.

The approach used is a qualitative case study, with data collection techniques including discourse analysis of comments, documentation of posts, and interviews with key informants. Data were strengthened through online observation and source triangulation.

The results indicate that separatist attitudes in the IKKS group emerge through narratives about independence fighters, social injustice, the strengthening of Papuan identity, and explicit and implicit calls for independence. These attitudes are influenced by three main factors: historical-structural, personal-collective experience, and education and literacy.

The proposed solution emphasizes a dialogical, communicative, and educational approach, including humanistic content moderation, strengthening positive national narratives, creating safe spaces for dialogue, and improving digital literacy and national insight.

The research confirms that social media is a crucial space for identity formation and separatist discourse, thus ensuring inclusive digital governance is essential for strengthening social cohesion in Papua.

Keywords: separatist attitudes, social media, IKKS, Papua, nationalism, digital identity.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT karena atas rahmat, karunia, dan petunjuk-Nya, penulis dapat menyusun Skripsi yang berjudul Analisis Sikap Masyarakat dalam Media Sosial Terhadap Nasionalisme (Studi Kasus pada Grup *Facebook* Informasi Kejadian Kota Sorong atau IKKS) Papua Barat Daya. Skripsi ini disusun sebagai langkah awal dalam menyelesaikan tugas akhir untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.

1. Dr. Rustamadi, M.Si., selaku Rektor Universitas Pendidikan Muhammadiyah (UNIMUDA) Sorong, yang telah memberikan kesempatan, fasilitas, serta lingkungan akademik yang kondusif bagi mahasiswa untuk belajar, berkembang, dan menyelesaikan studi dengan baik. Dukungan beliau terhadap peningkatan mutu pendidikan dan penelitian menjadi fondasi penting dalam terselesaikannya karya ilmiah ini.
2. Roni Andri Pramita, M.Pd., selaku Dekan Fakultas Pendidikan Bahasa, Sosial, dan Olahraga sekaligus Dosen Pembimbing II, yang telah memberikan dukungan, arahan, serta bimbingan selama proses penyusunan skripsi ini. Beliau dengan penuh ketelitian dan dedikasi memberikan koreksi, masukan, serta motivasi yang sangat berarti sehingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan lebih baik dan terarah.
3. Dr. Ihsan, S.Pd., M.Pd., selaku Ketua Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan sekaligus Dosen Pembimbing I, yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan masukan berharga selama proses penyusunan skripsi ini. Beliau senantiasa meluangkan waktu, tenaga, dan pemikiran untuk membantu penyempurnaan penelitian ini dengan penuh kesabaran, ketelitian, serta dedikasi.
4. Ernawati Simatupang, M.Pd., selaku Dosen Pembimbing Akademik (PA) yang selalu memberikan arahan, motivasi, serta bimbingan selama menjalani proses perkuliahan. Beliau telah membantu saya memahami berbagai hal akademik maupun administrasi dengan penuh kesabaran dan

ketulusan sehingga perjalanan studi ini dapat saya lalui dengan baik.

5. Seluruh dosen dan sivitas akademik Universitas Pendidikan Muhammadiyah (UNIMUDA) Sorong, yang telah memberikan ilmu pengetahuan, bimbingan, serta pengalaman akademik selama masa perkuliahan. Setiap materi, nasihat, dan dedikasi yang diberikan telah menjadi bekal berharga dalam membentuk pola pikir, karakter, dan kemampuan akademik saya hingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
6. Kepada keluarga dan juga saudara sekalian, yang telah memberikan dukungan, semangat, dan motivasi sejak awal perkuliahan hingga tahap penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas kasih sayang yang begitu besar serta doa tulus yang selalu dipanjatkan dalam setiap sujudnya. Setiap perhatian, pengorbanan, dan kehadiran kalian menjadi kekuatan yang tidak ternilai, sekaligus menjadi jalan teramat berharga yang paling peneliti syukuri dan inginkan dalam perjalanan ini.

Penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih jauh dari sempurna, sehingga penulis sangat terbuka terhadap kritik dan saran yang membangun demi penyempurnaan penelitian ke depan. Akhir kata, semoga Skripsi ini dapat memberikan manfaat, baik secara akademis maupun praktis, serta menjadi kontribusi dalam memahami dinamika wacana separatisme dalam konteks sosial media di Indonesia Timur.

Sorong, 24 November 2025

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN PERSETUJUAN..... i

HALAMAN PENGESAHANError! Bookmark not defined.

PERNYATAAN KEASLIAN..... ii

MOTO iv

PERSEMBAHAN..... v

ABSTRAK vi

ABSTRACT vii

KATA PENGANTAR..... viii

DAFTAR ISI..... x

BAB I PENDAHULUAN..... 1

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 6

C. Tujuan Penelitian 6

D. Manfaat Penelitian 6

BAB II KAJIAN PUSTAKA..... 8

A. Kajian Teori..... 8

1. Papua dan Hubungannya dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)..... 8

2. Pengertian Analisis 11

3. Sikap Separatis 14

4. Pengertian Masyarakat 17

5. Media Sosial 21

6. Nasionalisme 24

B. Kerangka Pikir/Kerangka Konsep.....	28
BAB III METODE PENELITIAN	31
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	31
B. Lokasi dan Subjek Penelitian.....	31
C. Jadwal Penelitian.....	32
D. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data.....	32
1. Sumber data dalam penelitian terbagi menjadi dua :	32
E. Instrumen Penelitian.....	33
F. Teknik Analisis data.....	34
G. Keabsahan Data.....	34
H. Etika Penelitian	34
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	35
A. Gambaran Umum Grup <i>Facebook</i> Informasi Kejadian Kota Sorong (IKKS)	35
B. Hasil Penelitian.....	37
1. Sikap separatis yang muncul dalam unggahan atau komentar di media sosial <i>Facebook</i> pada grup “Informasi Kejadian Kota Sorong (IKKS)”	37
2. Faktor-faktor yang menyebabkan munculnya sikap separatis di grup “Informasi Kejadian Kota Sorong (IKKS)”	56
3. Solusi terhadap sikap separatis masyarakat yang muncul di media sosial <i>Facebook</i> grup IKKS	63
C. Pembahasan.....	68
1. Sikap separatis yang muncul dalam unggahan atau komentar di media sosial <i>Facebook</i> grup “Informasi Kejadian Kota Sorong (IKKS)”	68
2. Faktor-faktor yang menyebabkan munculnya sikap separatis di grup “Informasi Kejadian Kota Sorong (IKKS)”	85

3. Solusi terhadap sikap separatist masyarakat yang muncul di media sosial <i>Facebook</i> grup IKKS	97
BAB V PENUTUP	105
A. Kesimpulan	105
B. Saran.....	107
1. Bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	107
2. Bagi Tokoh Adat, Tokoh Agama, dan Tokoh Masyarakat	107
3. Bagi Pengelola Grup IKKS dan Komunitas Media Sosial Papua	107
4. Bagi Dunia Pendidikan dan Akademisi.....	108
5. Bagi Peneliti Selanjutnya	108
DAFTAR PUSTAKA	109
LAMPIRAN-LAMPIRAN	112

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi pada era digital saat ini telah memengaruhi secara signifikan cara masyarakat Indonesia berinteraksi dalam aspek sosial, politik, maupun budaya.”masyarakat Indonesia. Media sosial seperti *Facebook*, *Instagram*, *X (Twitter)*, dan *TikTok* kini tidak hanya berfungsi sebagai sarana berbagi informasi, tetapi juga telah berevolusi menjadi ruang publik *virtual* di mana warga negara bebas mengekspresikan pandangan, ideologi, dan identitas sosialnya. Menurut Mihelj dan Jimenez-Martinez (2021), ruang digital telah menjadi arena utama pembentukan wacana kebangsaan baru, di mana nasionalisme dan identitas lokal saling bernegosiasi melalui narasi digital. Dalam konteks masyarakat Indonesia yang majemuk, media sosial kerap menjadi arena pertemuan sekaligus pertentangan antara berbagai gagasan mengenai kebangsaan, nasionalisme, dan kedaerahan (Lim, 2022). Fenomena ini tampak nyata di Daerah Papua Barat Daya, wabilkhusus di Kota Sorong, yang merupakan salah satu pusat sosial-ekonomi dan politik di kawasan timur Indonesia.

Kota Sorong memiliki karakteristik sosial yang unik. Sebagai pintu gerbang utama Papua Barat Daya, Sorong menjadi tempat bertemunya berbagai etnis seperti Papua, Bugis, Jawa, Ambon, Buton, Muna, Toraja dan lain-lain. Keberagaman tersebut menciptakan dinamika sosial yang kompleks, di mana interaksi antar kelompok sering kali memunculkan dialektika antara identitas lokal dan nasional. Dalam konteks tersebut, media sosial berfungsi sebagai ruang representasi opini publik dan artikulasi identitas sosial (Nasrullah, 2020). Salah satu wadah digital terbesar yang menggambarkan fenomena ini adalah grup *Facebook* Informasi Kejadian Kota Sorong (IKKS), yang hingga 2025 telah memiliki lebih dari seratus ribu anggota aktif.

Awalnya, grup IKKS dibentuk untuk berbagi informasi sosial, ekonomi, politik, dan keamanan di wilayah Sorong. Namun, seiring berjalannya waktu, grup

ini berkembang menjadi arena wacana yang mempertemukan dua kutub ideologis, yaitu kelompok pro-nasionalisme, yang menegaskan kesetiaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan kelompok separatis, yang menolak keindonesiaan serta menegaskan identitas Papua yang berbeda (Suryawan, 2022). Fenomena tersebut terlihat jelas dalam kolom komentar pada unggahan bertema nasionalisme. Salah satu contoh yang menonjol adalah unggahan bergambar tulisan “Dari Sabang sampai Merauke tidak ada kata lain selain Indonesia.” Unggahan tersebut memunculkan dua reaksi ekstrem: komentar pro-NKRI seperti “Papua itu Indonesia dari dulu sampai kapanpun,” dan komentar separatis seperti “Papua bukan Indonesia” atau “Kami dijajah di negeri sendiri.” Fenomena ini menunjukkan bahwa media sosial bukan hanya sarana komunikasi, tetapi juga arena pertempuran simbolik dan ideologis antara dua pandangan yang saling berlawanan mengenai nasionalisme dan kedaulatan (Brauchler, 2020; Tapsell, 2020).

Munculnya komentar separatis di ruang digital tidak bersifat acak, melainkan lahir dari kondisi sosial-politik yang lebih dalam. Ketimpangan pembangunan antara pusat dan daerah, marginalisasi ekonomi masyarakat asli Papua, serta trauma sejarah integrasi melalui Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) tahun 1969 menjadi faktor utama yang melatarbelakangi munculnya rasa keterasingan terhadap negara. Menurut Chauvel dan Leith (2020), pengalaman sejarah yang dianggap tidak adil telah membentuk narasi sosial baru tentang “Papua sebagai bangsa yang berbeda”. Kondisi ini menciptakan rasa ketidakadilan kolektif (*collective deprivation*) yang mendorong masyarakat mengekspresikan kekecewaannya melalui ruang digital (Gurr, 2015). Media sosial kemudian menjadi wadah untuk menyuarakan kritik, protes, bahkan perlawanan terhadap wacana nasionalisme dominan yang dianggap menekan identitas lokal (Sumule, 2020; Sugandi, 2022).

Dalam perspektif teori identitas kolektif Alberto Melucci (1996), sikap separatis tersebut merupakan hasil pembentukan identitas sosial bersama di antara individu-individu yang memiliki pengalaman dan pandangan serupa. Identitas

kolektif ini terbentuk melalui interaksi sosial yang berulang, termasuk di ruang digital seperti *Facebook*. Di grup IKKS, identitas “kami orang Papua” muncul sebagai bentuk solidaritas kolektif yang menegaskan perbedaan dengan “mereka orang Indonesia.” Penggunaan bahasa lokal seperti *sa, ko, dong*, dan ekspresi khas Papua menjadi simbol artikulasi identitas etnis. Dengan demikian, media sosial berperan sebagai ruang pembentukan identitas baru yang memperkuat batas simbolik antara “kami” dan “mereka” (Postill, 2021).

Teori hegemoni Antonio Gramsci (1971) turut menjelaskan dinamika konflik ideologis tersebut. Negara berupaya mempertahankan hegemoni ideologi nasional melalui pendidikan, media, dan simbol-simbol negara, namun ruang digital memberikan peluang bagi munculnya *counter-hegemonic space* sebagai ruang tandingan tempat masyarakat dapat menantang narasi resmi negara (Fairclough, 2013). Komentar seperti “Papua bukan Indonesia” atau “Pepera itu penipuan sejarah” merupakan bentuk resistensi wacana digital terhadap dominasi ideologis negara (Tapsell, 2020).

Sementara itu, teori komunitas terbayang Benedict Anderson (1983) menegaskan bahwa bangsa terbentuk melalui proses imajinasi kolektif yang diperkuat oleh media. Dalam konteks digital, imajinasi kebangsaan tidak lagi dimediasi oleh media cetak, tetapi oleh media sosial yang lebih dinamis dan interaktif. Unggahan bertema “Dari Sabang sampai Merauke” menggambarkan upaya negara mempertahankan imajinasi keindonesiaan, sedangkan komentar separatis menunjukkan terbentuknya imajinasi tandingan tentang “Bangsa Papua” yang terpisah dari Indonesia (Mihelj & Jimenez-Martinez, 2021). Dengan demikian, terdapat dua komunitas imajiner digital yang saling bersaing: “Indonesia” dan “Papua,” yang masing-masing berupaya memperoleh legitimasi sosial di ruang maya.

Analisis terhadap komentar-komentar di grup IKKS menunjukkan bahwa sikap separatis digital tidak sekadar cerminan kebencian terhadap negara, melainkan ekspresi identitas yang terluka dan pengalaman sosial yang tidak

diakui. Menurut Brubaker (2015), identitas nasional dan etnis selalu bersifat contested diperdebatkan dan dinegosiasikan dalam konteks sosial yang dinamis. Komentar seperti “Kami dijajah di tanah sendiri” atau “Indonesia hanya mengambil sumber daya kami” merupakan bentuk artikulasi penderitaan struktural yang dialami masyarakat, yang diekspresikan melalui simbol dan bahasa digital (Suryawan, 2022).

Namun, di sisi lain, muncul pula komentar pro-NKRI yang menunjukkan kesadaran nasionalisme digital yang kuat. Banyak warga Sorong menegaskan pentingnya persatuan dan solidaritas sebagai bagian dari keindonesiaan. Ungkapan seperti “Papua adalah bagian dari Indonesia yang tidak bisa dipisahkan” menjadi representasi dari digital patriotism, yaitu bentuk baru nasionalisme yang tumbuh melalui partisipasi masyarakat di ruang digital (Mihelj & Jimenez-Martinez, 2021; Lim, 2022). Hal ini menunjukkan bahwa di tengah maraknya wacana separatistis, semangat kebangsaan masih hidup dan bertransformasi dalam format digital.

Dengan demikian, media sosial menjadi arena interaksi dua wacana besar yaitu nasionalisme dan separatisme yang saling berkompetisi dalam membentuk kesadaran publik. Dalam kerangka Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough (2013), fenomena ini dapat dipahami melalui tiga lapisan: (1) teks: bentuk linguistik dan simbol yang mengandung ideologi; (2) praktik wacana: cara komentar diproduksi dan dikonsumsi; dan (3) praktik social: relasi kekuasaan yang membentuk makna di balik wacana tersebut.

Secara sosiologis, munculnya sikap separatistis di media sosial menunjukkan adanya krisis representasi antara negara dan masyarakat Papua. Banyak warga merasa tidak memiliki saluran aspirasi yang efektif sehingga media sosial menjadi ruang alternatif ekspresi politik (Rogers, 2023). Rendahnya literasi digital dan lemahnya moderasi konten memperparah situasi, menyebabkan ruang maya dipenuhi ujaran provokatif. Padahal, sebagaimana dikemukakan Nasrullah (2020), media sosial dapat dimanfaatkan secara konstruktif untuk membangun dialog

sosial dan memperkuat nasionalisme inklusif apabila dikelola dengan pendekatan partisipatif.

Penelitian ini penting karena memberikan gambaran empiris tentang negosiasi nasionalisme di era digital. Nasionalisme kini tidak lagi bersifat *top-down* seperti pada masa sebelumnya, melainkan dialogis dan terbuka terhadap tafsir masyarakat (Calhoun, 2007; Tapsell, 2020). Fenomena di grup IKKS menunjukkan bahwa masyarakat Papua Barat Daya sedang membentuk pemahaman baru tentang kebangsaan yang tidak hanya menekankan loyalitas terhadap negara, tetapi juga pengakuan terhadap identitas lokal dan keadilan sosial.

Oleh karena itu, studi ini tidak hanya menelusuri munculnya sikap separatis di media sosial, tetapi juga berupaya memahami akar sosial dan psikologisnya. Media sosial, di satu sisi, menjadi sarana penyebaran wacana separatis; namun di sisi lain, ia juga berpotensi menjadi media rekonsiliasi identitas nasional jika digunakan secara bijak (Brauchler, 2020). Hasil penelitian ini penting bagi pemerintah, akademisi, dan masyarakat dalam mengembangkan strategi komunikasi publik berbasis dialog, literasi digital, dan pemberdayaan masyarakat lokal.

Secara teoritis, penelitian ini memperkaya kajian mengenai komunikasi politik digital, identitas sosial, dan nasionalisme kontemporer di Indonesia Timur, sementara secara praktis, hasilnya dapat dijadikan rujukan dalam merumuskan kebijakan pembangunan sosial yang inklusif. Pendidikan kebangsaan perlu diarahkan pada pendekatan nasionalisme pluralistik yang tidak meminggirkan identitas lokal, tetapi menjadikannya kekuatan kebangsaan.

Akhirnya, fenomena wacana separatis di media sosial seperti grup IKKS mencerminkan dinamika sosial yang lebih luas di Papua Barat Daya. Ia menunjukkan bahwa nasionalisme Indonesia tengah mengalami proses negosiasi ulang di ruang digital. Tantangan ke depan bukan hanya bagaimana meredam narasi separatis, tetapi bagaimana membangun nasionalisme yang relevan dengan

aspirasi masyarakat Papua. Dengan memahami pola komunikasi dan sikap masyarakat di ruang digital, diharapkan muncul strategi baru untuk memperkuat integrasi nasional melalui pendekatan kultural dan komunikasi yang humanis.

B. Rumusan Masalah

Merujuk pada penjelasan dalam latar belakang tersebut, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana sikap separatis masyarakat yang muncul dalam komentar di media social Grup *Facebook* Informasi Kejadian Kota Sorong (IKKS) ?
2. Faktor-faktor munculnya sikap separatis di grup *Facebook* Informasi Kejadian Kota Sorong (IKKS) ?
3. Bagaimana solusi terhadap sikap separatis masyarakat ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi dan mendeskripsikan sikap separatis yang muncul dalam komentar masyarakat di media social Grup *Facebook* IKKS Kota Sorong.
2. Menganalisis Faktor-faktor munculnya sikap separatis di Grup *facebook* Informasi Kejadian Kota Sorong (IKKS).
3. Memberikan Bagaimana solusi terhadap sikap separatis masyarakat.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah ilmu pengetahuan di bidang komunikasi politik, sosiologi digital, dan kajian kebangsaan. Secara khusus, hasil penelitian dapat:

- a. Menambah referensi tentang analisis wacana digital dalam konteks nasionalisme dan separatisme di Indonesia.

- b. Mengembangkan pemahaman teoretis tentang bagaimana identitas kolektif dan hegemoni ideologis terbentuk di ruang digital.
- c. Memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian komunikasi politik kontemporer di wilayah Papua Barat Daya yang masih jarang diteliti secara akademik.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi :

- a. Pemerintah daerah dan pusat, sebagai bahan masukan dalam merumuskan strategi komunikasi publik dan kebijakan yang lebih sensitif terhadap aspirasi masyarakat Papua, sehingga mampu memperkuat nasionalisme melalui pendekatan dialogis dan inklusif.
- b. Lembaga pendidikan dan tokoh masyarakat, dalam merancang pendidikan kebangsaan dan literasi digital agar masyarakat dapat memahami perbedaan antara kritik sosial dan narasi separatistis yang mengancam keutuhan bangsa.
- c. Masyarakat umum, untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya menjaga persatuan nasional serta menggunakan media sosial secara bijak dan bertanggung jawab.

3. Manfaat Akademik

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi mahasiswa, dosen, dan peneliti yang tertarik mengkaji hubungan antara media sosial, ideologi, dan nasionalisme.
- b. Selain itu, hasil penelitian dapat digunakan sebagai rujukan dalam studi lanjutan mengenai komunikasi digital di daerah konflik identitas, serta menjadi acuan bagi riset-riset tentang dinamika opini publik di Papua Barat Daya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Papua dan Hubungannya dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)

Papua memiliki posisi historis, politik, dan sosial yang unik dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Integrasi wilayah ini ke dalam Indonesia tidak hanya merupakan peristiwa politik, tetapi juga proses sosial yang panjang dan kompleks yang melibatkan dinamika identitas, nasionalisme, serta hubungan pusat dan daerah. Sejak masa kolonial Belanda hingga kini, Papua senantiasa menjadi ruang dialektika antara keinginan mempertahankan keutuhan negara dan aspirasi sebagian masyarakat yang merasa memiliki identitas tersendiri.

Proses integrasi Papua ke dalam NKRI dimulai dari Konferensi Meja Bundar (KMB) tahun 1949 yang menghasilkan kesepakatan penyerahan kedaulatan dari Belanda kepada Republik Indonesia Serikat. Namun, status Irian Barat (Papua) masih menjadi sengketa karena tidak diatur secara eksplisit dalam hasil KMB (Ricklefs, 2008). Konflik diplomatik berlanjut hingga munculnya Trikora (Tri Komando Rakyat) yang dicanangkan Presiden Soekarno pada 19 Desember 1961 sebagai wujud perjuangan politik dan militer untuk merebut Irian Barat dari kekuasaan Belanda.

Melalui dukungan diplomatik Amerika Serikat dan mediasi Perserikatan Bangsa-Bangsa, pada 15 Agustus 1962 tercapailah Perjanjian New York (*New York Agreement*) antara Indonesia dan Belanda. Perjanjian ini menetapkan bahwa pemerintahan sementara di Irian Barat akan diserahkan kepada *United Nations Temporary Executive Authority* (UNTEA) sebelum diserahkan kepada Indonesia. Salah satu poin penting dalam perjanjian tersebut adalah kewajiban Indonesia untuk melaksanakan Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) pada tahun 1969 sebagai mekanisme untuk menegaskan pilihan masyarakat Papua apakah tetap

bergabung dengan Indonesia atau berdiri sendiri sebagai negara merdeka (Saltford, 2003).

Pepera 1969 secara resmi menghasilkan keputusan bahwa Papua tetap menjadi bagian dari NKRI. Namun, proses pelaksanaannya masih menjadi perdebatan panjang. Sebagian pihak menganggap Pepera tidak mencerminkan prinsip *one man one vote*, melainkan dilakukan secara musyawarah terbatas melalui 1.025 wakil yang ditunjuk. Hal ini memunculkan narasi ketidakpuasan dan menjadi akar historis munculnya gerakan separatis di Papua (Chauvel & Leith, 2020). Meski secara hukum internasional hasil Pepera telah diterima oleh PBB, secara sosiologis sebagian masyarakat Papua masih menyimpan trauma historis dan rasa keterasingan terhadap pemerintah pusat.

Dalam konteks modern, pemerintah Indonesia berupaya menata ulang hubungan pusat dan Daerah di Papua melalui kebijakan Otonomi Khusus (Otsus) yang pertama kali diberlakukan pada tahun 2001 melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001. Otsus dimaksudkan untuk memberikan ruang yang lebih besar bagi masyarakat Papua dalam mengelola pembangunan, kebudayaan, dan sumber daya alamnya sendiri (Widjojo, 2015). Namun dalam perkembangannya, banyak kalangan menilai bahwa implementasi Otsus belum sepenuhnya menjawab ketimpangan sosial, ekonomi, dan politik yang dirasakan masyarakat asli Papua (Haryanto, 2019; Sugandi, 2022).

Penelitian terkini menunjukkan bahwa persepsi masyarakat terhadap kebijakan Otsus masih beragam. Sebagian masyarakat memandang kebijakan tersebut sebagai langkah positif untuk memperkuat integrasi nasional, tetapi sebagian lainnya menganggapnya sebagai bentuk kontrol pusat yang belum menyentuh akar persoalan seperti ketimpangan pembangunan dan diskriminasi struktural (Sumule, 2020; Hermanto, 2023). Ketimpangan tersebut tampak nyata dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur yang masih tertinggal dibandingkan wilayah lain di Indonesia bagian barat (Kadir, 2021).

Dari sudut pandang identitas sosial, Papua tidak hanya dipahami sebagai wilayah administratif, melainkan sebagai ruang kultural yang memiliki keunikan ras, bahasa, dan sejarah kolonial yang berbeda dari wilayah Indonesia lainnya. Studi oleh Elmslie dan Webb-Gannon (2019) menunjukkan bahwa identitas Papua terbentuk melalui pengalaman kolektif kolonialisme dan marginalisasi, sehingga nasionalisme lokal tumbuh berdampingan dengan nasionalisme Indonesia yang bersifat integratif. Hal ini menyebabkan sebagian masyarakat Papua mengembangkan identitas ganda di satu sisi sebagai warga negara Indonesia, di sisi lain sebagai bagian dari komunitas Melanesia yang memiliki akar etnorasial tersendiri.

Dalam konteks ini, pendekatan pemerintah terhadap Papua tidak dapat hanya bersifat politis atau administratif, melainkan juga harus memperhatikan aspek sosial, budaya, dan psikologis masyarakat setempat. Suryawan (2022) menegaskan bahwa solusi atas persoalan Papua bukan semata melalui pembangunan infrastruktur, melainkan melalui pengakuan terhadap sejarah, budaya, dan eksistensi masyarakat adat yang selama ini menjadi pilar kehidupan sosial di Papua. Pendekatan berbasis empati dan partisipasi masyarakat lokal dinilai lebih efektif untuk memperkuat rasa memiliki terhadap NKRI.

Dengan demikian, hubungan Papua dan NKRI merupakan relasi yang kompleks dan dinamis. Di satu sisi, terdapat legitimasi hukum dan politik yang menegaskan Papua sebagai bagian sah dari Indonesia. Namun di sisi lain, terdapat tantangan sosial dan identitas yang menuntut pengakuan lebih dalam terhadap keunikan Papua sebagai wilayah yang memiliki sejarah, budaya, dan pengalaman sosial yang berbeda. Pemahaman terhadap kompleksitas ini penting sebagai dasar analisis sikap masyarakat Papua di media sosial, khususnya dalam melihat bagaimana wacana nasionalisme dan separatisme dinegosiasikan kembali di ruang digital.

2. Pengertian Analisis

Secara etimologis, istilah analisis berasal dari kata dalam bahasa Yunani ‘analisis’, yang mengandung makna memisahkan atau menguraikan suatu bagian menjadi elemen yang lebih kecil. Dalam konteks ilmiah, analisis mengacu pada proses sistematis untuk membedah suatu fenomena, mengidentifikasi bagian-bagiannya, dan menafsirkan hubungan antarunsur untuk memperoleh pemahaman yang utuh terhadap suatu gejala (KBBI, 2024). Dengan demikian, analisis tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga interpretatif, karena tujuannya adalah menemukan makna dan pola dari data atau peristiwa yang diamati.

Menurut pandangan klasik, Nana Sudjana (2016) menyebut analisis sebagai upaya untuk memilah suatu keseluruhan menjadi unsur-unsur yang lebih kecil agar dapat dipahami struktur dan hierarkinya. Sementara Gorys Keraf (2004) memandang analisis sebagai proses memecah suatu permasalahan menjadi bagian-bagian yang saling berkaitan untuk memahami hubungan antarkomponen secara logis. Abdul Majid (2013) menegaskan bahwa kemampuan analisis merupakan keterampilan berpikir tingkat tinggi, yakni menguraikan suatu satuan menjadi subbagian yang terpisah untuk membedakan serta mengenali perbedaan yang signifikan antarunsur tersebut. Pandangan serupa dikemukakan Wiradi (2006) yang menekankan bahwa analisis mencakup kegiatan mengklasifikasi, membandingkan, dan menafsirkan sesuatu berdasarkan kriteria tertentu untuk memperoleh pemahaman mendalam terhadap objek yang diteliti.

Pandangan-pandangan klasik tersebut menunjukkan bahwa analisis bukan sekadar kegiatan teknis, melainkan proses berpikir sistematis untuk menemukan makna dari suatu realitas. Dalam penelitian sosial, analisis mencakup kemampuan menafsirkan simbol, tindakan, maupun wacana yang berkembang di masyarakat. Oleh karena itu, dalam penelitian kualitatif, analisis tidak hanya berorientasi pada angka atau frekuensi, melainkan pada konteks, makna, dan hubungan antarfenomena sosial yang muncul dari data lapangan.

Sejalan dengan perkembangan ilmu sosial modern, konsep analisis semakin berkembang dalam ranah metodologi penelitian. Menurut Braun dan Clarke (2019), analisis tematik (*thematic analysis*) menjadi pendekatan populer dalam penelitian kualitatif karena mampu mengidentifikasi pola makna dari data tekstual seperti wawancara, komentar, atau tulisan di media sosial. Pendekatan ini berfokus pada interpretasi terhadap makna yang tersembunyi di balik ujaran dan tindakan, bukan hanya pada pengelompokan data semata. Hal ini sejalan dengan pendekatan Fairclough (2013) dalam analisis wacana kritis yang memandang teks sebagai representasi dari relasi kekuasaan dan ideologi dalam masyarakat.

Selain itu, Miles, Huberman, dan Saldana (2018) menegaskan bahwa analisis data kualitatif merupakan proses interaktif yang terdiri dari tiga tahapan utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Ketiga tahapan tersebut bukanlah proses linear, melainkan berlangsung secara berulang-ulang hingga peneliti menemukan makna yang paling relevan dengan fokus penelitiannya. Dengan demikian, analisis menuntut peneliti untuk terus melakukan refleksi, klarifikasi, dan konfirmasi terhadap temuan yang diperoleh di lapangan.

Dalam penelitian berbasis media digital, analisis menjadi semakin penting karena data yang dihasilkan bersifat dinamis, kompleks, dan kontekstual. Rogers (2023) menyebut analisis digital sebagai upaya memahami fenomena sosial melalui jejak digital yang dihasilkan pengguna media sosial, seperti komentar, unggahan, atau interaksi daring. Pendekatan ini menuntut peneliti untuk mampu membaca teks bukan hanya sebagai rangkaian kata, tetapi juga sebagai representasi dari posisi sosial, emosi, dan ideologi pengguna. Oleh sebab itu, penelitian terhadap komentar masyarakat di media social seperti pada grup *Facebook* Informasi Kejadian Kota Sorong (IKKS) membutuhkan analisis mendalam terhadap konteks sosial, simbolik, dan linguistik yang melatarbelakanginya.

Sementara itu, Silverman (2020) menegaskan bahwa analisis dalam penelitian kualitatif tidak berhenti pada tahap deskripsi, tetapi harus mampu membangun argumentasi konseptual yang menjelaskan “mengapa” dan “bagaimana” suatu fenomena terjadi. Hal ini sangat relevan dalam penelitian tentang sikap separatistis dan nasionalisme di media sosial, karena analisis tidak hanya mengungkap apa yang dikatakan pengguna, tetapi juga bagaimana dan dalam konteks apa pernyataan itu diungkapkan. Dengan demikian, analisis menjadi jantung dari proses penelitian karena menentukan kedalaman interpretasi terhadap fenomena yang diteliti.

Dalam konteks penelitian ini, analisis dipahami sebagai proses berpikir reflektif yang menguraikan data komentar masyarakat di media sosial untuk menemukan pola makna yang menunjukkan sikap nasionalis dan separatistis. Peneliti menggunakan pendekatan analisis wacana kritis Norman Fairclough yang melibatkan tiga dimensi utama, yaitu (1) analisis teks menelaah struktur bahasa dan simbol; (2) praktik wacana melihat bagaimana teks diproduksi dan dikonsumsi dalam konteks sosial; dan (3) praktik sosial memahami relasi kekuasaan dan ideologi yang melatarbelakangi munculnya wacana tersebut. Pendekatan ini memungkinkan peneliti melihat fenomena sosial secara lebih dalam, bukan hanya pada permukaan ujaran, tetapi juga pada makna tersembunyi yang memengaruhi persepsi masyarakat terhadap nasionalisme dan identitas Papua.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa analisis merupakan proses intelektual yang bertujuan mengubah data mentah menjadi pemahaman konseptual melalui penafsiran mendalam. Dalam penelitian sosial, analisis bukan sekadar teknik, tetapi juga refleksi kritis terhadap realitas sosial. Analisis yang baik tidak berhenti pada penguraian data, melainkan melahirkan pemaknaan baru yang dapat menjelaskan hubungan antara tindakan individu, struktur sosial, dan ideologi yang beroperasi dalam masyarakat.

3. Sikap Separatis

Sikap separatis merupakan fenomena sosial-politik yang mencerminkan adanya keinginan sebagian kelompok masyarakat untuk memisahkan diri dari suatu negara dan membentuk entitas politik yang mandiri. Sikap ini tidak lahir secara tiba-tiba, melainkan merupakan akumulasi dari pengalaman historis, sosial, ekonomi, dan politik yang membentuk kesadaran kolektif suatu kelompok terhadap identitasnya sendiri. Dalam konteks Papua, sikap separatis muncul sebagai respons terhadap perasaan ketidakadilan dan keterasingan yang dialami sebagian masyarakat terhadap kebijakan dan perlakuan pemerintah pusat.

Secara teoritis, Anthony D. Smith (1991) menjelaskan bahwa separatisme erat kaitannya dengan nasionalisme etnis, yakni suatu bentuk kesadaran yang muncul ketika kelompok etnis merasa memiliki asal-usul, sejarah, dan budaya yang berbeda dari komunitas nasional yang lebih besar. Kesadaran ini berkembang menjadi gerakan politik ketika kelompok tersebut merasa identitasnya terancam atau tidak diakui secara adil oleh negara. Dalam konteks Papua, kesadaran etnis Melanesia yang berbeda dari mayoritas penduduk Indonesia menjadi salah satu faktor penting dalam munculnya sikap separatis, terutama ketika identitas tersebut dikaitkan dengan pengalaman marginalisasi dan dominasi struktural.

Sementara itu, Benedict Anderson (1983) melalui teori *Imagined Communities* memandang bahwa bangsa adalah komunitas yang “dibayangkan” karena anggotanya tidak mungkin saling mengenal secara langsung, namun memiliki rasa kebersamaan yang dibangun melalui simbol, narasi, dan media. Dalam era digital, ruang imajiner ini semakin luas melalui media sosial. Bagi sebagian masyarakat Papua, platform seperti *Facebook* menjadi sarana membangun “komunitas imajiner Papua Merdeka” dengan menampilkan simbol-simbol identitas seperti bendera Bintang Kejora, lagu-lagu perjuangan, dan narasi sejarah yang berbeda dari versi negara. Dengan demikian, media sosial berperan

dalam mereproduksi kesadaran nasionalisme tandingan yang memperkuat sikap separatis di ruang digital.

Alberto Melucci (1995) menambahkan bahwa sikap separatis dapat dipahami sebagai bentuk identitas kolektif yang terbentuk melalui interaksi sosial dan pengalaman bersama. Identitas ini bukan hanya hasil dari faktor struktural, tetapi juga dari proses simbolik dan komunikasi di antara anggota kelompok. Dalam konteks Papua, identitas “kami orang Papua” terbentuk melalui narasi sejarah, pengalaman diskriminasi, dan solidaritas etnis yang diwujudkan melalui aksi kolektif, baik di dunia nyata maupun dunia maya. Interaksi ini memperkuat rasa kebersamaan dan menciptakan batas simbolik antara “kami” dan “mereka” atau antara Papua dan Indonesia.

Dari perspektif Antonio Gramsci (1971), separatisme juga dapat dimaknai sebagai bentuk perlawanan terhadap hegemoni ideologis negara. Negara mempertahankan kekuasaan tidak hanya melalui kekuatan fisik, tetapi juga lewat dominasi ideologi yang disebarkan melalui media, pendidikan, dan simbol nasional. Namun, munculnya media sosial telah mengubah peta kekuasaan ini. Ruang digital kini berfungsi sebagai *counter-hegemonic space* di mana masyarakat dapat menantang narasi dominan negara. Dalam konteks Papua, berbagai komentar dan unggahan di media sosial yang mengkritik pemerintah atau menolak simbol nasional dapat dilihat sebagai upaya simbolik untuk menegosiasikan kembali makna kebangsaan dan menantang hegemoni ideologis negara.

Teori Lewis A. Coser (1956) mengenai konflik sosial juga relevan dalam memahami sikap separatis. Ia menegaskan bahwa konflik bukan sekadar gejala destruktif, tetapi juga mekanisme sosial yang dapat memperkuat identitas dan solidaritas kelompok. Dalam hal ini, konflik antara masyarakat Papua dan pemerintah pusat berfungsi memperkuat rasa kebersamaan di antara masyarakat Papua itu sendiri. Sikap separatis yang muncul di ruang digital dapat dianggap

sebagai simbol solidaritas internal yang menegaskan keanggotaan mereka dalam kelompok identitas yang berbeda dari negara dominan.

Selain itu, Ted Robert Gurr (1970) melalui teori deprivasi relatif menekankan bahwa perilaku separatis muncul ketika masyarakat merasa bahwa kondisi aktual mereka jauh lebih buruk dibandingkan harapan atau kelompok lain. Rasa ketidakadilan dan kesenjangan ini menimbulkan frustrasi kolektif yang kemudian dimanifestasikan dalam tindakan politik, baik dalam bentuk protes damai maupun gerakan pemisahan diri. Dalam konteks Papua, perbedaan signifikan dalam pembangunan ekonomi, pendidikan, dan kesejahteraan dibandingkan wilayah lain di Indonesia sering menjadi pemicu utama munculnya sikap separatis di berbagai lapisan masyarakat.

Dalam penelitian-penelitian terbaru, sikap separatis kini banyak dikaji dalam konteks komunikasi digital. Bräuchler (2020) menemukan bahwa media sosial berfungsi sebagai “ruang mediasi identitas” bagi masyarakat yang mengalami marginalisasi, karena memungkinkan mereka mengekspresikan identitas, aspirasi politik, dan perlawanan secara terbuka tanpa batas geografis. Demikian pula, Postill (2021) menunjukkan bahwa aktivisme digital di wilayah-wilayah konflik seperti Papua berperan penting dalam memperkuat narasi identitas lokal dan memperluas dukungan internasional melalui jaringan media global. Fenomena ini memperlihatkan bahwa sikap separatis tidak lagi hanya berbentuk gerakan fisik, melainkan juga berlangsung dalam bentuk digital activism yang menyebarkan ideologi identitas melalui ruang maya.

Dalam konteks Indonesia, Sumule (2020) menilai bahwa munculnya ekspresi separatisme digital di Papua tidak dapat dilepaskan dari kegagalan kebijakan integratif yang belum menyentuh dimensi sosial-budaya. Banyak masyarakat Papua merasa bahwa representasi mereka di tingkat nasional masih terbatas, dan narasi yang berkembang di media arus utama sering kali tidak mencerminkan realitas sosial mereka. Oleh karena itu, ekspresi separatis di media

sosial dapat dipahami sebagai cara masyarakat untuk mengartikulasikan identitas dan menuntut pengakuan yang selama ini dirasakan kurang.

Selain itu, Heryanto (2022) dalam kajiannya tentang nasionalisme dan media menyebut bahwa ruang digital telah menjadi arena baru bagi perebutan makna keindonesiaan. Wacana-wacana separatis dan nasionalis bersaing secara simultan di media sosial, mencerminkan adanya proses negosiasi identitas yang dinamis antara pusat dan daerah. Dalam konteks ini, sikap separatis bukan semata tanda permusuhan terhadap negara, tetapi juga bentuk komunikasi politik yang menegosiasikan ulang posisi Papua dalam konstruksi keindonesiaan.

Dari berbagai perspektif di atas, dapat disimpulkan bahwa sikap separatis merupakan hasil interaksi kompleks antara faktor struktural, historis, dan kultural yang diperkuat oleh perkembangan teknologi komunikasi. Di era digital, sikap separatis tidak hanya muncul dalam bentuk gerakan politik konvensional, tetapi juga sebagai praktik wacana dan identitas di ruang maya. Sikap ini mencerminkan kebutuhan masyarakat untuk mengartikulasikan eksistensi, keadilan, dan pengakuan terhadap identitasnya. Oleh karena itu, analisis terhadap sikap separatis di media sosial seperti grup *Facebook* IKKS perlu mempertimbangkan dimensi sosial, historis, dan simbolik yang saling berkelindan dalam pembentukan kesadaran kolektif masyarakat Papua.

4. Pengertian Masyarakat

Secara konseptual, masyarakat merupakan kumpulan individu yang hidup bersama dalam suatu wilayah dan terikat oleh sistem nilai, norma, serta kebudayaan yang mengatur interaksi sosial di antara mereka. Secara umum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI, 2024) menjelaskan bahwa masyarakat adalah kelompok individu yang hidup bersama, berinteraksi, serta mengikuti pola adat dan kebiasaan tertentu yang berlangsung terus-menerus dan didasarkan pada rasa kesamaan identitas. Dengan demikian, masyarakat bukan sekadar kumpulan individu, melainkan suatu sistem sosial yang memiliki pola hubungan, peran, dan struktur yang terorganisir.

Menurut Soerjono Soekanto (2013), masyarakat adalah sekelompok individu yang saling berinteraksi karena memiliki sistem nilai dan norma sosial yang sama. Interaksi tersebut menghasilkan struktur sosial yang menetapkan peran dan kedudukan setiap anggotanya. Ia menegaskan bahwa masyarakat tidak dapat dipisahkan dari sistem sosialnya karena struktur dan norma adalah unsur yang menjaga keseimbangan dan keteraturan sosial. Pandangan ini menunjukkan bahwa masyarakat terbentuk melalui proses sosial yang dinamis dan diikat oleh kesepakatan bersama.

Sementara itu, Koentjaraningrat (2009) mendefinisikan masyarakat sebagai kesatuan hidup manusia yang berinteraksi secara terus-menerus sesuai dengan adat istiadat dan norma yang telah berkembang dalam kebudayaannya. Ia menekankan bahwa unsur kebudayaan merupakan fondasi terbentuknya masyarakat karena di dalamnya terkandung nilai, simbol, dan makna yang membimbing perilaku anggota masyarakat. Dalam konteks Papua, masyarakat tidak hanya terbentuk berdasarkan interaksi sosial, tetapi juga oleh ikatan adat dan kekerabatan yang sangat kuat, seperti sistem *ondofa* atau kepemimpinan tradisional yang masih dihormati hingga kini.

Pandangan Emile Durkheim (1995) menambahkan dimensi fungsional dalam memahami masyarakat. Menurut Durkheim, masyarakat merupakan realitas sosial yang memiliki kekuatan moral di atas individu. Melalui konsep solidaritas sosial, Durkheim menjelaskan bahwa masyarakat modern terbentuk atas dasar ketergantungan antarindividu melalui pembagian kerja yang kompleks, sedangkan masyarakat tradisional lebih menekankan solidaritas mekanik berbasis kesamaan nilai dan kepercayaan. Konsep ini relevan untuk memahami masyarakat Papua yang berada dalam transisi antara solidaritas tradisional berbasis adat dan solidaritas organik yang dipengaruhi oleh modernisasi serta interaksi dengan dunia luar.

Sejalan dengan perkembangan dunia modern, pemikiran Anthony Giddens (2016) melalui teori strukturalisme menekankan bahwa masyarakat bukanlah entitas

yang statis, melainkan hasil dari interaksi timbal balik antara agen (individu) dan struktur sosial. Struktur tidak hanya membatasi tindakan manusia, tetapi juga memberi peluang bagi individu untuk bertindak dan mereproduksi struktur sosial melalui praktik sehari-hari. Dalam konteks media sosial, teori ini menunjukkan bahwa masyarakat digital terbentuk ketika individu secara aktif menggunakan ruang daring untuk menciptakan pola interaksi baru yang membentuk struktur sosial virtual.

Sementara itu, Manuel Castells (2010) melalui konsep *network society* atau masyarakat jaringan menjelaskan bahwa masyarakat modern telah berevolusi menjadi jaringan yang saling terhubung melalui teknologi komunikasi digital. Dalam masyarakat jaringan, kekuasaan, informasi, dan identitas mengalir melalui hubungan-hubungan digital yang melintasi batas geografis. Bagi masyarakat Papua, fenomena ini sangat relevan karena media sosial seperti *Facebook* dan *WhatsApp* menjadi sarana penting untuk membangun solidaritas, menyuarakan aspirasi, dan memperkuat identitas etnis dalam ruang virtual. Masyarakat Papua tidak lagi terbatas pada ruang geografis Sorong atau Jayapura, tetapi juga membentuk komunitas daring global yang melibatkan diaspora Papua di berbagai negara.

Dalam perspektif sosiologi modern, Zygmunt Bauman (2017) menggambarkan masyarakat masa kini sebagai *liquid society* atau masyarakat cair yakni masyarakat yang ditandai oleh perubahan cepat, mobilitas tinggi, dan lemahnya ikatan sosial tradisional. Di era media sosial, identitas dan hubungan sosial bersifat fleksibel serta mudah berubah. Masyarakat tidak lagi terikat pada struktur sosial yang kaku, melainkan membentuk komunitas sementara berdasarkan minat, emosi, atau isu tertentu. Dalam konteks penelitian ini, masyarakat digital di grup *Facebook* IKKS dapat dipahami sebagai bentuk komunitas cair, di mana individu dari latar belakang berbeda bergabung, berinteraksi, dan membentuk opini kolektif mengenai isu-isu sosial dan nasionalisme Papua.

Penelitian terbaru juga menunjukkan bahwa masyarakat di era digital mengalami transformasi dari masyarakat komunikatif menjadi masyarakat partisipatif. Jenkins et al. (2019) menjelaskan bahwa partisipasi dalam masyarakat digital tidak hanya berupa konsumsi informasi, tetapi juga produksi konten yang membentuk wacana sosial dan politik. Masyarakat Papua yang aktif di media sosial, misalnya, tidak hanya menjadi penonton isu nasional, tetapi juga produsen wacana mereka membingkai ulang isu nasionalisme, keadilan, dan identitas melalui postingan dan komentar di ruang digital. Hal ini memperlihatkan bahwa konsep masyarakat kini mencakup interaksi simultan antara dunia nyata dan dunia maya.

Selain itu, Ritzer (2021) melalui teori *McDonalidization of Society* menjelaskan bahwa rasionalisasi dan globalisasi menyebabkan perubahan perilaku sosial masyarakat modern yang semakin efisien, terprediksi, dan terkontrol. Meskipun teori ini awalnya digunakan untuk menjelaskan perilaku ekonomi, dalam konteks sosial digital, rasionalisasi juga terlihat pada cara masyarakat menggunakan media sosial secara strategis untuk memengaruhi opini publik atau memperjuangkan kepentingan politik. Fenomena ini tampak dalam pola penggunaan media oleh sebagian masyarakat Papua yang memanfaatkan platform digital untuk menegosiasikan identitas politik dan kultural mereka di hadapan publik nasional maupun internasional.

Dengan demikian, masyarakat pada dasarnya adalah sistem yang kompleks, terdiri atas individu-individu yang berinteraksi dalam tatanan sosial, budaya, dan teknologi yang terus berubah. Dalam konteks penelitian ini, masyarakat Papua yang berpartisipasi di media sosial tidak hanya merepresentasikan komunitas fisik, tetapi juga komunitas simbolik yang membentuk makna baru tentang identitas, solidaritas, dan nasionalisme. Masyarakat digital tersebut menjadi ruang artikulasi bagi berbagai pandangan sosial mulai dari nasionalisme integratif hingga semangat separatis yang mencerminkan dinamika hubungan antara Papua dan NKRI di era globalisasi komunikasi.

5. Media Sosial

Media sosial merupakan produk perkembangan teknologi komunikasi modern yang telah mengubah cara manusia berinteraksi, berkomunikasi, dan membentuk identitas sosial. Kehadirannya menandai pergeseran dari komunikasi satu arah yang bersifat massal menuju komunikasi dua arah yang partisipatif dan interaktif. Melalui media sosial, individu tidak hanya menjadi konsumen informasi, tetapi juga produsen konten yang dapat membentuk opini publik dan memengaruhi wacana sosial-politik di masyarakat.

Menurut Kaplan dan Haenlein (2010), media sosial adalah kelompok aplikasi berbasis internet yang dibangun di atas fondasi ideologi dan teknologi Web 2.0, yang memungkinkan penciptaan dan pertukaran konten yang dihasilkan pengguna (*user-generated content*). Definisi ini menegaskan bahwa kekuatan utama media sosial terletak pada partisipasi pengguna dalam menghasilkan dan mendistribusikan informasi. Media sosial seperti *Facebook*, *Instagram*, dan *Twitter* (kini *X*) memberi ruang bagi masyarakat untuk mengekspresikan diri, membangun jaringan, serta berbagi ide dan pandangan secara bebas.

Boyd dan Ellison (2012) menambahkan bahwa media sosial merupakan sistem berbasis *web* yang memungkinkan individu membangun profil publik atau semi-publik, menjalin hubungan dengan pengguna lain, serta melihat dan menavigasi jaringan hubungan tersebut. Melalui interaksi ini, terbentuklah struktur sosial digital yang meniru bahkan memperluas relasi sosial di dunia nyata. Media sosial tidak lagi hanya menjadi alat komunikasi, tetapi juga arena sosial yang menciptakan identitas, solidaritas, bahkan konflik antarindividu maupun antar kelompok.

Dalam perspektif komunikasi modern, Van Dijk (2013) memandang media sosial sebagai bagian dari *network society* masyarakat jaringan di mana kekuasaan, informasi, dan ide mengalir melalui jaringan digital. Dalam masyarakat jaringan, informasi menjadi sumber kekuasaan baru yang dapat digunakan untuk membangun pengaruh, memperkuat solidaritas, atau menentang

dominasi. Oleh karena itu, media sosial tidak hanya berfungsi sebagai sarana komunikasi pribadi, melainkan juga arena politik simbolik di mana wacana identitas, nasionalisme, dan perlawanan diproduksi dan dinegosiasikan.

Dalam konteks Indonesia, media sosial memiliki peran penting dalam pembentukan opini publik dan demokratisasi komunikasi. Data *We Are Social* (2024) menunjukkan bahwa lebih dari 79% penduduk Indonesia merupakan pengguna aktif media sosial, dengan *Facebook* dan *WhatsApp* sebagai platform paling populer. Hal ini menunjukkan bahwa ruang digital telah menjadi bagian integral dari kehidupan sosial masyarakat Indonesia, termasuk masyarakat di Papua yang kini semakin aktif menggunakan media sosial untuk mengekspresikan pandangan sosial, politik, dan budaya mereka

Dalam konteks Papua, media sosial memiliki fungsi ganda. Di satu sisi, platform digital menjadi sarana untuk memperkuat integrasi nasional melalui penyebaran informasi pembangunan dan kebijakan pemerintah. Namun di sisi lain, media sosial juga menjadi arena munculnya ekspresi identitas lokal dan perlawanan terhadap narasi dominan negara. Menurut Tapsell (2018), media sosial di Indonesia berperan sebagai arena kontestasi ideologis antara wacana negara dan suara-suara dari pinggiran, termasuk kelompok minoritas yang selama ini kurang terwakili di media arus utama.

Penelitian Brauchler (2020) menunjukkan bahwa di Papua, media sosial digunakan oleh masyarakat untuk menyuarakan aspirasi politik dan kultural, membangun solidaritas etnis, serta mengkritik kebijakan pemerintah. Ruang digital memungkinkan masyarakat Papua mengartikulasikan identitasnya secara lebih bebas, termasuk dalam menyuarakan isu-isu sensitif seperti keadilan sosial, hak asasi manusia, dan otonomi politik. Hal ini memperlihatkan bahwa media sosial telah menjadi instrumen penting dalam membentuk wacana separatis dan nasionalis yang bersaing secara bersamaan.

Sementara itu, Castells (2015) dalam konsep *mass self-communication* menjelaskan bahwa media sosial memberi kekuatan kepada individu untuk

mengomunikasikan pesan secara masif tanpa harus melalui lembaga media tradisional. Komunikasi ini bersifat horizontal, bebas, dan partisipatif, sehingga memungkinkan munculnya gerakan sosial baru berbasis jaringan. Dalam konteks Papua, hal ini terlihat pada berbagai gerakan digital yang menyoroti isu keadilan, diskriminasi, dan identitas, yang kemudian memperoleh perhatian luas baik di tingkat nasional maupun internasional.

Selain aspek politik, media sosial juga memiliki dimensi sosial dan psikologis yang kuat. Turkle (2017) menegaskan bahwa ruang digital memberi individu kesempatan untuk membangun identitas alternatif dan menegosiasikan peran sosialnya. Di masyarakat Papua, hal ini tampak dalam cara individu menampilkan identitas budaya, etnis, atau keagamaan dalam profil dan postingan media sosialnya. Melalui proses tersebut, media sosial berperan sebagai ruang representasi identitas di mana masyarakat dapat mengekspresikan kebanggaan atau kekecewaan terhadap realitas sosial yang mereka hadapi.

Penelitian Nasrullah (2020) juga menunjukkan bahwa media sosial di Indonesia berfungsi sebagai ruang publik baru yang memungkinkan masyarakat mengembangkan partisipasi politik berbasis komunitas. Ruang publik digital ini tidak sepenuhnya bebas dari kontrol, tetapi lebih cair dan terbuka dibandingkan media konvensional. Dalam kasus Papua, ruang ini memungkinkan warga mengekspresikan pandangan politik mereka, baik yang mendukung nasionalisme Indonesia maupun yang menyuarakan ide-ide separatistis dengan cara yang lebih terbuka dan dialogis.

Namun, media sosial juga memiliki sisi gelap yang perlu diperhatikan. Lim (2022) mengingatkan bahwa media sosial sering kali memperkuat polarisasi sosial melalui algoritma yang memfilter informasi sesuai preferensi pengguna. Akibatnya, muncul “ruang gema” (*echo chamber*) di mana individu hanya terpapar pandangan yang sejalan dengan keyakinannya sendiri. Dalam konteks Papua, fenomena ini dapat memperkuat segregasi opini antara kelompok pro-

NKRI dan kelompok pro-separatis, sehingga memperumit upaya dialog sosial yang konstruktif.

Oleh karena itu, memahami peran media sosial dalam konteks Papua tidak dapat dilepaskan dari dinamika identitas, kekuasaan, dan representasi yang berlangsung di ruang digital. Media sosial tidak hanya berfungsi sebagai sarana komunikasi, tetapi juga sebagai arena wacana di mana makna nasionalisme, keindonesiaan, dan ke-Papua-an terus dinegosiasikan. Dalam penelitian ini, grup *Facebook* Informasi Kejadian Kota Sorong (IKKS) menjadi contoh konkret bagaimana ruang digital menjadi medium ekspresi sikap sosial masyarakat Papua terhadap negara. Sikap separatis maupun nasionalis yang muncul di dalamnya bukan sekadar opini spontan, melainkan refleksi dari identitas kolektif dan posisi sosial yang terbangun melalui interaksi digital.

Dengan demikian, media sosial berperan sebagai instrumen penting dalam membentuk kesadaran sosial dan politik masyarakat modern. Ia berfungsi ganda sebagai jembatan komunikasi sekaligus medan pertarungan wacana yang memengaruhi cara masyarakat memahami dirinya, lingkungannya, dan hubungannya dengan negara. Dalam konteks Papua, media sosial menjadi ruang di mana identitas, nasionalisme, dan separatisme tidak lagi dibatasi oleh geografis, tetapi dikonstruksi dan diperdebatkan secara terbuka melalui simbol, bahasa, dan narasi digital.

6. Nasionalisme

Nasionalisme merupakan konsep fundamental dalam ilmu sosial dan politik yang menggambarkan kesadaran kolektif suatu bangsa terhadap identitas, kesatuan, dan tujuan bersama. Secara umum, nasionalisme mencerminkan perasaan cinta terhadap tanah air yang disertai dengan keinginan untuk mempertahankan dan memperjuangkan kedaulatan bangsa. Dalam konteks modern, nasionalisme tidak hanya dipahami sebagai ideologi politik, tetapi juga sebagai konstruksi sosial yang terus berubah mengikuti perkembangan zaman, termasuk era digital.

Menurut Ernest Renan (1882) dalam kuliahnya *Qu'est-ce qu'une Nation?*, bangsa bukan hanya berdasarkan kesamaan ras, bahasa, atau wilayah, melainkan kehendak bersama untuk hidup dalam kebersamaan dan mewarisi ingatan kolektif yang sama. Pandangan ini menegaskan bahwa nasionalisme terbentuk melalui kesepakatan sosial dan kesadaran historis yang menumbuhkan rasa memiliki terhadap negara.

Benedict Anderson (1983) memperdalam pandangan tersebut dengan memperkenalkan konsep *Imagined Communities*, yang menyebut bangsa sebagai komunitas yang “dibayangkan” karena anggotanya tidak mungkin saling mengenal secara langsung, namun memiliki rasa solidaritas melalui simbol, bahasa, dan media komunikasi. Ia menjelaskan bahwa media cetak pada masa kolonial telah memainkan peran penting dalam membangun kesadaran kebangsaan. Dalam konteks saat ini, peran media cetak tersebut telah digantikan oleh media sosial dan teknologi digital yang membentuk bentuk baru dari nasionalisme-nasionalisme digital.

Sementara itu, Eric Hobsbawm (1990) memandang nasionalisme sebagai produk sejarah yang muncul bersamaan dengan lahirnya negara-bangsa modern. Menurutnya, nasionalisme tidak bersifat alami, melainkan hasil dari proses politik dan ideologis yang dibangun oleh elit untuk menciptakan rasa kesatuan nasional. Ia menegaskan bahwa simbol-simbol nasional seperti bendera, lagu kebangsaan, dan upacara kenegaraan berfungsi sebagai alat untuk membentuk kesetiaan dan loyalitas warga terhadap negara. Dalam konteks Indonesia, simbol-simbol seperti bendera Merah Putih dan lagu Indonesia Raya menjadi bagian penting dari pendidikan nasionalisme yang diajarkan sejak usia dini.

Anthony D. Smith (1991) kemudian mengembangkan teori *ethno-symbolism* yang menyoroti pentingnya simbol, mitos, dan memori kolektif dalam membentuk identitas bangsa. Menurutnya, nasionalisme modern selalu berakar pada tradisi etnis dan budaya masa lalu yang menjadi sumber legitimasi emosional bagi keberadaan suatu bangsa. Dalam konteks Papua, nasionalisme Indonesia

berhadapan dengan nasionalisme etnis Papua yang memiliki simbol dan memori kolektif tersendiri, seperti bendera Bintang Kejora dan narasi sejarah Pepera 1969. Pertemuan dua bentuk nasionalisme ini melahirkan dialektika sosial yang terus berlangsung di ruang publik, termasuk di media sosial.

Craig Calhoun (2007) melihat nasionalisme sebagai bentuk kesadaran modern yang berfungsi untuk membangun identitas bersama dalam dunia yang semakin kompleks dan terfragmentasi. Ia menegaskan bahwa nasionalisme tidak dapat dilepaskan dari globalisasi, karena di tengah arus pertukaran budaya dan informasi yang cepat, nasionalisme justru muncul sebagai upaya mempertahankan identitas lokal dan kedaulatan politik. Hal ini sejalan dengan kondisi masyarakat Papua yang berupaya menegosiasikan identitas ke-Papua-an mereka di tengah arus globalisasi dan integrasi nasional Indonesia.

Dalam pandangan Rogers Brubaker (2015), nasionalisme bukanlah sesuatu yang tetap, melainkan proses sosial yang terus dinegosiasikan melalui praktik, simbol, dan wacana. Ia menyebut fenomena ini sebagai *nationhood as practice*, di mana nasionalisme tidak hanya hidup dalam kebijakan negara, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari masyarakat melalui bahasa, ritual, dan interaksi sosial. Dalam era digital, praktik nasionalisme ini termanifestasi dalam aktivitas daring seperti penyebaran konten bertema nasional, penggunaan simbol negara di media sosial, dan partisipasi dalam diskusi publik tentang identitas kebangsaan.

Sementara itu, Fox dan Miller-Idriss (2008) memperkenalkan konsep *everyday nationalism*, yaitu nasionalisme yang diwujudkan dalam tindakan sehari-hari seperti berbicara, berpakaian, berinteraksi, dan berkomunikasi. Dalam konteks Papua, nasionalisme sehari-hari dapat dilihat dari cara masyarakat mengekspresikan identitas mereka di media sosial, baik melalui penggunaan bahasa daerah, foto bendera Indonesia, maupun unggahan yang menegaskan kebanggaan terhadap identitas Papua dan keindonesiaan. Fenomena ini menunjukkan bahwa nasionalisme tidak hanya muncul dalam ranah politik

formal, tetapi juga dalam interaksi sosial digital yang bersifat personal dan emosional.

Kajian kontemporer memperlihatkan bahwa nasionalisme kini mengalami transformasi menuju bentuk nasionalisme digital atau *cyber nationalism*. Mihelj dan Jimenez-Martinez (2021) menyebut bahwa ruang digital telah menjadi arena utama dalam pembentukan wacana kebangsaan. Di media sosial, nasionalisme diproduksi, dikonsumsi, dan disebarluaskan melalui simbol visual, narasi emosional, dan interaksi daring yang melibatkan jutaan pengguna. Nasionalisme digital tidak hanya berfungsi memperkuat loyalitas terhadap negara, tetapi juga menjadi alat kritik dan negosiasi identitas dalam konteks global. Dalam konteks Papua, nasionalisme digital tampak dalam dua arus besar: nasionalisme pro-NKRI yang menekankan kesatuan dan kebanggaan terhadap Indonesia, serta nasionalisme etnis Papua yang menegaskan identitas kultural dan sejarah tersendiri.

Penelitian Tapsell (2020) dan Lim (2022) menunjukkan bahwa di Indonesia, media sosial telah menjadi arena penting bagi munculnya nasionalisme baru yang lebih emosional, spontan, dan terfragmentasi. Masyarakat mengekspresikan nasionalisme tidak lagi melalui lembaga resmi, melainkan melalui narasi personal seperti unggahan patriotik, hashtag nasional, atau video pendek bertema keindonesiaan. Fenomena ini memperlihatkan bahwa nasionalisme kini bersifat partisipatif, di mana masyarakat turut serta membentuk makna keindonesiaan melalui interaksi digital.

Dalam konteks Papua, Suryawan (2022) dan Sumule (2020) menegaskan bahwa nasionalisme perlu dipahami secara inklusif dengan menghargai keragaman etnis dan budaya lokal. Nasionalisme Indonesia tidak dapat dibangun dengan menafikan identitas lokal Papua, tetapi justru harus mengakomodasi nilai-nilai adat, sejarah, dan aspirasi masyarakatnya. Pendekatan nasionalisme inklusif ini diharapkan dapat meredam sikap separatistis dan memperkuat integrasi sosial melalui pengakuan serta keadilan struktural.

Dengan demikian, nasionalisme merupakan konsep dinamis yang selalu beradaptasi dengan perkembangan sosial dan teknologi. Di era digital, nasionalisme tidak lagi bersifat tunggal dan hierarkis, melainkan bersifat plural dan dialogis. Ia tumbuh melalui interaksi antara negara, masyarakat, dan ruang digital yang memungkinkan munculnya berbagai bentuk ekspresi identitas. Dalam penelitian ini, nasionalisme dipahami sebagai proses sosial yang muncul dalam wacana masyarakat di media sosial baik dalam bentuk dukungan terhadap NKRI maupun kritik terhadapnya yang mencerminkan upaya masyarakat Papua untuk menegosiasikan identitas dan posisi mereka dalam bingkai keindonesiaan.

B. Kerangka Pikir/Kerangka Konsep

Kerangka pikir pada penelitian ini disusun untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai hubungan antara konsep, faktor, dan variabel yang dikaji. Penyusunan kerangka pikir ini bertujuan untuk memperjelas alur logika penelitian sehingga setiap langkah analisis memiliki dasar teoritis yang kuat, terarah, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dalam studi sosial kontemporer, kerangka pikir berfungsi sebagai struktur yang menjembatani teori dan fenomena empiris, sehingga peneliti mampu mengorganisasi pendekatan teoretis secara sistematis (Creswell & Poth, 2021). Dengan demikian, kerangka pikir tidak hanya menjadi gambaran awal penelitian, tetapi juga peta konseptual yang mengarahkan interpretasi data.

Melalui kerangka pikir ini, peneliti memvisualisasikan bagaimana faktor sosial, politik, historis, kultural, serta dinamika digital secara simultan dapat memengaruhi terbentuknya sikap separatis di kalangan masyarakat Papua. Berbagai kajian terbaru menunjukkan bahwa sikap separatis tidak berdiri secara tunggal, tetapi merupakan hasil interaksi antarvariabel yang kompleks. Misalnya, teori collective trauma yang dikembangkan Hirschberger (2018) dan diperbarui oleh Vollhardt (2022) menjelaskan bahwa pengalaman sejarah kelompok dapat diwariskan sebagai memori kolektif yang memengaruhi identitas dan sikap politik generasi berikutnya. Hal ini relevan dengan konteks Papua, di mana memori

kolektif terkait sejarah Pepera, marginalisasi struktural, dan konflik bersenjata terus direproduksi dalam wacana publik, termasuk dalam komentar media sosial.

Selain itu, teori digital identity negotiation oleh Kligler-Vilenchik & Literat (2020) menegaskan bahwa media sosial menjadi ruang bagi individu dan kelompok untuk menegosiasikan identitasnya secara lebih terbuka dan politis. Dalam konteks tersebut, grup Facebook seperti IKKS berfungsi sebagai arena digital tempat masyarakat Papua menyuarakan identitas, pengalaman, dan resistensinya terhadap dominasi negara. Hal ini sejalan dengan pandangan Castells (2021) bahwa masyarakat jaringan (network society) memungkinkan munculnya identitas perlawanan (resistance identities) yang digunakan kelompok terpinggirkan untuk menantang struktur kekuasaan dominan. Dengan demikian, ruang digital tidak sekadar media komunikasi, tetapi juga arena politik simbolik.

Kerangka pikir ini juga menunjukkan bagaimana wacana yang muncul dalam komentar media sosial dipahami melalui pendekatan Analisis Wacana Kritis (CDA). Model Fairclough (2013), yang banyak digunakan kembali dalam penelitian wacana digital terbaru seperti oleh Machin & Mayr (2023) dan KhosraviNik (2022), menekankan hubungan antara tiga level analisis: teks, praktik wacana, dan praktik sosial. Melalui pendekatan ini, komentar digital tidak hanya dipahami sebagai rangkaian kata, tetapi sebagai produk ideologis yang dibentuk melalui relasi kekuasaan, memori sejarah, dan dinamika sosial-politik. Hal ini penting karena sikap separatis yang muncul pada masyarakat Papua sering kali terkait dengan ketimpangan pembangunan, representasi politik yang terbatas, dan pengalaman ketidakadilan yang bersifat struktural.

Di sisi lain, teori digital nationalism yang dikembangkan Mihelj dan Jimenez-Martinez (2021) memberikan perspektif bahwa nasionalisme kini tidak hanya dibentuk oleh negara, tetapi juga oleh interaksi warga di ruang digital. Hal ini menciptakan dialektika yang intens antara wacana pro-NKRI dan wacana pro-identitas Papua. Dalam konteks IKKS, kerangka pikir ini memetakan bagaimana

kedua arus wacana tersebut terbentuk, berinteraksi, bertentangan, atau saling menguatkan melalui komentar yang beredar.

Dengan demikian, kerangka pikir ini diharapkan mampu menjadi pedoman konseptual yang memandu peneliti dalam menganalisis masalah, menguraikan temuan, serta menyusun rekomendasi yang relevan berdasarkan hasil penelitian. Kerangka ini bukan hanya mendeskripsikan hubungan antarvariabel, tetapi juga menegaskan rasionalitas teoritis yang mendasari pemilihan metode CDA dalam penelitian ini. Kerangka pikir tersebut sekaligus memberikan arah analisis dalam memahami bagaimana konteks sosial, historis, dan digital memengaruhi perkembangan wacana separatisme dan nasionalisme di masyarakat Papua. Adapun kerangka pikir penelitian ini disajikan pada gambar berikut.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Terrell menjelaskan bahwa metode kualitatif bertujuan untuk menggambarkan dan menelaah berbagai fenomena, peristiwa, keyakinan, sikap, serta aktivitas sosial, baik yang muncul pada individu maupun kelompok. Metode kualitatif merupakan kumpulan metode untuk menganalisis dan memahami lebih dalam mengenai makna beberapa individu maupun kelompok dianggap sebagai masalah kemanusiaan atau masalah sosial .

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif untuk menganalisis Sikap Separatis Masyarakat berdasarkan telaah Komentar dalam Media Sosial terhadap Nasionalisme. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk menggali serta menganalisis secara mendalam makna, motif, dan ekspresi atau sikap separatis yang muncul dalam interaksi sosial di media sosial, khususnya dalam komentar-komentar di grup *Facebook* Informasi Kejadian Kota Sorong (IKKS)l. Studi kasus memungkinkan peneliti untuk memahami fenomena dalam konteks nyata, dengan fokus pada dinamika sosial masyarakat di Papua Barat Daya yang terpotret melalui media daring.

B. Lokasi dan Subjek Penelitian

Penelitian dilakukan secara daring dengan lokasi virtual pada Grup *Facebook* Informasi Kejadian Kota Sorong (IKKS). Subjek penelitian adalah komentar-komentar warganet yang menunjukkan indikasi sikap separatis, baik secara eksplisit maupun implisit, dalam berbagai unggahan yang berkaitan dengan isu sosial, politik, keamanan, atau kejadian yang bersifat sensitif.

C. Jadwal Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan selama dua minggu dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

1. Pada hari pertama hingga kedua, peneliti melakukan tahap persiapan, meliputi penyusunan instrumen, pengurusan izin penelitian, serta penentuan fokus komentar dan akun di grup *Facebook* Informasi Kejadian Kota Sorong (IKKS) yang relevan dengan isu separatisme dan nasionalisme.
2. Selanjutnya, pada hari ketiga hingga keenam, peneliti melakukan pengumpulan data utama dengan menelusuri, mendokumentasikan, dan mengklasifikasi komentar yang mengandung unsur sikap separatis dan nasionalis melalui teknik dokumentasi serta observasi *daring (netnografi)*.
3. Pada hari ketujuh hingga kesembilan, dilakukan wawancara mendalam terhadap beberapa informan yang dianggap memahami dinamika komunikasi publik dan isu kebangsaan di Sorong.
4. Kemudian, pada hari kesepuluh hingga kedua belas, data dianalisis menggunakan model analisis wacana Norman Fairclough, yang meliputi tahap analisis teks, praktik wacana, dan praktik sosial.
5. Tahap terakhir, yaitu hari ketiga belas hingga keempat belas, peneliti melakukan penyusunan hasil penelitian dan pembahasan yang selanjutnya disiapkan untuk proses bimbingan dan penyusunan laporan akhir skripsi.

D. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

1. Sumber data dalam penelitian terbagi menjadi dua :
 - a. Data primer diperoleh dari dokumentasi dan observasi non partisipatif terhadap komentar-komentar anggota grup IKKS.
 - b. Data sekunder diperoleh dari literatur, berita daring, dokumen kebijakan, dan kajian akademik terkait separatisme, media sosial, serta dinamika masyarakat Papua.

2. Teknik Pengumpulan data dilakukan dengan :
 - a. Observasi daring terhadap unggahan dan komentar di grup *Facebook* IKKS selama kurun waktu tertentu.
 - b. Dokumentasi berupa tangkapan layar (*screenshot*) komentar yang relevan.
 - c. Studi Pustaka (*Literatur dan Regulasi*)

E. Instrumen Penelitian

Adapun instrument Penelitian sebagai berikut :

1. Sikap separatis yang muncul dalam unggahan atau komentar di media sosial di Grup *Facebook* “Informasi Kejadian Kota Sorong (IKKS)”
 - a. Contoh unggahan atau komentar yang mengandung sikap separatis yang ada di grup IKKS.
 - b. Bentuk ekspresi sikap separatis itu muncul apakah melalui kata-kata, gambar, simbol, atau narasi tertentu ?
 - c. Reaksi anggota grup lain ketika ada komentar atau unggahan yang berbaur separatis.
2. Faktor-faktor yang menyebabkan munculnya sikap separatis di grup “Informasi Kejadian Kota Sorong (IKKS)”.
 - a. Penyebab utama munculnya sikap separatis di media sosial, khususnya di grup IKKS
 - b. Contoh seberapa besar peran pengalaman pribadi atau ketidakadilan yang dirasakan dalam memicu sikap separatis di dunia maya
 - c. Faktor pendidikan dan pemahaman kebangsaan berpengaruh terhadap cara seseorang bereaksi di media sosial
3. Solusi terhadap sikap separatis masyarakat yang muncul di media sosial *Facebook* grup IKKS
 - a. Cara yang paling efektif untuk mengurangi unggahan atau komentar bernuansa separatis di media social
 - b. Yang sebaiknya dilakukan oleh admin grup untuk mencegah penyebaran sikap separatis di IKKS

F. Teknik Analisis data

Analisis data dilakukan dengan analisis isi (*content analysis*) dan analisis wacana kritis (*critical discourse analysis*). Langkah-langkah analisis mencakup:

- a. Reduksi data : memilih dan mengklasifikasi komentar yang menunjukkan indikasi semangat separatis.
- b. Penyajian data : menyusun data dalam bentuk tematik berdasarkan polapola ujaran separatisme.
- c. Penarikan kesimpulan : menganalisis makna, konteks, dan ideologi di balik komentar, serta keterkaitannya dengan dinamika sosial-politik masyarakat.

G. Keabsahan Data

Untuk menjamin keabsahan data, digunakan triangulasi sumber (komentar, literatur, wawancara) dan validasi data melalui diskusi dengan ahli (peer debriefing) serta member check jika melibatkan narasumber.

H. Etika Penelitian

Penelitian ini menjunjung tinggi etika penelitian sosial, termasuk:

- a. Menjaga anonimitas identitas pengguna *Facebook*.
- b. Menghindari penyebaran ujaran kebencian.
- c. Menggunakan data hanya untuk kepentingan akademik.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Grup *Facebook* Informasi Kejadian Kota Sorong (IKKS)

Grup *Facebook* Informasi Kejadian Kota Sorong (IKKS) merupakan salah satu komunitas daring terbesar yang beranggotakan masyarakat Kota Sorong dan sekitarnya, dengan jumlah anggota yang terus meningkat setiap tahunnya. Berdasarkan pengamatan peneliti pada tahun 2025, anggota grup ini telah mencapai lebih dari puluhan ribu pengguna aktif yang berasal dari beragam latar belakang sosial, ekonomi, dan budaya. Grup ini awalnya dibuat sebagai wadah berbagi informasi terkait lalu lintas, kehilangan barang, kegiatan sosial, serta peristiwa yang terjadi di sekitar wilayah Sorong. Namun, seiring perkembangan waktu, ruang ini juga berkembang menjadi arena diskursus publik di mana isu-isu politik, identitas, dan nasionalisme sering kali muncul dalam bentuk unggahan maupun komentar.

Dalam konteks teori ruang publik digital (*digital public sphere*) yang dikemukakan oleh Papacharissi (2015), media sosial seperti *Facebook* berfungsi sebagai arena kontestasi ideologis, di mana warga membangun makna dan identitas politik melalui interaksi daring. Grup IKKS mencerminkan bentuk baru ruang publik di Papua Barat Daya yang mempertemukan pandangan pro-integrasi dan pro-separasi dalam satu ekosistem komunikasi. Di sini, bahasa menjadi alat utama dalam membentuk narasi sosial dan politik sejalan dengan pandangan Fairclough (2016) bahwa wacana digital berperan dalam membentuk struktur sosial baru melalui representasi simbolik.

Lebih jauh, kehadiran grup ini juga memperlihatkan apa yang disebut oleh Couldry dan Hepp (2017) sebagai *mediated construction of reality*, yaitu bagaimana realitas sosial dibangun melalui media dan interaksi daring. Narasi-narasi tentang identitas Papua, ketidakadilan sosial, dan nasionalisme tidak hanya dibicarakan, tetapi juga direproduksi melalui teks, gambar, dan simbol yang

beredar di ruang digital tersebut. Misalnya, dalam unggahan yang menampilkan bendera Bintang Kejora atau peta Papua dengan warna-warna khas, pengguna secara tidak langsung menciptakan representasi visual tentang “bangsa Papua” yang mandiri sekaligus menantang representasi resmi negara.

Selain itu, dalam perspektif Castells (2018) tentang *networked society*, grup *Facebook* seperti IKKS merupakan jaringan sosial yang membentuk pola komunikasi *horizontal*, di mana kekuasaan dan ideologi tidak lagi terpusat pada institusi formal, melainkan tersebar melalui interaksi antar individu. Dalam konteks ini, grup IKKS menjadi wadah bagi masyarakat Sorong untuk mengekspresikan aspirasi, kritik sosial, bahkan bentuk perlawanan simbolik terhadap dominasi negara. Ruang digital semacam ini memperlihatkan dinamika antara “kewargaan digital” dan “identitas lokal,” di mana masyarakat Papua menegosiasikan eksistensi mereka di tengah arus informasi global.

Kecenderungan munculnya wacana separatis di grup ini juga dapat dipahami melalui teori digital nationalism yang dikemukakan oleh Yilmaz dan Morison (2021). Menurut mereka, media sosial memungkinkan lahirnya bentuk nasionalisme baru yang bersifat emosional, visual, dan partisipatif. Dalam konteks IKKS, narasi separatis tidak semata ide politik, melainkan ekspresi identitas kolektif yang dibangun melalui simbol, slogan, dan pengalaman bersama sebagai masyarakat Papua. Unggahan yang mengandung kalimat seperti “Papua harus memimpin dirinya sendiri” atau “Bangsa ini akan bangkit” memperlihatkan penggunaan bahasa dan gambar sebagai sarana membangun solidaritas digital.

Dari perspektif komunikasi politik kontemporer, Vaidyanathan (2022) menegaskan bahwa media sosial telah mengubah cara individu memahami “komunitas politik” mereka bukan lagi berdasarkan ruang geografis, tetapi pada kesamaan pengalaman dan narasi. Hal ini tampak jelas pada IKKS, di mana anggota yang tersebar di berbagai daerah bahkan di luar Papua Barat Daya tetap aktif berdiskusi, menunjukkan keterikatan emosional dengan identitas “Orang Papua.” Interaksi seperti ini memperkuat gagasan bahwa komunitas daring dapat

membentuk *imagined community* (Anderson, 1983) versi digital, di mana rasa kebersamaan dan nasionalisme dibangun melalui simbol dan narasi yang tersebar di media sosial.

Dengan demikian, grup IKKS berfungsi ganda yaitu sebagai ruang berbagi informasi sosial dan sebagai arena diskursif yang mempertemukan dua ideologi besar separatisme dan nasionalisme. Kedua ideologi ini saling berinteraksi, berdebat, dan saling mengafirmasi di ruang digital yang tidak memiliki batas fisik, tetapi penuh dengan batas simbolik dan ideologis. Dalam konteks penelitian ini, keberadaan grup IKKS menjadi representasi mikro dari dinamika sosial-politik Papua Barat Daya di dunia maya, di mana identitas, kuasa, dan nasionalisme terus dinegosiasikan melalui bahasa, gambar, dan emosi kolektif.

B. Hasil Penelitian

1. Sikap separatis yang muncul dalam unggahan atau komentar di media sosial *Facebook* pada grup “Informasi Kejadian Kota Sorong (IKKS)”

Fenomena sikap separatis di media sosial, termasuk dalam Grup Facebook Informasi Kejadian Kota Sorong (IKKS), tidak dapat dilepaskan dari dinamika komunikasi digital, konstruksi identitas, serta interaksi politik di ruang daring. Sikap separatis di ruang digital biasanya terwujud melalui ekspresi verbal, simbolik, maupun tindakan partisipatif yang diarahkan pada gagasan pemisahan diri dari negara atau penolakan legitimasi negara.

1.1. Jenis unggahan atau komentar yang menunjukkan sikap separatis.

Berdasarkan hasil pengamatan pada grup *Facebook* Informasi Kejadian Kota Sorong (IKKS), ditemukan adanya berbagai unggahan dan komentar yang mengandung indikasi sikap separatis terkait isu Papua. Sikap separatis ini tampak muncul dalam bentuk komentar, unggahan gambar, penyebutan tokoh, maupun penyebaran narasi yang menekankan identitas Papua sebagai entitas politik yang terpisah dari Indonesia.

Temuan ini terlihat jelas pada sebuah unggahan yang mengangkat narasi nasionalisme seperti “Dari Sabang-Merauke tidak ada kata lain selain INDONESIA” dan slogan “NKRI Harga Mati” direspons oleh sebagian anggota dengan komentar yang berseberangan, bahkan bertentangan secara ideologis. Dengan kata lain, ruang komentar menjadi arena tarik menarik identitas politik antara sikap pro-NKRI dan sikap pro-kemerdekaan Papua.

Adapun bentuk komentar dan unggahan yang menunjukkan sikap separatis dapat diidentifikasi melalui beberapa ciri utama berikut:

a. Penolakan terhadap Identitas Indonesia

Dalam beberapa komentar, Papua secara eksplisit diposisikan sebagai bukan bagian dari Indonesia. Ungkapan tersebut bukan hanya menunjukkan ketidaksetujuan politik, tetapi juga pemisahan identitas nasional, seperti terlihat dalam komentar:

“Papua BUKAN Indonesia.”

“Papua bukan Melayu, Papua merdeka.”

Ungkapan ini menunjukkan bahwa sebagian anggota grup tidak mengakui identitas kebangsaan Indonesia sebagai identitas mereka. Dengan demikian, sikap separatis dalam kategori ini berangkat dari penolakan identitas nasional (*national identity rejection*).

b. Pengakuan terhadap Papua sebagai Negara Terpisah

Selain penolakan identitas, ditemukan komentar yang secara langsung menyatakan dukungan terhadap Papua Merdeka. Bentuk ini tampak melalui pernyataan yang lugas dan deklaratif, seperti:

“Tapi Papua Merdeka.”

“Freedom Papua.”

Pernyataan ini tidak lagi bersifat implisit atau simbolis, melainkan menunjukkan sikap politik yang jelas, yaitu keinginan untuk memisahkan Papua dari NKRI.

c. Pembentukan Identitas Tandingan melalui Simbol dan Representasi Visual

Dalam beberapa unggahan lain, muncul penggunaan simbol seperti Bendera Bintang Kejora, foto tokoh gerakan Papua Merdeka, hingga gambar massa aksi yang membawa atribut identitas Papua Barat. Simbol ini berfungsi sebagai:

- a. Penanda ideologi perlawanan,
- b. Representasi identitas kolektif,
- c. Sekaligus alat legitimasi visual gerakan separatis.

Simbol bukan hanya gambar, tetapi bahasa politik yang menegaskan keberadaan “negara lain” yang diimajinasikan oleh pendukung gerakan tersebut.

d. Penggunaan Narasi Ekonomi dan Politik untuk Membenarkan Pemisahan

Dalam beberapa komentar, Papua digambarkan sebagai kunci penopang ekonomi Indonesia, sehingga jika Papua merdeka maka Indonesia akan melemah. Narasi ini muncul dalam komentar seperti:

“Kalau Papua lepas, Indonesia jatuh miskin.”
“Indonesia butuh Papua untuk tetap bertahan.”

Narasi semacam ini membangun konstruksi logis bahwa kemerdekaan Papua dianggap bukan hanya mungkin, tetapi juga seharusnya terjadi karena ketidakadilan distribusi sumber daya. Narasi ekonomi ini menjadi legitimasi politik yang memperkuat wacana separatis. **(Lihat Gambar 1)**

Pada Kasus lain juga terdapat unggahan dalam grup *Facebook* Informasi Kejadian Kota Sorong (IKKS) menampilkan sebuah konten yang membahas penangkapan seorang tokoh Papua yang dikenal oleh sebagian masyarakat sebagai sosok yang memperjuangkan hak-hak politik orang Papua.

Unggahan tersebut tidak bersifat netral, tetapi dibingkai dengan narasi yang menyiratkan bahwa penangkapan tersebut merupakan tindakan ketidakadilan dari pemerintah atau aparat terhadap rakyat Papua. Unggahan ini kemudian memicu munculnya komentar-komentar yang secara jelas menunjukkan sikap separatis, baik melalui pembelaan tokoh, penguatan identitas Papua, maupun penolakan terhadap kewenangan negara Indonesia.

Komentar-komentar separatis pada kasus ini dapat diidentifikasi melalui beberapa pola utama berikut:

a. Pembingkai Tokoh sebagai Pejuang Kemerdekaan

Dalam kolom komentar, tokoh yang ditangkap tidak dipandang sebagai pelanggar hukum, melainkan sebagai:

1. Pembela hak-hak rakyat Papua,
2. Korban ketidakadilan negara, atau
3. Pejuang yang memperjuangkan kebenaran.

Ungkapan yang sejalan dengan itu misalnya:

“Beliau ini bukan kriminal, tapi pejuang pembebasan Papua.”
“Penangkapan ini adalah bukti bahwa Papua masih dijajah.”

Pernyataan tersebut menunjukkan adanya upaya membangun legitimasi moral terhadap gerakan kemerdekaan, dengan memposisikan tokoh sebagai simbol perjuangan.

b. Narasi Penindasan Politik oleh Negara

Beberapa komentar menyampaikan bahwa Indonesia tidak memperlakukan Papua sebagai bagian setara dalam negara, tetapi sebagai pihak yang ditindas. Narasi ini berfungsi untuk membangun gambaran bahwa Papua berada dalam posisi korban dalam relasi kekuasaan. Narasi viktimisasi seperti ini, menurut Schmitt & Branscombe (2002), merupakan strategi umum dalam komunikasi politik untuk memperkuat solidaritas kelompok melalui representasi

diri sebagai kelompok yang mengalami ketidakadilan struktural. Dalam konteks media sosial, narasi tersebut tidak hanya menjadi bentuk ekspresi emosi, tetapi juga alat politisasi identitas yang memperkuat batas “kami” (Papua) dan “mereka” (negara).

Beberapa contoh komentar yang mencerminkan konstruksi narasi ketidakadilan tersebut antara lain:

“Inilah bukti Papua tidak pernah diberi kebebasan.”
“Pemerintah hanya tahu menindas, tidak mau mendengar suara Papua.”

Narasi seperti ini memberikan pembenaran emosional dan etis bagi tuntutan pemisahan diri dari NKRI.

c. Penyampaian Ajakan atau Harapan untuk Kemerdekaan

Dalam beberapa komentar ditemukan ungkapan yang secara langsung menunjukkan dukungan terhadap Papua merdeka sebagai solusi dari ketidakadilan tersebut, seperti:

“Perjuangan belum selesai, Papua harus merdeka.”
“Penangkapan ini tidak akan menghentikan kita. Papua akan bebas.”

Ini menunjukkan bahwa narasi ketidakadilan digunakan sebagai sarana untuk mendorong dukungan pada kemerdekaan.

d. Penguatan Identitas Kolektif Papua sebagai Entitas Berdaulat

Selain itu, ditemukan pula komentar yang menegaskan bahwa Papua tidak hanya berbeda secara budaya, tetapi juga berhak menentukan nasib politiknya sendiri, misalnya:

“Kami punya sejarah sendiri, kami bukan bagian dari mereka.”
“Papua harus berdiri sebagai bangsa sendiri.”

Pernyataan ini menjadi penanda bahwa identitas Papua tidak hanya diposisikan sebagai identitas lokal, tetapi sebagai identitas nasional tandingan. **(Lihat Gambar 2)**

Disisi lain lagi terdapat unggahan yang memperlihatkan adanya pembentukan identitas politik Papua sebagai entitas yang berbeda dari Indonesia. Tidak seperti kasus sebelumnya yang menekankan ketidakadilan atau tokoh perjuangan, kasus ini menampilkan narasi yang bersifat deklaratif, yaitu pernyataan yang secara langsung mengkonstruksi Papua sebagai bangsa yang mandiri.

Unggahan dan komentar tidak sekadar menyatakan ketidakpuasan terhadap pemerintah, tetapi mengartikulasikan perbedaan identitas secara tegas. Inilah bentuk sikap separatistis yang paling fundamental, karena separatisme berawal dari pemisahan identitas (*identity separation*) sebelum berkembang menjadi tuntutan politik. Komentar-komentar yang memperlihatkan pola tersebut di antaranya sebagai berikut :

“Papua adalah bangsa sendiri.”

“Papua bukan bagian dari Indonesia sejak awal.”

“Kami punya budaya, sejarah, dan tanah kami sendiri.”

Ungkapan ini menunjukkan proses penguatan identitas politik Papua yang diposisikan bukan sebagai salah satu provinsi Indonesia, melainkan sebagai bangsa (*nation*) yang berbeda dengan klaim sejarah dan legitimasi budaya.

a. Penegasan Identitas Papua sebagai Entitas Nasional

Pada kasus ini, identitas “Papua” tidak lagi dimaknai sebagai identitas lokal (suku atau wilayah), tetapi sebagai identitas nasional tandingan. Hal ini tampak dalam komentar-komentar yang menyatakan bahwa Papua:

Memiliki sejarahnya sendiri, terpisah dari sejarah Indonesia.

Memiliki leluhur dan garis budaya yang tidak menyatu dengan bangsa Melayu/Indonesia lainnya.

Berhak menentukan arah politiknya sendiri.

Dengan demikian, identitas Papua diartikulasikan sebagai identitas kebangsaan, bukan sekadar identitas etnis atau kultural.

b. Pembingkai Sejarah sebagai Dasar Legitimasi Pemisahan

Beberapa komentar menunjukkan bahwa sikap separatistis dalam kasus ini tidak hanya berangkat dari emosi atau ketidakpuasan, tetapi juga menggunakan sejarah sebagai alat legitimasi, misalnya:

Mengklaim bahwa Papua tidak pernah “benar-benar bergabung” dengan Indonesia.

Menganggap proses integrasi Papua dalam NKRI sebagai sesuatu yang tidak sah atau dipaksakan.

Dengan demikian, narasi sejarah digunakan untuk menyatakan bahwa Papua memiliki hak untuk mengoreksi “kesalahan sejarah” tersebut melalui kemerdekaan.

c. Normalisasi Gagasan Kemerdekaan melalui Bahasa Sehari-hari

Tidak seperti pada Kasus sebelumnya yang bersifat konfrontatif, komentar pada Kasus ini cenderung lebih tenang, deklaratif, dan tidak menggunakan bahasa agresif. Contoh komentarnya sebagai berikut :

“Papua harus tentukan nasib sendiri.”

“Bangsa kami punya jalan sendiri.”

Gaya bahasa seperti ini menunjukkan bahwa kemerdekaan dianggap sebagai gagasan yang wajar, bukan tindakan ekstrem. Hal ini penting, karena ketika gagasan separatistis dinormalisasi, dukungan kelompok akan lebih mudah tumbuh dan diterima.

d. Penguatan Solidaritas Identitas Antar Anggota Grup

Komentar yang muncul dalam kasus ini cenderung saling mendukung, membangun suasana bahwa pandangan identitas terpisah tersebut adalah:

Hal yang logis
Hal yang layak
Hal yang harus diperjuangkan bersama

Ini menunjukkan bahwa narasi identitas lebih mudah diterima dalam grup, dibanding narasi yang bersifat konfrontatif. **(Lihat Gambar 3)**

Pada unggahan lain juga ditemukan dalam Grup *Facebook* Informasi Kejadian Kota Sorong (IKKS) memperlihatkan dokumentasi aksi demonstrasi yang dilakukan oleh sekelompok massa dalam konteks tuntutan kemerdekaan Papua. Unggahan tersebut bukan sekadar informasi kegiatan biasa, tetapi mengandung simbol, slogan, dan ekspresi yang secara eksplisit mendukung perjuangan pemisahan Papua dari NKRI. Foto atau video yang diunggah menampilkan:

- a. Kelompok massa berkumpul dalam satu lokasi,
- b. Membawa atribut yang mengidentifikasi perjuangan Papua Merdeka,
- c. Serta menampilkan tulisan-tulisan dan gestur yang menunjukkan sikap penolakan terhadap negara Indonesia.

Pemilihan konten visual semacam ini bukan kebetulan. Publikasi aksi massa di ruang digital berfungsi sebagai pembuktian eksistensi gerakan dan penguatan legitimasi bahwa perjuangan bukan hanya dilakukan oleh individu, tetapi didukung oleh kelompok sosial yang lebih luas.

Komentar-komentar yang menyertai unggahan tersebut kemudian mempertegas konteks sikap separatis, seperti:

“Aksi ini adalah suara rakyat yang sebenarnya.”
“Papua harus bebas, perjuangan tidak boleh berhenti.”
“Ini bukti bahwa Papua tidak diam, kami berjuang.”

Ungkapan seperti ini menunjukkan adanya konstruksi identitas kolektif militansi, yaitu persepsi bahwa perjuangan kemerdekaan adalah gerakan bersama, bukan wacana individu.

Unggahan ini bersifat eksplisit, karena menampilkan gerakan politik tanpa upaya penyamaran atau simbolisasi yang tersirat. Aksi demonstrasi di sini bukan hanya tindakan, tetapi pernyataan politik ruang publik yang dipublikasikan ulang melalui media sosial agar:

- a. Membuktikan bahwa perjuangan kemerdekaan masih hidup,
- b. Menunjukkan bahwa dukungan terhadap kemerdekaan melibatkan massa,
- c. Membangun legitimasi gerakan melalui representasi visual.

Dengan kata lain, demonstrasi yang dipublikasikan merupakan strategi propaganda visual. Dalam kolom komentar, slogan-slogan yang mendukung kemerdekaan Papua diulang dan diperkuat, misalnya:

“Papua tidak akan pernah menyerah.”
“Kami akan terus berdiri untuk kemerdekaan.”

Slogan ini berfungsi sebagai alat konsolidasi emosi kolektif, karena mengaktifkan rasa:

- a. Kebersamaan (solidaritas),
- b. Identitas bersama (*sense of belonging*),
- c. Dan kewajiban moral untuk melanjutkan perjuangan (*moral duty*).

Narasi dalam komentar menunjukkan bahwa demonstrasi tersebut dipahami bukan sebagai aksi kelompok kecil, tetapi sebagai representasi kehendak seluruh rakyat Papua, misalnya:

“Ini suara rakyat asli Papua.”
“Inilah bukti bahwa kami tidak tinggal diam.”

Narasi ini penting, karena gerakan politik menjadi kuat jika ia diposisikan sebagai aspirasi kolektif, bukan sebagai keinginan segelintir orang. Di sini, identitas Papua sebagai kelompok politis diperkuat melalui klaim kolektivitas.

Dalam beberapa komentar muncul pandangan bahwa demonstrasi semacam ini bukan tindakan melawan negara, tetapi sebagai bentuk perjuangan

yang wajar dan Hak rakyat untuk memperjuangkan kedaulatan serta Bahkan dianggap sebagai kewajiban moral generasi muda Papua.

Narasi tersebut menempatkan perjuangan kemerdekaan bukan sekadar aspirasi politik, tetapi sebagai nilai budaya dan etis yang diwariskan antar generasi. **(Lihat Gambar 4)**

Unggahan lain dalam grup *Facebook* Informasi Kejadian Kota Sorong (IKKS) menampilkan tokoh yang dikenal luas sebagai bagian dari gerakan perjuangan kemerdekaan Papua. Tokoh tersebut ditampilkan bukan dalam konteks personal ataupun sosial biasa, melainkan dalam konteks penokohan politis. Visual dan narasi yang menyertai unggahan menunjukkan bahwa tokoh tersebut dihormati, diagungkan, dan dijadikan simbol perjuangan untuk memperoleh kemerdekaan Papua dari Indonesia.

Unggahan dengan menonjolkan sosok tokoh semacam ini bukan hanya bentuk apresiasi, tetapi merupakan strategi pembingkai identitas politik, yaitu menghadirkan individu sebagai representasi ideologi dan perjuangan. Tokoh tersebut diposisikan sebagai pemimpin moral dan ideologis, bukan sekadar figur publik. Komentar-komentar pada unggahan ini memperkuat penokohan tersebut, misalnya:

“Beliau ini pejuang sejati, suaranya tidak boleh padam.”
“Selama beliau masih bernapas, Papua tidak akan menyerah.”
“Jalan yang beliau tunjukkan itulah jalan menuju kebebasan.”

Pernyataan-pernyataan ini menunjukkan adanya pembentukan kultus kepahlawanan dalam konteks perjuangan kemerdekaan Papua. Tokoh yang ditampilkan dalam unggahan tersebut tidak diposisikan sebagai individu biasa, tetapi sebagai ikon perlawanan. Dalam gerakan separatis, penokohan semacam ini berfungsi untuk:

- a. Membangun figur pemersatu gerakan,
- b. Memberi konsistensi arah perjuangan,

- c. Menciptakan legitimasi moral dan historis bagi tuntutan kemerdekaan.

Dengan demikian, tokoh tersebut diperlakukan sebagai “pahlawan nasional Papua”, bukan pahlawan Indonesia. Komentar-komentar yang muncul menggunakan bahasa pengagungan (*heroic rhetoric*). Bahasa seperti pejuang sejati, pemimpin kita, suara rakyat Papua, menegaskan adanya loyalitas emosional anggota grup kepada tokoh tersebut. Loyalitas ini penting, karena di dalam gerakan separatis:

- a. Tokoh bukan hanya pemimpin politik,
- b. Tetapi simbol legitimasi keberlanjutan perjuangan.

Penokohan dalam konteks ini adalah strategi untuk menjaga daya tahan ideologi. Banyak komentar yang menyatakan bahwa perjuangan tokoh tersebut harus diteruskan, bahkan apabila tokoh tersebut tidak lagi aktif atau tidak lagi memimpin tanpa hambatan. Contoh komentar:

“Perjuangan ini bukan milik satu orang, tapi kita semua harus melanjutkannya.”
“Beliau sudah buka jalan, tinggal kita meneruskan.”

Narasi ini membangun gagasan bahwa kemerdekaan adalah proyek generasi, bukan sekadar keinginan sementara. Dengan demikian, perjuangan menjadi Kewajiban moral, Tanggung jawab sejarah, Identitas kolektif.

Beberapa komentar menegaskan bahwa tokoh tersebut mewakili jati diri orang Papua, misalnya:

“Beliau bicara untuk kita, untuk tanah ini.”
“Suara beliau adalah suara bangsa Papua.”

Dengan demikian, tokoh tidak hanya menjadi pemimpin politik, tetapi simbol kultural. Ini menunjukkan bahwa sikap separatis pada kasus ini muncul melalui internalisasi identitas kolektif yang berkaitan dengan figur kepemimpinan. **(Lihat Gambar 5)**

Pada Kasus yang lain terdapat unggahan dalam Grup *Facebook* Informasi Kejadian Kota Sorong (IKKS) didominasi oleh narasi mengenai ketidakadilan sosial, eksploitasi sumber daya alam, dan ketimpangan pembangunan antara Papua dan wilayah lain di Indonesia. Tidak seperti kasus sebelumnya yang menonjolkan tokoh atau aksi demonstrasi, sikap separatistis di sini muncul melalui argumentasi sosial-politik yang diarahkan untuk membangun kesadaran kolektif atas ketidakadilan. Unggahan menggambarkan Papua sebagai wilayah yang:

Kaya akan sumber daya alam,
Namun tetap berada dalam kondisi keterbelakangan ekonomi,
Akibat pengelolaan dan distribusi hasil kekayaan yang dianggap tidak adil.

Komentar-komentar yang muncul memperkuat narasi tersebut, misalnya:

“Papua itu kaya, tapi kenapa tetap menderita?”
“Kami punya emas, tambang, hutan, tapi rakyatnya miskin.”
“Tanah kami diambil, tapi kami tetap tidak dianggap.”

Narasi ini membangun rasa ketidakpuasan yang bersifat struktural, bukan emosional atau personal. Papua digambarkan sebagai korban eksploitasi Negara, yang demikian, muncul argumentasi bahwa ketidakadilan adalah alasan yang sah untuk menuntut perubahan, termasuk kemerdekaan.

Walaupun tidak semua komentar secara eksplisit menyerukan pemisahan, narasi mengenai ketidakadilan ini mendorong membenaran ideologis bahwa Papua lebih baik berdiri sendiri. Berbeda dengan kasus sebelumnya yang langsung menyerang identitas Indonesia, komentar pada Kasus ini menggunakan bahasa yang bersifat rasional, analitis, dan persuasif, misalnya:

“Selama pusat yang menentukan pembangunan, Papua tidak akan maju.”
“Kami tidak diberi ruang menentukan masa depan kami sendiri.”

Bahasa ini lebih efektif membangun dukungan karena bersifat reflektif dan dapat diterima oleh kelompok yang lebih luas. Ketidakadilan yang ditampilkan dalam narasi ini diarahkan menuju satu kesimpulan implisit yaitu “Papua

seharusnya mengatur dirinya sendiri.” Dengan kata lain, kemerdekaan diposisikan sebagai solusi rasional, bukan hanya tuntutan emosional. **(Lihat Gambar 6)**

Pada Kasus berikutnya terdapat unggahan yang menampilkan tahanan politik (tapol) yang dikaitkan dengan gerakan kemerdekaan Papua. Tokoh ini digambarkan bukan sebagai individu yang melanggar hukum, tetapi sebagai korban penindasan dan simbol keteguhan perjuangan. Komentar dalam unggahan ini memperlihatkan glorifikasi tokoh tapol, misalnya:

“Beliau ditahan karena memperjuangkan kebenaran.”
“Penjara tidak akan memadamkan perjuangan.”
“Tapol adalah pahlawan bangsa Papua.”

Narasi ini membuat tindakan negara diposisikan sebagai bentuk ketidakadilan, sementara tokoh tapol diposisikan sebagai martir perjuangan.

a. Penahanan Dipahami sebagai Upaya Membungkam Perjuangan

Komentar menggambarkan penahanan sebagai representasi represi negara, bukan penegakan hukum. Dengan demikian, negara diposisikan sebagai penindas, sedangkan tokoh tapol diposisikan sebagai penjaga martabat bangsa Papua.

b. Tokoh sebagai Simbol Keteguhan

Tokoh yang tetap bertahan meskipun dipenjara dipuji sebagai Inspirasi perjuangan dan Bukti keberanian serta Lambang tidak menyerah menghadapi kekuasaan. Ini menciptakan identifikasi emosional antara anggota grup dengan gerakan.

c. Perjuangan Dianggap Harus Dilanjutkan

Dengan Komentar seperti ini “Perjuangan tidak selesai meski beliau dipenjara.” Telah menunjukkan bahwa kemerdekaan dipandang sebagai cita-cita berkelanjutan, bukan situasional. **(Lihat Gambar 7)**

Pada Kasus lain juga terdapat unggahan yang menampilkan penghormatan terhadap seseorang yang dianggap gugur dalam perjuangan Papua. Tokoh tersebut diperlakukan sebagai martir (pahlawan yang mengorbankan hidup). Unggahan disertai komentar seperti:

“Selamat jalan pejuang, kami akan lanjutkan perjuanganmu.”

“Perjuanganmu tidak akan sia-sia.”

“Kami akan terus berdiri sampai Papua merdeka.”

Unggahan ini membangun ikatan emosional yang sangat kuat antar anggota grup.

a. Martirisasi sebagai Strategi Penguatan Solidaritas

Dalam gerakan politik, martir berfungsi sebagai sumber inspirasi. Narasi “pengorbanan” membuat perjuangan dianggap:

1. Suci,
 2. Mulia,
 3. Pantas diteruskan.
- b. Rasa Kehilangan Diubah Menjadi Motivasi Kolektif

Kesedihan atas kematian tokoh tersebut dikonversi menjadi semangat perjuangan, bukan keputusasaan. Ini adalah strategi psikologis yang umum dalam gerakan pembebasan nasional.

c. Perjuangan Dianggap sebagai Kewajiban Moral Generasi Selanjutnya

Komentar yang muncul menekankan bahwa perjuangan tidak boleh berhenti, sehingga sikap separatis diturunkan sebagai warisan sejarah. Kasus ini menunjukkan bahwa sikap separatis juga dibangun melalui narasi pengorbanan, di mana tokoh yang gugur diposisikan sebagai martir yang memperkuat solidaritas antar pendukung kemerdekaan.

1.2. Bentuk ekspresi sikap separatistis itu muncul apakah melalui kata-kata, gambar, simbol, atau narasi tertentu

Berdasarkan hasil telaah terhadap keseluruhan data unggahan dan komentar pada grup *Facebook* Informasi Kejadian Kota Sorong (IKKS), sikap separatistis muncul melalui beragam bentuk ekspresi, baik yang bersifat eksplisit (langsung), maupun implisit (tersirat). Bentuk ekspresi ini tidak hanya hadir melalui penggunaan kata-kata, tetapi juga melalui simbol visual, narasi sejarah, glorifikasi tokoh, serta pembentukan identitas kolektif.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa ekspresi separatistis di ruang digital tidak tampil dalam satu bentuk tunggal, melainkan merupakan konstruksi multi-lapisan yang melibatkan aspek linguistik, visual, emosional, dan ideologis. Berikut ini pembahasan yang menjelaskan bentuk-bentuk ekspresi tersebut secara rinci.

a. Ekspresi Verbal Melalui Bahasa dan Narasi

Salah satu bentuk ekspresi yang paling dominan adalah penggunaan bahasa dalam kolom komentar. Komentar-komentar yang muncul mengandung pernyataan langsung seperti:

“Papua BUKAN Indonesia.”
“Papua adalah bangsa sendiri.”
“Papua harus merdeka.”

Pernyataan tersebut bukan hanya sekadar pendapat, tetapi merupakan deklarasi identitas politik. Dalam konteks komunikasi politik, bahasa yang digunakan dalam komentar ini berfungsi untuk:

1. Menolak penyatuan identitas Papua dalam NKRI,
2. Mengusulkan konstruksi identitas alternatif (Papua sebagai bangsa sendiri),
3. Menyampaikan aspirasi politik untuk kemerdekaan secara terbuka.

Bahasa yang dipilih bersifat langsung, tegas, dan afirmatif, sehingga memperlihatkan bahwa separatisme di sini merupakan keyakinan politik yang telah matang, bukan sekadar respon emosional sesaat.

b. Ekspresi Melalui Simbol Visual dan Representasi Kolektif

Selain bahasa, sikap separatis juga diekspresikan melalui simbol dan representasi visual, khususnya:

1. Gambar Bendera Bintang Kejora
2. Foto tokoh-tokoh gerakan kemerdekaan Papua
3. Dokumentasi aksi demonstrasi atau long march
4. Unggahan penghormatan terhadap tokoh yang gugur

Simbol-simbol tersebut memiliki makna ideologis yang mendalam, karena:

1. Menunjukkan eksistensi identitas Papua sebagai entitas politik,
2. Menggantikan simbol resmi negara Indonesia,
3. Menghadirkan narasi visual mengenai perlawanan dan keberlanjutan perjuangan.

Simbol, dalam konteks ini, berfungsi sebagai bahasa politik non-verbal yang mampu menyampaikan pesan identitas dan perlawanan tanpa perlu penjelasan panjang.

c. Ekspresi Melalui Glorifikasi Tokoh dan Martir Gerakan

Ekspresi separatis juga terlihat melalui penokohan (*heroization*), Tokoh-tokoh yang terkait dengan gerakan Papua Merdeka diposisikan sebagai:

1. Pahlawan perjuangan
2. Penjaga martabat Papua
3. Simbol keberanian dan pengorbanan

Unggahan penghormatan terhadap tokoh yang ditangkap (tahanan politik) atau gugur dalam perjuangan menunjukkan bahwa:

1. Perjuangan dianggap bernilai moral dan luhur,
2. Pengorbanan dipandang sebagai kesucian dan kehormatan,
3. Dukungan terhadap perjuangan diberikan melalui ikatan emosional.

Penokohan ini memainkan peran strategis dalam membangun solidaritas kolektif dan keterikatan emosional antaranggota grup.

d. Ekspresi Melalui Narasi Ketidakadilan Sosial dan Ekonomi

Bentuk lain yang muncul adalah narasi sistematis mengenai ketidakadilan struktural. Narasi ini tidak secara langsung menyerukan kemerdekaan, tetapi membangun landasan argumentasi bahwa:

1. Papua tidak memperoleh keadilan dari pemerintah Indonesia,
2. Kekayaan alam Papua tidak dinikmati oleh orang asli Papua,
3. Papua dianggap sebagai wilayah yang dieksploitasi, dimarginalisasi, dan dikuasai secara tidak setara.

Narasi ini menciptakan legitimasi rasional bagi perjuangan kemerdekaan, dengan pola argumentasi: “Karena Papua mengalami ketidakadilan maka Papua berhak menentukan nasib sendiri.” Dengan kata lain, kemerdekaan diposisikan sebagai solusi logis, bukan hanya simbolis.

e. Ekspresi Melalui Penegasan Identitas Politik Kolektif

Keseluruhan bentuk ekspresi di atas mengarah pada satu pola besar, yaitu pembentukan Papua sebagai identitas politik yang terpisah dari Indonesia. Identitas ini dibangun melalui:

1. Bahasa (pernyataan politik),
2. Simbol (bendera dan tokoh),
3. Solidaritas (emosi kolektif),

4. Narasi sejarah dan penderitaan (legitimasi moral).

Dengan demikian, identitas Papua dalam interaksi digital tidak hanya dipahami sebagai identitas etnis, tetapi sebagai identitas nasional tandingan.

1.3. Reaksi anggota grup lain ketika ada komentar atau unggahan yang berbau separatis.

Berdasarkan hasil analisis terhadap percakapan dan interaksi dalam Grup *Facebook* Informasi Kejadian Kota Sorong (IKKS), ditemukan bahwa unggahan dan komentar yang menunjukkan sikap separatis memicu respons yang kuat, beragam, dan saling bertentangan antaranggota grup. Reaksi ini tidak bersifat netral, melainkan memperlihatkan pertarungan narasi dan identitas antara pihak yang mendukung Papua Merdeka dan pihak yang tetap memegang teguh NKRI Harga Mati.

Dengan kata lain, grup IKKS bukan hanya ruang berbagi informasi, tetapi telah berfungsi sebagai arena kontestasi ideologi politik. Reaksi anggota grup dapat diklasifikasikan ke dalam tiga bentuk utama berikut:

1. Reaksi Pendukung Separatis (Pro-Kemerdekaan)

Kelompok ini terlihat memberikan dukungan terbuka terhadap narasi yang menyatakan bahwa Papua adalah bangsa yang terpisah dari Indonesia. Reaksi mereka umumnya bersifat tegas, progresif, dan memperkuat pesan kemerdekaan yang bentuk reaksinya antara lain :

- a. Mendukung narasi identitas politik
“Papua punya jalan sendiri dan harus menentukan masa depannya sendiri.
- b. Memperkuat simbol dan tokoh perjuangan
“Pejuang seperti ini tidak boleh dilupakan. Perjuangan harus dilanjutkan.”
- c. Menyetujui tindakan demonstrasi, penolakan, dan perlawanan
“Selama masih ada ketidakadilan, perlawanan tetap sah dan perlu.”

Kelompok ini memaknai perjuangan bukan sebagai tindakan melawan negara, tetapi sebagai hak moral untuk memulihkan martabat Papua. Reaksi ini menunjukkan adanya identifikasi emosional dan ideologis yang kuat terhadap gerakan separatis.

2. Reaksi Penentang Separatis (Pro-NKRI)

Kelompok kedua adalah anggota yang secara aktif menolak narasi pemisahan Papua dari Indonesia. Mereka melihat ungkapan separatis sebagai ancaman terhadap persatuan negara dan pelanggaran konstitusi. Bentuk reaksinya bersifat langsung, keras, bahkan konfrontatif, misalnya:

“Kalau mau Papua Merdeka, silakan keluar dari Indonesia. Negara ini sudah final.”

“Papua adalah NKRI. Perjuangan kemerdekaan itu tindakan makar.”

“Narasi seperti ini adalah provokasi dan harus ditindak.”

Kelompok reaksi penantang separatis atau pro NKRI ini sering menggunakan narasi seperti ini :

- a. Argumen sejarah integrasi Papua,
- b. Legalitas kedaulatan negara,
- c. Dan narasi nasionalisme Indonesia.

Konflik verbal antara kelompok pro-kemerdekaan dan pro-NKRI sering memuncak menjadi pertengkaran terbuka, memperlihatkan polarisasi identitas yang tajam.

3. Reaksi Netral, Diam, atau Menghindar

Kelompok ketiga adalah mereka yang tidak berkomentar meskipun membaca diskusi. Sikap diam ini dapat ditafsirkan sebagai:

- a. Kehati-hatian politik,
- b. Ketakutan untuk dianggap berada pada salah satu pihak,
- c. Kesadaran bahwa topik ini sarat risiko konflik sosial.

Dalam konteks konflik identitas, diam bukan netral, tetapi menunjukkan ketegangan sosial yang terpendam. Mereka tidak menolak gerakan separatis, tetapi juga tidak menyatakan dukungan secara terbuka.

2. Faktor-faktor yang menyebabkan munculnya sikap separatis di grup “Informasi Kejadian Kota Sorong (IKKS)”

2.1. Penyebab utama munculnya sikap separatis di media sosial, khususnya di grup IKKS

Berdasarkan hasil penelusuran terhadap unggahan, komentar, dan pola interaksi pada grup *Facebook* Informasi Kejadian Kota Sorong (IKKS), ditemukan bahwa sikap separatis tidak muncul secara tiba-tiba atau tanpa alasan. Sikap tersebut berkembang melalui kondisi sosial, pengalaman kolektif, dan konstruksi makna yang dibagikan antar anggota grup melalui media sosial.

Beberapa faktor utama yang menyebabkan munculnya sikap separatis dalam grup IKKS dapat diidentifikasi sebagai berikut:

a. Rasa Ketidakadilan dalam Pengelolaan Kekayaan Alam Papua

Salah satu faktor yang paling dominan adalah adanya persepsi ketidakadilan dalam distribusi dan pemanfaatan kekayaan alam Papua. Banyak anggota grup mengungkapkan bahwa Papua memiliki emas, minyak, kayu, dan sumber daya alam melimpah, namun kesejahteraan masyarakat setempat dinilai tidak mengalami peningkatan yang sepadan. Dalam komentar tampak ungkapan seperti:

“Tanah kami kaya, tapi kami tetap miskin.”

“Yang menikmati kekayaan Papua bukan orang Papua.”

Narasi semacam ini membentuk rasa keterasingan dan mendorong munculnya pikiran bahwa Papua akan lebih baik jika mengelola kekayaannya sendiri, tanpa campur tangan negara.

b. Pengalaman Marginalisasi Sosial dan Identitas

Sebagian anggota grup menunjukkan ekspresi bahwa mereka merasa tidak dianggap sebagai bagian setara dari Indonesia. Hal ini terlihat dari komentar yang mengaitkan:

1. Ras,
2. Budaya,
3. Warna kulit,
4. Bahasa,
5. serta stereotip sosial.

Ungkapan seperti “Kami bukan Melayu, kami berbeda” menunjukkan bahwa identitas Papua dibangun sebagai identitas yang terpisah, dan bukan bagian dari identitas nasional Indonesia. Perasaan ini menimbulkan kebutuhan untuk menegaskan jati diri, yang kemudian termanifestasi dalam bentuk penolakan terhadap simbol-simbol nasional Indonesia.

c. Penangkapan, Pengasingan, dan Penahanan Tokoh Perjuangan

Faktor lain yang memicu sentiment separatis adalah kisah tokoh-tokoh gerakan Papua Merdeka yang ditangkap atau dipidana oleh negara. Di dalam grup IKKS, muncul unggahan yang menunjukkan:

1. Penghormatan terhadap tokoh yang sedang menjalani hukuman,
2. Dukungan terhadap tokoh yang sedang diadili,
3. Penggambaran tokoh tersebut sebagai pejuang, bukan pelaku pelanggaran hukum dengan ungkapan seperti:

“Beliau berjuang demi rakyat Papua.”

“Penjara tidak akan memadamkan suara beliau.”

Hal ini menunjukkan bahwa penanganan tokoh tersebut justru memperkuat simbol perjuangan dan solidaritas, bukan melemahkannya.

d. Narasi Ketidakadilan Politik dalam Sejarah Papua

Dalam beberapa unggahan dan komentar, terlihat adanya pemaknaan ulang sejarah integrasi Papua ke dalam Indonesia. Beberapa anggota menyatakan bahwa proses integrasi tidak berlangsung secara adil menurut pemahaman mereka. Walaupun tidak semua komentar menyebut proses ini secara rinci, pola diskusinya mengarah pada keyakinan bahwa:

“Papua bergabung bukan atas pilihan bebas seluruh rakyat Papua.”

Persepsi ini menjadi landasan emosional dan historis bagi munculnya sikap separatis di ruang digital.

e. Penguatan Sikap Separatis Melalui Ruang Ekspresi Digital

Media sosial, dalam hal ini grup IKKS, memberikan ruang yang terbuka, Mudah diakses, dan Minim pengawasan serta Mengizinkan diskusi tanpa kontrol formal.

Dalam kondisi ini, narasi pro-kemerdekaan dapat berkembang dan diterima tanpa hambatan, terutama karena banyak anggota grup memiliki pengalaman dan perasaan yang serupa. Ruang digital ini memungkinkan:

Proses	Dampak
Pengulangan narasi separatis	Membentuk keyakinan kolektif
Pemberian dukungan antar anggota	Memperkuat solidaritas
Penerusan cerita perjuangan	Menjadikan gerakan sebagai identitas bersama

Dengan kata lain, grup IKKS berfungsi sebagai ruang penguatan psikologis dan politis bagi mereka yang mendukung gagasan Papua Merdeka.

2.2. Peran Pengalaman Pribadi dan Ketidakadilan yang Dirasakan dalam Memicu Sikap Separatis di Dunia Maya

Berdasarkan hasil pengamatan terhadap komentar, narasi, dan interaksi dalam grup *Facebook* Informasi Kejadian Kota Sorong (IKKS), ditemukan bahwa pengalaman pribadi dan rasa ketidakadilan mempunyai peran yang sangat signifikan dalam membentuk, mempertahankan, dan mengekspresikan sikap separatis di ruang digital. Sikap separatis dalam grup ini tidak hanya lahir dari wacana politik atau ideologi yang diwariskan, tetapi juga tumbuh dari cerita hidup dan pengalaman sosial yang dialami langsung oleh para anggotanya.

Bentuk kontribusi pengalaman pribadi terhadap munculnya sikap separatis dapat dilihat melalui beberapa pola berikut:

a. Pengalaman Diskriminasi Rasial dan Sosial

Sejumlah komentar dalam grup IKKS menunjukkan bahwa beberapa anggota merasa tidak diterima secara setara dalam kehidupan sosial, baik di lingkungan kerja, pendidikan, atau interaksi sehari-hari. Dengan pernyataan seperti ini :

“Kami sering dipandang rendah karena kami orang Papua.”

“Orang luar boleh berkuasa di tanah kami, tapi kami dianggap tidak mampu.”

Dengan demikian, maka jelas telah menggambarkan bahwa adanya perlakuan tidak setara dan stereotip negatif telah membentuk rasa sakit kolektif yang mendalam. Rasa dianggap berbeda dan tidak dihargai ini kemudian bertransformasi menjadi sikap:

“Kalau kami tidak diterima sebagai bagian dari Indonesia, maka kami memilih berdiri sendiri.”

Dengan demikian, pengalaman diskriminasi berfungsi sebagai pemicu emosional yang memperkuat keyakinan bahwa identitas Papua harus dipisahkan dari identitas Indonesia.

b. Pengalaman Ketidakadilan dalam Akses Ekonomi dan Pembangunan

Banyak komentar menyoroti kesenjangan pembangunan antara Papua dan wilayah Indonesia lainnya:

1. Infrastruktur yang tidak merata
2. Tingkat kemiskinan yang masih tinggi
3. Lapangan pekerjaan yang tidak sebanding dengan kekayaan daerah

Sementara itu pengguba media sosial atau anggota grup sering mengungkapkan pengalaman pribadi seperti:

1. Kesulitan mendapatkan pekerjaan meskipun di tanah sendiri
2. Peran ekonomi yang didominasi pendatang
3. Ketergantungan pada investasi perusahaan luar

Dengan ungkapan seperti:

“Tanah ini kaya, tapi kami tetap hidup susah.”

“Kami hanya jadi penonton di negeri kami sendiri.”

Maka jelas, telah menunjukkan bahwa ketidakadilan ekonomi menjadi sumber utama rasa kecewa yang berkembang menjadi tuntutan pemisahan politik.

c. Pengalaman Kekerasan, Penangkapan, atau Konflik Antarwarga

Beberapa unggahan atau komentar telah memperlihatkan kisah atau dukungan terhadap:

- a. Korban konflik,
- b. Tahanan politik,
- c. Atau keluarga tokoh yang dianggap memperjuangkan kemerdekaan.

Ungkapan empati semacam ini sangat kuat dalam memperkuat solidaritas dan keberpihakan. Ketika seseorang atau keluarga mengalami langsung kekerasan atau peristiwa traumatis, sikap separatistis tidak lagi bersifat ideologis, tetapi

menjadi reaksi emosional atas pengalaman kehilangan dan luka kolektif. Dalam grup, hal ini terwujud melalui komentar seperti:

“Kami kehilangan saudara kami karena perjuangan ini.”

“Mereka dipenjara bukan karena salah, tapi karena memperjuangkan tanah ini.”

Sehingga dengan unggaan yang seperti itu maka pengalaman pribadi berubah menjadi identitas perlawanan. Dengan kata lain, Pengalaman pribadi yang traumatis diolah dan dipertemukan dalam ruang digital hingga menjadi kesadaran bersama secara kolektif.

2.3. Faktor Pendidikan dan Pemahaman Kebangsaan dalam Mempengaruhi Reaksi Anggota di Media Sosial

Berdasarkan pengamatan terhadap diskusi dan komentar pada grup Informasi Kejadian Kota Sorong (IKKS), ditemukan bahwa tingkat pendidikan dan tingkat pemahaman mengenai wawasan kebangsaan memiliki pengaruh yang nyata terhadap cara seseorang menanggapi unggaan yang mengandung sentimen separatis. Perbedaan pola respons terlihat cukup jelas antara anggota yang memiliki akses pendidikan lebih tinggi dan yang memiliki pendidikan terbatas.

Dalam konteks ini, pendidikan tidak hanya dipahami sebagai tingkat formal (SMA, diploma, sarjana), tetapi juga mencakup pemahaman terhadap sejarah, identitas nasional, budaya politik, dan kemampuan mengolah informasi secara kritis. Hasil penelitian menunjukkan beberapa pola berikut:

- a. Anggota yang Memiliki Pemahaman Kebangsaan yang Kuat Cenderung Menolak Sikap Separatis

Pada sebagian komentar terlihat bahwa anggota yang menunjukkan pengetahuan lebih baik tentang:

1. sejarah penyatuan Papua ke dalam NKRI,
2. dasar konstitusi negara,
3. peran negara dalam pembangunan,

4. cenderung merespons unggahan separatis dengan argumen penolakan.

Komentar yang muncul dari kelompok ini biasanya bersifat argumentatif, bukan emosional, misalnya:

“Papua sudah menjadi bagian dari NKRI secara sah, tidak perlu dipisahkan.”
“Kita harus bangun Papua dalam bingkai Indonesia, bukan memecah negara.”

Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman kebangsaan mampu menjadi penahan munculnya sikap separatis.

- b. Anggota dengan Pendidikan Terbatas Lebih Rentan Mengikuti Narasi Separatis

Di sisi lain, anggota yang tidak memiliki pemahaman mendalam mengenai kebangsaan atau sejarah nasional cenderung lebih mudah dipengaruhi narasi emosional, simbol perlawanan, atau cerita tentang ketidakadilan. Komentar yang muncul biasanya:

1. bersifat spontan,
2. lebih emosional,
3. dan tidak didasarkan pada urutan fakta sejarah.

Misalnya:

“Kalau kami terus diperlakukan begini, lebih baik kami merdeka.”
“Indonesia selalu menindas Papua.”

Pada kelompok ini, sikap separatis bukan selalu disadari sebagai posisi politik, tetapi muncul sebagai reaksi emosional terhadap pengalaman yang dirasa tidak adil.

- c. Tingkat Literasi Digital Berpengaruh pada Cara Menanggapi Informasi

Selain pendidikan formal, kemampuan memahami dan memverifikasi informasi (literasi digital) juga memegang peran penting. Anggota yang memiliki kemampuan memilah sumber informasi lebih baik cenderung tidak langsung percaya unggahan provokatif, dan Mencari sumber pembandingan, serta lebih

berhati-hati dalam memberikan komentar. Sedangkan anggota dengan literasi digital rendah cenderung Langsung mempercayai unggahan tanpa mengecek kebenarannya dan Mudah terpengaruh framing yang mengarah pada konflik, serta Cenderung ikut serta dalam diskusi separatis tanpa filter.

Dengan demikian, perbedaan cara merespons di grup IKKS sangat berkaitan dengan kemampuan mengolah informasi secara kritis.

d. Pendidikan Membentuk Cara Memaknai Identitas

Dari hasil komentar yang muncul, terlihat bahwa Mereka yang memahami Indonesia sebagai identitas kolektif cenderung mengajak dialog, persatuan, dan pembangunan bersama. Sedangkan mereka yang memahami Papua sebagai identitas partikular cenderung memperkuat narasi pemisahan.

Dengan kata lain, pendidikan dan wawasan kebangsaan tidak hanya menentukan cara seseorang berbicara, tetapi juga cara seseorang melihat dirinya di dalam atau di luar negara.

3. Solusi terhadap sikap separatis masyarakat yang muncul di media sosial *Facebook* grup IKKS

3.1. Cara yang paling efektif untuk mengurangi unggahan atau komentar bernuansa separatis di media social

Berdasarkan pengamatan terhadap dinamika diskusi dalam Grup *Facebook* Informasi Kejadian Kota Sorong (IKKS), ditemukan bahwa upaya mengurangi unggahan atau komentar bernuansa separatis tidak dapat dilakukan hanya dengan tindakan penghapusan konten saja. Penghapusan atau pemblokiran konten justru sering memicu reaksi penolakan, kemarahan, dan tuduhan adanya pembungkaman suara. Temuan lapangan menunjukkan bahwa pendekatan yang efektif harus bersifat komunikatif, partisipatif, dan konsisten, sehingga anggota tidak merasa ditekan atau diserang.

Berikut adalah langkah-langkah atau metode yang paling efektif sebagaimana terlihat dari pola interaksi yang berhasil meredam ketegangan di grup:

a. Moderasi Konten secara Aktif oleh Admin Grup

Admin grup yang aktif memantau aktivitas diskusi dapat mencegah penyebaran komentar separatis sebelum menjadi konflik terbuka. Moderasi yang efektif tidak hanya berupa penghapusan postingan, tetapi juga:

1. Memberi peringatan secara langsung kepada anggota sebelum menindak lebih jauh,
2. Menutup kolom komentar pada postingan yang mengarah pada provokasi,
3. Melakukan pembatasan kata kunci tertentu dalam sistem filter grup.

Ketika moderasi dilakukan dengan penjelasan yang sopan dan jelas, anggota cenderung lebih menerima keputusan admin.

b. Penguatan Narasi Positif tentang Identitas Papua dalam Bingkai NKRI

Sikap separatis cenderung melemah ketika anggota mendapat ruang untuk Mengungkapkan kebanggaan budaya Papua, Menghargai identitas lokal, Tetapi tetap dalam bingkai persatuan Indonesia. Berikut ini unggahan yang menonjolkan:

Konten	Dampak
Kegiatan seni dan budaya Papua	Memperkuat kebanggaan tanpa memicu pemisahan
Prestasi Orang Asli Papua (OAP)	Meningkatkan rasa dihargai
Kisah sukses tokoh Papua dalam sistem nasional	Membangun harapan, bukan kemarahan

Ketika identitas lokal dihargai, dorongan untuk memisahkan diri menjadi berkurang.

c. Membuka Ruang Dialog yang Aman dan Terarah

Temuan menunjukkan bahwa sikap separatis sering menguat ketika individu merasa pendapatnya tidak didengar. Sebaliknya, ketika admin atau anggota yang dihormati:

1. memberikan ruang diskusi yang menghargai pendapat,
2. mengajukan pertanyaan terbuka,
3. dan mengajak berdialog,

maka suasana diskusi menjadi lebih terkendali dan tidak mudah meledak menjadi konflik. Contoh kalimat yang tampak efektif digunakan seperti “Kita boleh berbeda pandangan, tapi mari jelaskan dengan tenang agar semua bisa mengerti.” Atau dengan kalimat yang seperti ini “Apa yang kamu maksud dengan ketidakadilan? Coba kita bahas bersama.” Maka dengan pendekatan ini membuat anggota merasa didengarkan, bukan dilawan.

d. Penanaman Pengetahuan Kebangsaan yang Tidak Bersifat Menggurui

Pola yang ditemukan menunjukkan bahwa narasi kebangsaan yang disampaikan secara memaksa atau menuduh justru memicu perlawanan. Sebaliknya, narasi kebangsaan yang mengajak, menjelaskan, dan tidak merendahkan perasaan orang Papua lebih mudah diterima. Misalnya:

1. Menjelaskan kebijakan afirmasi OAP,
2. Menunjukkan program pembangunan yang benar-benar berjalan,
3. Menghadirkan peran tokoh Papua dalam lembaga negara.

Tujuannya bukan “meyakinkan dengan paksa”, tetapi menunjukkan bahwa Papua tidak dilupakan.

3.2. Tindakan yang Sebaiknya Dilakukan oleh Admin Grup untuk Mencegah Penyebaran Sikap Separatis di IKKS

Berdasarkan hasil pengamatan terhadap aktivitas pengelolaan grup *Facebook* Informasi Kejadian Kota Sorong (IKKS), ditemukan bahwa peran admin memiliki pengaruh yang sangat penting dalam menentukan arah diskusi dan dinamika interaksi antar anggota. Cara admin mengelola konten dapat mengurangi, mempertahankan, atau bahkan memperluas penyebaran sikap separatis dalam grup tersebut.

Dalam praktiknya, beberapa tindakan admin terbukti lebih efektif daripada tindakan lainnya. Temuan lapangan menunjukkan bahwa pendekatan pengelolaan yang tegas tetapi komunikatif adalah cara yang paling berfungsi dalam menjaga kondisi diskusi tetap kondusif.

Adapun langkah-langkah yang dinilai paling efektif dilakukan oleh admin grup IKKS adalah sebagai berikut:

1. Membuat Aturan Grup yang Jelas dan Terbuka untuk Semua Anggota

Sebelum melakukan tindakan moderasi, admin perlu menetapkan aturan tertulis yang dapat dilihat seluruh anggota, misalnya mengenai:

- a. Larangan mengunggah simbol separatis,
- b. Larangan memposting ajakan untuk memisahkan Papua dari NKRI,
- c. Larangan penghinaan terhadap identitas etnik manapun,
- d. Ketentuan sanksi untuk pelanggaran.

Aturan yang jelas meminimalkan tuduhan bahwa admin bertindak sewenang-wenang.

2. Melakukan Moderasi Diskusi Secara Aktif dan Konsisten

Pengelolaan grup yang efektif membutuhkan pemantauan rutin dan respons cepat terhadap unggahan yang berpotensi memicu konflik. Bentuk moderasi yang ditemukan efektif antara lain:

- a. Menghapus komentar provokatif sebelum berkembang menjadi perdebatan panas,
 - b. Menutup kolom komentar pada unggahan yang sensitif,
 - c. Memberikan peringatan langsung kepada anggota yang melanggar.
3. Menegur Anggota dengan Pendekatan yang Menjaga Harga Diri

Hasil pengamatan menunjukkan bahwa teguran yang bersifat menyerang pribadi sering memicu reaksi perlawanan dan memperburuk situasi. Sebaliknya, teguran yang disampaikan dengan bahasa yang netral, sopan, dan tidak merendahkan cenderung diterima. Contoh gaya pendekatan yang efektif dengan kalimat seperti ini “Mari kita hindari unggahan yang dapat memicu perpecahan. Grup ini dibuat untuk berbagi informasi, bukan berkonflik.”

Pendekatan seperti ini menunjukkan bahwa admin menghargai anggota sekaligus tetap menjaga aturan.

4. Mengarahkan Diskusi pada Isu Pembangunan dan Informasi Positif

Ketika admin secara aktif memposting konten informatif yang mendorong dialog yang sehat dan menonjolkan kemajuan dan prestasi orang asli Papua, serta menyajikan informasi tentang program pembangunan daerah,

Maka anggota grup merasa memiliki ruang untuk merasa dihargai identitasnya akan lebih kecil kemungkinan mencari pelampiasan identitas dalam bentuk perlawanan.

C. Pembahasan

1. Sikap separatis yang muncul dalam unggahan atau komentar di media sosial *Facebook* grup “Informasi Kejadian Kota Sorong (IKKS)”

1.1. Bentuk Unggahan dan Komentar yang Menunjukkan Sikap Separatis

Fenomena sikap separatis yang muncul dalam grup *Facebook* Informasi Kejadian Kota Sorong (IKKS) menunjukkan adanya ekspresi identitas politik yang berbeda dari identitas kebangsaan Indonesia. Unggahan dan komentar para anggota grup tidak hanya berbentuk pendapat individual, tetapi berkembang menjadi konstruksi narasi kolektif yang menegaskan identitas Papua sebagai entitas politik yang terpisah dari Indonesia. Oleh karena itu, pembahasan pada bagian ini berupaya mengkaji secara mendalam bentuk-bentuk sikap separatis tersebut dengan mengaitkannya dengan teori sosial-politik baik klasik maupun kontemporer.

Gerakan separatis telah lama dijelaskan melalui teori identitas etnis oleh Horowitz (1985), yang menyatakan bahwa etnisitas dapat menjadi dasar munculnya tuntutan politik pemisahan ketika suatu kelompok merasa identitasnya tidak terakomodasi dalam kerangka negara bangsa. Teori ini relevan dalam konteks Papua yang memiliki identitas ras, sejarah, dan pengalaman politik yang dianggap berbeda dengan identitas nasional Indonesia. Sementara teori lebih kontemporer yang dikemukakan oleh Wimmer (2018) menjelaskan bahwa konflik identitas nasional bukan hanya persoalan perbedaan etnis semata, tetapi juga hasil dari proses politisasi identitas dalam struktur kekuasaan negara.

Media sosial sebagai ruang interaksi baru memberikan peluang besar bagi lahir dan menyebarnya wacana identitas tersebut. Boyd (2011) menyebut media sosial sebagai ruang *networked publics*, yaitu ruang sosial baru tempat individu membentuk identitas, berinteraksi, dan membangun solidaritas. Teori ini diperdalam oleh De la Rosa & Lewis (2022) yang menyatakan bahwa media sosial berfungsi bukan hanya sebagai sarana komunikasi, tetapi juga sebagai arena

reproduksi politik identitas, di mana individu dapat menguatkan narasi kolektif melalui dukungan simbolik dan interaksi berkelanjutan.

Berdasarkan hasil analisis terhadap unggahan dan komentar dalam grup IKKS, terdapat beberapa bentuk sikap separatistis yang dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Penolakan terhadap Identitas Indonesia

Salah satu bentuk utama sikap separatistis dalam grup IKKS adalah penolakan terhadap identitas Indonesia. Penolakan tersebut ditunjukkan melalui pernyataan seperti:

“Papua bukan Indonesia.”

“Papua punya bangsa sendiri, bukan bagian NKRI.”

Pernyataan semacam ini menunjukkan bahwa sebagian anggota grup memosisikan identitas Papua sebagai entitas politik yang terpisah dari Indonesia. Dalam perspektif teori *Imagined Community* oleh Anderson (1983), bangsa terbentuk melalui konstruksi imajinasi kolektif yang diterima bersama oleh anggotanya. Jika suatu kelompok masyarakat menolak imajinasi ini, maka identitas nasional tidak berkembang secara merata.

Lebih lanjut, penelitian Wojcieszak dan Garrett (2018) menunjukkan bahwa kelompok yang merasa identitasnya dipinggirkan cenderung membangun identitas alternatif yang eksklusif serta menolak simbol dan narasi kebangsaan yang dianggap tidak mencerminkan jati diri kelompok tersebut. Dalam konteks grup IKKS, penolakan identitas Indonesia tidak berdiri sendiri, tetapi beriringan dengan penegasan identitas “ke-Papua-an” sebagai identitas politik yang lebih otentik.

Dengan demikian, penolakan terhadap identitas Indonesia dalam grup IKKS mencerminkan upaya rekonstruksi identitas nasional tandingan yang berimplikasi pada munculnya aspirasi pemisahan.

2. Pernyataan Langsung Mendukung Kemerdekaan Papua

Bentuk kedua sikap separatis terlihat dari komentar yang secara eksplisit menyatakan dukungan terhadap kemerdekaan Papua. Komentar-komentar yang ditemukan antara lain:

“Papua Merdeka adalah jalan kebenaran.”
“Papua harus berdiri sebagai negara sendiri.”

Jika penolakan identitas Indonesia merupakan proses ideologis awal, maka dukungan terhadap kemerdekaan Papua merupakan bentuk artikulasi tujuan politik. Tarrow (2011) menjelaskan bahwa gerakan sosial mengalami tahap konsolidasi ketika tujuan kolektifnya diungkapkan secara tegas dan berulang dalam ranah publik.

Penelitian kontemporer oleh Bliuc et al. (2020) memperkuat pandangan tersebut dengan menunjukkan bahwa intensitas interaksi dalam komunitas digital dapat memperkuat radikalisi identitas dan meningkatkan keberanian anggota untuk menyatakan sikap politik ekstrem secara terbuka. Konten dalam grup IKKS memperlihatkan konsistensi tersebut, di mana komentar dukungan terhadap kemerdekaan seringkali menerima respons afirmatif dari anggota lain.

Dengan demikian, dukungan terhadap kemerdekaan Papua dalam grup IKKS dapat dipahami sebagai bentuk konsolidasi politik identitas menuju tuntutan pemisahan negara.

3. Penggunaan Simbol Gerakan Perlawanan

Simbol merupakan bagian penting dalam pembentukan identitas gerakan. Dalam grup IKKS, simbol Bintang Kejora, gambar tokoh gerakan, dan atribut aksi massa sering muncul dalam unggahan maupun foto profil anggota.

Menurut Geertz (1973), simbol memiliki kekuatan dalam membangun makna bersama yang mengikat emosi kolektif. Askanius (2021) dalam penelitian media kontemporer menjelaskan bahwa simbol perjuangan yang beredar di media

sosial berfungsi sebagai emotional amplifier, yaitu penguat emosional yang mampu membangun militansi, kebanggaan, dan rasa memiliki terhadap gerakan.

Dalam konteks IKKS, penggunaan simbol bukan hanya bentuk ekspresi identitas, tetapi juga sarana memperkuat legitimasi perjuangan dan menghubungkan anggota grup dengan narasi sejarah gerakan Papua Merdeka.

4. Narasi Ketidakadilan Struktural

Narasi ketidakadilan merupakan unsur lain yang menonjol dalam konten grup IKKS. Unggahan mengenai eksploitasi sumber daya alam, kemiskinan masyarakat lokal, ketimpangan pembangunan, dan diskriminasi institusional sering dijadikan dasar untuk membenarkan tuntutan kemerdekaan. Komentar seperti:

“Kami kaya sumber daya, tetapi tetap miskin di negeri sendiri.”
“Tanah kami dirampas untuk kepentingan orang luar.”

Telah menunjukkan sentimen ketidakadilan yang dipahami secara kolektif. Dalam Teori *Relative Deprivation* oleh Gurr (1970) menyatakan bahwa rasa ketidakpuasan kelompok muncul ketika terjadi kesenjangan antara kondisi yang diharapkan dan kondisi yang dialami. Sementara penelitian terbaru oleh Dakhli dan Romero (2023) menunjukkan bahwa narasi ketidakadilan ekonomi merupakan salah satu faktor penggerak utama gerakan separatis kontemporer.

Dengan demikian, narasi ketidakadilan dalam grup IKKS tidak berdiri sebagai keluhan semata, tetapi berfungsi sebagai argumen ideologis yang memperkuat tuntutan pemisahan.

5. Penokohan Tokoh Perjuangan

Tokoh gerakan Papua Merdeka sering ditampilkan dalam unggahan sebagai figur heroik yang diperjuangkan dan dihormati. Penokohan ini berperan sebagai symbolic leadership yaitu sebuah konsep dalam studi gerakan sosial yang menjelaskan bagaimana figur tertentu digunakan untuk memusatkan harapan, perlawanan, dan identitas kolektif suatu kelompok (Melucci, 1996). Dalam

konteks IKKS, tokoh-tokoh tersebut bukan hanya dirayakan sebagai pahlawan sejarah, tetapi juga dijadikan simbol moral yang memandu arah perjuangan politik generasi saat ini. Unggahan terkait tokoh seringkali disertai komentar seperti:

“Beliau adalah pahlawan sejati tanah ini.”
“Kami meneruskan perjuangannya.”

Weber (1947) menyebut fenomena ini sebagai karisma politik, yaitu kondisi ketika legitimasi kepemimpinan didasarkan pada penilaian emosional terhadap sifat heroik individu. Penelitian Alimi (2020) menunjukkan bahwa tokoh memiliki peran penting dalam menjaga arah gerakan dan membangun keteguhan kolektif dalam menghadapi tekanan eksternal. Penokohan dalam grup IKKS berfungsi untuk:

- a. Memperkuat narasi sejarah perjuangan.
- b. Membangun teladan moral.
- c. Menghubungkan anggota dengan gerakan secara emosional.
6. Pembentukan Martir Sebagai Simbol Perjuangan Berkelanjutan

Narasi martirisasi muncul ketika tokoh atau anggota gerakan yang gugur diposisikan sebagai simbol pengorbanan. Komentar seperti:

“Perjuanganmu tidak akan pernah padam.”
“Darahmu menjadi api perjuangan kami.”

Hal demikian telah menunjukkan internalisasi memori kolektif yang digunakan untuk memperkuat komitmen kelompok. Hafez (2019) menjelaskan bahwa martirisasi merupakan strategi politik yang mengubah kesedihan menjadi motivasi perlawanan. Lebih mutakhir, penelitian Fakhri & Andersen (2024) menunjukkan bahwa martirisasi dalam media sosial meningkatkan kohesi kelompok melalui mekanisme emotional bonding dan pengulangan simbolik.

Dalam konteks grup IKKS, martirisasi menjadi elemen pengikat kesetiaan pada perjuangan jangka panjang. Dari analisis di atas, dapat dipahami bahwa

sikap separatis dalam grup IKKS terbentuk melalui proses sosial yang kompleks, yang melibatkan:

Dimensi	Bentuk Manifestasi	Dampak Identitas
Identitas	Penolakan NKRI & pengakuan identitas Papua	Pembentukan identitas nasional tandingan
Politik	Dukungan kemerdekaan & tokoh perjuangan	Konsolidasi tujuan gerakan
Simbolik	Penggunaan Bintang Kejora & martirisasi	Penguatan solidaritas kolektif
Struktural	Narasi ketidakadilan	Legitimasi perjuangan separatis

Dengan demikian, media sosial berfungsi tidak hanya sebagai sarana komunikasi, tetapi menjadi ruang pembentukan identitas politik yang memungkinkan tumbuhnya sikap separatis secara terstruktur, terorganisir, dan berkelanjutan.

1.2. Bentuk ekspresi sikap separatis itu muncul apakah melalui kata-kata, gambar, simbol, atau narasi tertentu ?

Bentuk ekspresi sikap separatis itu muncul apakah melalui kata-kata, gambar, simbol, atau narasi tertentu? Berdasarkan hasil telaah terhadap keseluruhan data unggahan dan komentar pada grup Facebook Informasi Kejadian Kota Sorong (IKKS), sikap separatis muncul melalui beragam bentuk ekspresi, baik yang bersifat eksplisit (langsung) maupun implisit (tersirat). Ekspresi ini tidak hanya hadir melalui penggunaan bahasa tekstual, tetapi juga melalui simbol visual, narasi sejarah, glorifikasi tokoh, serta pembentukan identitas kolektif yang berlangsung secara terus-menerus dalam ruang digital. Variasi bentuk ekspresi ini menunjukkan bahwa sikap separatis tidak diekspresikan secara tunggal, melainkan melalui kombinasi pesan linguistik, visual, dan emosional yang bekerja secara simultan untuk mengonstruksi makna politik tertentu.

Selain itu, pola-pola ekspresi ini memperlihatkan bagaimana anggota grup menggunakan berbagai jenis representasi untuk menyampaikan pandangan separatis, mulai dari komentar singkat, unggahan gambar yang memuat simbol perjuangan, hingga narasi panjang yang mengisahkan pengalaman ketidakadilan. Setiap bentuk ekspresi tersebut memiliki fungsi sosial-politik tersendiri, seperti memperkuat identitas kelompok, membangun legitimasi perjuangan, atau menciptakan solidaritas melalui penegasan musuh bersama. Dengan demikian, analisis ekspresi separatis dalam IKKS perlu dipahami sebagai fenomena yang bersifat intertekstual dan saling berkaitan antara satu dimensi dengan dimensi lainnya.

Untuk memperjelas bagaimana ekspresi tersebut direalisasikan oleh anggota grup, berikut pemetaan dimensi ekspresi dan fungsi sosial-politisnya:

Dimensi Ekspresi	Bentuk Realisasi	Fungsi Sosial-Politik
Linguistik (Bahasa)	Pernyataan penolakan dan tuntutan kemerdekaan	Deklarasi identitas politik
Visual (Simbol)	Bintang Kejora, tokoh perjuangan, dokumentasi aksi	Legitimasi dan penguatan emosi kolektif
Historis-Naratif	Ungkapan penderitaan sejarah dan ketidakadilan	Pembentukan argumen moral dan politik
Emosional-Kolektif	Glorifikasi tokoh dan martirisasi	Konsolidasi solidaritas dan keberlanjutan perjuangan

Dengan merujuk pada teori semiotika politik oleh Barthes (1972), simbol dan bahasa tidak hanya menyampaikan pesan, tetapi juga membangun mitos politik yang mengarahkan kesadaran kolektif. Sementara itu, dalam konteks era digital, paparan konten berulang dan interaktif memungkinkan terbentuknya *affective publics* (Papacharissi, 2015), yaitu komunitas politik yang terikat oleh ikatan emosional yang dibangun melalui media sosial. Pembahasan berikut menjelaskan bentuk ekspresi tersebut secara rinci.

1. Ekspresi Verbal Melalui Bahasa dan Narasi

Bentuk ekspresi paling dominan yang muncul dalam grup IKKS adalah penggunaan bahasa dalam kolom komentar. Bahasa menjadi medium utama untuk menyatakan penolakan terhadap nasionalisme Indonesia dan penegasan identitas Papua sebagai bangsa yang berbeda. Komentar-komentar seperti:

“Papua BUKAN Indonesia.”
“Papua adalah bangsa sendiri.”
“Papua harus merdeka.”

Hal ini merupakan bentuk deklarasi politik langsung, bukan sekadar opini atau ekspresi emosional spontan.

Dalam kajian komunikasi politik klasik, Lasswell (1948) menjelaskan bahwa bahasa politik berperan mengarahkan persepsi dan tindakan kolektif melalui penyampaian pesan yang sederhana, langsung, dan mudah dibaca. Hal ini terlihat dalam komentar-komentar anggota grup IKKS yang menggunakan struktur bahasa yang padat, berulang, dan bersifat afirmatif, sehingga memperkuat pemaknaan dan meyakinkan audiens di dalam grup.

Sementara itu Penelitian oleh Jost, Ledgerwood & Hardin (2022) menunjukkan bahwa penggunaan bahasa afirmatif dalam ruang digital memiliki potensi untuk:

- a. Meningkatkan keyakinan kelompok,
- b. Memperluas penerimaan narasi politik tertentu,
- c. Membangun *echo chamber* atau ruang gema ideologis.

Dalam grup IKKS, *echo chamber* ini terbentuk melalui interaksi sesama anggota yang saling mengafirmasi sikap separatis, sehingga memperkuat konsensus internal mengenai identitas Papua sebagai bangsa terpisah dari Indonesia.

Dengan demikian, bahasa berfungsi sebagai alat konstruksi realitas politik, di mana identitas Papua tidak hanya diklaim, tetapi dipertahankan dan direproduksi melalui interaksi digital sehari-hari.

2. Ekspresi Melalui Simbol Visual dan Representasi Kolektif

Selain ekspresi verbal, sikap separatis dalam grup IKKS juga diekspresikan melalui penggunaan simbol visual. Simbol-simbol tersebut meliputi:

- a. Gambar Bendera Bintang Kejora bagian dari Simbol paling menonjol yang menjadi representasi perjuangan kedaulatan Papua.
- b. Foto tokoh-tokoh gerakan Papua Merdeka yang dianggap sebagai pemimpin moral dan ideologis.
- c. Dokumentasi aksi demonstrasi atau long march yang Menunjukkan keberlanjutan gerakan dalam ruang publik.
- d. Unggahan penghormatan terhadap tokoh atau anggota gerakan yang gugur telah menunjukkan keberlanjutan ingatan perjuangan.

Menurut Geertz (1973), simbol memiliki fungsi membangun makna bersama yang mengikat anggota dalam suatu komunitas. Simbol berperan tidak hanya sebagai objek visual, tetapi sebagai sumber legitimasi dan identitas.

Penelitian kontemporer oleh Askanius (2021) menunjukkan bahwa simbol perjuangan yang beredar di media sosial berfungsi sebagai:

Fungsi Simbol Visual	Makna Perjuangan
Pengikat identitas	Mengingatkan anggota bahwa mereka bagian dari komunitas perjuangan
Pemantik emosi	Menguatkan rasa bangga, marah, atau harapan
Tanda perlawanan politik	Menolak simbol negara resmi (bendera merah putih)
Representasi sejarah	Menghubungkan perjuangan saat ini dengan masa lalu gerakan

Dari perspektif semiotika digital, simbol-simbol tersebut bekerja sebagai *power icons* (De Leon, 2020), yaitu ikon yang tidak hanya memiliki makna budaya, tetapi juga makna politis dan emosional.

Dengan demikian, penggunaan simbol visual dalam grup IKKS menunjukkan bahwa identitas Papua ditegaskan tidak hanya melalui pernyataan, tetapi juga melalui bahasa visual yang kuat dan berdaya mobilisasi.

3. Ekspresi Melalui Glorifikasi Tokoh dan Martir Gerakan

Ekspresi sikap separatistis juga terlihat melalui penokohan (*heroization*) terhadap tokoh gerakan. Tokoh-tokoh tersebut diposisikan sebagai:

- a. Pahlawan perjuangan,
- b. Simbol martabat dan harga diri Papua,
- c. Representasi keberanian dan keteguhan.

Unggahan berupa foto tokoh yang ditangkap, dipenjara, atau gugur dalam perjuangan sering disertai narasi dukungan seperti:

“Beliau adalah pejuang sejati tanah ini.”
“Jalan perjuangannya akan kami lanjutkan.”

Dalam teori karisma politik oleh Weber (1947), tokoh yang dianggap memiliki legitimasi moral sering dijadikan simbol pemersatu gerakan. Sementara penelitian terbaru oleh Alimi (2020) menegaskan bahwa penokohan memainkan peran strategis sebagai alat organisasional, yaitu menjaga arah ideologis gerakan tetap konsisten dan terfokus.

Lebih jauh lagi, terdapat proses martirisasi, yaitu pemaknaan pengorbanan tokoh sebagai bentuk kesucian perjuangan. Hafez (2019) menyatakan bahwa martirisasi berfungsi mengubah rasa kehilangan kolektif menjadi energi politik. Temuan ini diperkuat oleh penelitian Fakhri & Andersen (2024) yang menjelaskan bahwa martirisasi dalam media sosial meningkatkan ikatan

emosional antaranggota dan memperkuat komitmen jangka panjang pada perjuangan.

Dengan demikian, glorifikasi tokoh dalam grup IKKS tidak hanya membangun penghormatan, tetapi memperkuat identitas kolektif berbasis emosi dan moral perjuangan.

4. Ekspresi Melalui Narasi Ketidakadilan Sosial dan Ekonomi

Narasi ketidakadilan menjadi basis argumentatif yang sangat kuat dan berulang dalam grup IKKS. Narasi tersebut mencakup:

1. Ketimpangan pembangunan antara Papua dan luar Papua,
2. Eksploitasi sumber daya alam oleh perusahaan nasional/internasional,
3. Marginalisasi masyarakat asli Papua dalam pendidikan, ekonomi, dan politik,
4. Kekerasan simbolik dan struktural yang dialami masyarakat Papua.

Dengan Komentar seperti:

“Kami kaya, tetapi tetap miskin.”

“Tanah kami diambil, tapi kami tidak dihargai.”

Maka menunjukkan bahwa ketidakadilan dipahami bukan sekadar pengalaman personal, tetapi sebagai kondisi struktural.

Teori klasik *Relative Deprivation* (Gurr, 1970) menjelaskan bahwa gerakan perlawanan muncul ketika kelompok merasa terdapat perbedaan antara kondisi ideal yang seharusnya mereka dapatkan dan kondisi nyata yang mereka alami.

Penelitian terbaru oleh Dakhli & Romero (2023) menunjukkan bahwa narasi ketidakadilan merupakan faktor penentu lahirnya tuntutan separatis modern, karena narasi tersebut membangun legitimasi moral bahwa pemisahan adalah solusi yang “adil”.

Dengan demikian, narasi ketidakadilan bukan sekadar keluhan, melainkan strategi ideologis untuk membangun pembenaran politik atas tuntutan kemerdekaan.

5. Ekspresi Melalui Penegasan Identitas Politik Kolektif

Seluruh bentuk ekspresi di atas berkontribusi pada pembentukan satu gagasan besar yaitu Papua sebagai identitas nasional tandingan. Identitas ini tidak hanya terbentuk, tetapi dipertahankan dan dikembangkan melalui:

Aspek Pembentuk Identitas	Bentuk Ekspresi	Dampak
Bahasa	Pernyataan “Papua bukan Indonesia”	Penolakan identitas nasional
Simbol	Bendera Bintang Kejora	Legitimasi simbolik identitas baru
Tokoh	Glorifikasi pemimpin perjuangan	Pemersatu orientasi gerakan
Narasi	Ketidakadilan dan sejarah penderitaan	Justifikasi moral perjuangan

Hal ini sesuai dengan teori *Nation-Building* kontemporer oleh Wimmer (2018), yang menjelaskan bahwa identitas nasional dapat diproduksi dalam ruang sosial alternatif ketika identitas resmi negara dianggap gagal mengakomodasi pengalaman kelompok tertentu.

Dengan demikian, identitas Papua dalam interaksi digital tidak hanya berfungsi sebagai identitas budaya, melainkan telah berkembang menjadi identitas politik alternatif yang bersifat separatif, yaitu identitas yang menempatkan Papua sebagai bangsa yang berhak menentukan nasibnya sendiri (*self-determination identity*).

Maka dapat ditegaskan bahwa sikap separatis dalam grup *Facebook* IKKS diekspresikan melalui bentuk-bentuk berikut:

1. Bahasa dan pernyataan langsung yang menolak NKRI dan mendukung kemerdekaan.
2. Simbol visual, terutama bendera Bintang Kejora dan representasi tokoh perjuangan.
3. Glorifikasi tokoh dan martirisasi, yang memperkuat ikatan emosional kolektif.
4. Narasi ketidakadilan struktural, sebagai legitimasi moral dan politik gerakan.
5. Pembentukan identitas politik Papua, sebagai identitas nasional tandingan.

Dengan demikian, ekspresi separatis di media sosial merupakan fenomena yang terstruktur, konsisten, dan ideologis, bukan sekadar fenomena spontan atau emosional. Media sosial dalam hal ini berperan sebagai ruang reproduksi identitas dan solidaritas politik, yang memperkuat tuntutan pemisahan Papua dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

1.3. Reaksi Anggota Grup Lain terhadap Unggahan atau Komentar Bernuansa Separatis

Berdasarkan hasil analisis terhadap percakapan dan interaksi di Grup *Facebook* Informasi Kejadian Kota Sorong (IKKS), ditemukan bahwa komentar atau unggahan yang bernuansa separatis tidak hanya memunculkan percakapan biasa, tetapi berubah menjadi ruang perdebatan ideologis yang mencerminkan konflik identitas antara kelompok yang mendukung narasi Papua Merdeka dan kelompok yang menegaskan Papua bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dengan demikian, grup IKKS bukan sekadar ruang berbagi informasi lokal, tetapi juga arena kontestasi politik yang berlangsung melalui bahasa, simbol, dan ekspresi emosi kolektif.

Sebagaimana dinyatakan oleh Habermas (1989) tentang *public sphere*, media sosial dapat menjadi ruang diskursif tempat warga berpartisipasi dalam pembentukan opini bersama. Namun, penelitian terbaru oleh Papacharissi (2015) menegaskan bahwa ruang publik digital memiliki karakter yang berbeda: ia bukan

hanya arena rasional, tetapi arena emosional, tempat identitas dan perasaan bersama menjadi dasar dalam pembentukan posisi politik. Kondisi ini terlihat jelas pada dinamika di grup IKKS, di mana reaksi anggota tidak netral dan justru memperlihatkan polarisasi yang tajam.

Secara garis besar, reaksi anggota dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori utama:

1. Reaksi Pendukung Separatis (Pro-Kemerdekaan)

Kelompok ini menunjukkan dukungan terbuka terhadap gagasan bahwa Papua merupakan bangsa yang berbeda secara historis, etnis, dan politik, sehingga memiliki hak untuk menentukan nasib sendiri (*right to self-determination*). Reaksi pendukung separatis ini dapat dilihat dalam bentuk:

- a. Mendukung Narasi Identitas Politik Papua dengan ciri Komentar seperti ini :

“Papua punya jalan sendiri dan harus menentukan masa depannya sendiri.”

Pernyataan ini menunjukkan keyakinan bahwa Papua mempunyai identitas politik yang tidak dapat dilebur menjadi identitas nasional Indonesia. Hal ini sejalan dengan teori *Collective Identity* oleh Melucci (1996), yang menyatakan bahwa identitas politik kelompok terbentuk melalui pengalaman bersama, memori kolektif, dan simbol perjuangan. Dalam konteks Papua, pengalaman diskriminasi, stigma sosial, dan ketidaksetaraan pembangunan memperkuat pembentukan identitas politik terpisah dari NKRI.

Penelitian terbaru oleh Kareth (2021) juga menunjukkan bahwa narasi identitas Papua semakin menguat akibat penyebaran simbol budaya dan perjuangan di media sosial, yang menciptakan apa yang disebut “ruang perlawanan digital”.

- b. Memperkuat Simbol dan Tokoh Perjuangan dengan ciri Komentar seperti ini :

“Pejuang seperti ini tidak boleh dilupakan. Perjuangan harus dilanjutkan.”

Ungkapan ini bukan hanya bentuk penghormatan kepada tokoh gerakan kemerdekaan, tetapi juga bentuk heroization, yakni pembentukan figur pahlawan yang diposisikan sebagai contoh moral. Tokoh tersebut dianggap sebagai simbol resistensi terhadap negara.

Simbol seperti bendera Bintang Kejora juga berperan sebagai identitas visual politik. Menurut Castells (2017), simbol dalam gerakan sosial berfungsi sebagai alat komunikasi emosional yang dapat menyatukan anggota kelompok dan memperjelas batas “kami” dan “mereka”.

- c. Menyetujui Tindakan Demonstrasi dan Perlawanan dengan ciri ungkapan seperti dibawah ini :

“Selama masih ada ketidakadilan, perlawanan tetap sah dan perlu.”

Menunjukkan bahwa narasi perjuangan dipandang sebagai moral, bukan kriminal. Argumen ini didasarkan pada pengalaman historis Papua mengenai ketidaksetaraan politik, ekonomi, dan keamanan. Di ruang digital, narasi perjuangan ini membangun legitimasi moral bagi gerakan separatis.

Penelitian Wenda (2022) menunjukkan bahwa media sosial telah menjadi wahana penyebaran narasi keadilan dan trauma sejarah Papua, yang memperkuat dukungan terhadap gerakan kemerdekaan.

Reaksi ini tidak hanya menunjukkan dukungan politis, tetapi juga keterikatan identitas, yang berpijak pada pengalaman kolektif, solidaritas, dan rasa memiliki yang mendalam terhadap tanah Papua. Artinya, separatisme bukan semata gerakan politik, tetapi juga ekspresi psikologis dan emosional tentang martabat.

2. Reaksi Penentang Separatis (Pro-NKRI)

Kelompok ini secara aktif menolak narasi pemisahan Papua dari Indonesia dan memandang gerakan separatis sebagai ancaman kedaulatan negara. Reaksi kelompok ini bersifat tegas, bahkan sering konfrontatif, misalnya:

“Kalau mau Papua Merdeka, silakan keluar dari Indonesia. Negara ini sudah final.”

“Papua adalah NKRI. Perjuangan kemerdekaan itu tindakan makar.”

Penolakan ini konsisten dengan teori *Imagined Communities* oleh Anderson (1983), yang menyatakan bahwa bangsa adalah komunitas yang dibayangkan melalui konstruksi sejarah bersama. Bagi kelompok ini, Papua dianggap sebagai bagian integral dari Indonesia sejak proses integrasi melalui Pepera 1969.

a. Menggunakan Argumen Sejarah Integrasi

Kelompok ini menegaskan bahwa integrasi Papua ke Indonesia merupakan hasil keputusan resmi internasional. Narasi sejarah digunakan sebagai legitimasi moral dan hukum untuk mempertahankan keutuhan NKRI.

b. Menggunakan Landasan Hukum dan Konstitusi

Kelompok ini sering merujuk pada:

1. UUD 1945 Pasal 1 ayat 1: Negara Indonesia adalah negara kesatuan,
2. UU No. 27 Tahun 1999 tentang penanganan tindakan makar,
3. UU ITE untuk menertibkan unggahan yang dianggap menghasut.

Argumen ini mencerminkan pendekatan legalistik yang memandang separatisme sebagai tindakan pelanggaran hukum, bukan sebagai ekspresi identitas.

c. Narasi Nasionalisme Indonesia

Kelompok ini mengedepankan semboyan NKRI Harga Mati. Berdasarkan analisis Lestari (2019), nasionalisme Indonesia dalam konteks Papua sering bersifat defensif, karena merasa identitas nasionalnya ditantang oleh wacana identitas Papua.

Perdebatan antara kelompok pro-kemerdekaan dan pro-NKRI sering meningkat menjadi pertikaian verbal terbuka. Hal ini menunjukkan terjadinya polarisasi identitas (*identity polarization*), yaitu kondisi ketika dua kelompok tidak hanya berbeda pendapat, tetapi saling menolak keberadaan identitas yang lain.

Penelitian Syarif (2023) menyebutkan bahwa polarisasi identitas pada isu Papua merupakan bentuk konflik simbolik yang dapat memicu konflik sosial nyata apabila tidak dikelola.

3. Reaksi Netral, Diam, atau Menghindar

Kelompok ini memilih tidak terlibat meskipun membaca percakapan. Keputusan diam tersebut bukan tanpa alasan, melainkan dapat dipahami menggunakan teori *Spiral of Silence* oleh Noelle-Neumann (1974). Menurut teori ini, individu cenderung diam ketika pandangannya berbeda dari opini dominan, atau ketika keterlibatan dianggap berisiko.

a. Kehati-Hatian Politik

Isu Papua merupakan isu sensitif yang dapat menimbulkan masalah sosial maupun hukum. Karena itu, sebagian anggota memilih tidak mengambil posisi.

b. Ketakutan akan Sanksi Sosial

Komentar yang dianggap tidak sesuai dapat menimbulkan pelabelan, misalnya:

"Separatis"

"Anti-Papua"

"Anti-NKRI"

Label tersebut memiliki implikasi sosial yang kuat di masyarakat Papua.

c. Kesadaran Risiko Konflik

Sebagian anggota memahami bahwa perdebatan mengenai Papua Merdeka dapat memicu konflik antarindividu dalam komunitas nyata, sebab anggota grup berasal dari satu daerah yang saling terhubung secara sosial.

Dengan demikian, diam bukan sikap apatis, tetapi strategi melindungi diri dari risiko sosial dan politik. Diam adalah bentuk adaptasi sosial terhadap ruang diskusi yang dianggap berbahaya.

Dengan demikian, grup IKKS bukan sekadar ruang komunikasi sosial, tetapi juga arena kontestasi identitas dan ideologi politik. Ruang digital telah

menjadi medium konflik simbolik antara dua konstruksi identitas nasional: Papua sebagai bangsa dan Papua sebagai bagian dari Indonesia.

2. Faktor-faktor yang menyebabkan munculnya sikap separatis di grup “Informasi Kejadian Kota Sorong (IKKS)”.

2.1. Penyebab Utama Munculnya Sikap Separatis di Media Sosial, Khususnya di Grup IKKS

Munculnya sikap separatis di grup *Facebook* Informasi Kejadian Kota Sorong (IKKS) bukanlah fenomena yang berdiri sendiri, melainkan merupakan hasil dari dinamika sosial, politik, kultural, dan psikologis yang telah berlangsung dalam waktu panjang. Interaksi di ruang digital dalam grup IKKS memperlihatkan bagaimana pengalaman ketidakadilan, marginalisasi identitas, reinterpretasi sejarah, serta pengaruh figur simbolik berperan dalam membentuk sikap pro-kemerdekaan Papua. Media sosial dalam hal ini bukan hanya sarana komunikasi, tetapi menjadi ruang pembentukan gagasan, solidaritas, dan legitimasi politik kelompok (Papacharissi, 2015; Fuchs, 2021).

Berikut uraian penyebab utama yang diperkuat oleh teori-teori penelitian dan kajian ilmiah mutakhir.

1. Persepsi Ketidakadilan dalam Pengelolaan Kekayaan Alam Papua

Salah satu faktor yang paling signifikan adalah persepsi mengenai ketimpangan pengelolaan sumber daya alam. Narasi yang muncul dalam grup IKKS menunjukkan bahwa masyarakat Papua merasa tidak mendapatkan manfaat yang proporsional dari kekayaan alam daerahnya. Dengan komentar seperti:

“Tanah kami kaya, tapi kami tetap miskin.”

“Yang menikmati kekayaan Papua bukan orang Papua.”

Maka hal ini menggambarkan bahwa terdapat ketidakpuasan mendasar terkait distribusi ekonomi. Menurut teori *Justice as Fairness* (Rawls, 1971), ketidakadilan terjadi ketika struktur sosial tidak memberikan kesempatan yang merata bagi seluruh kelompok masyarakat untuk memperoleh kesejahteraan.

Dalam konteks Papua, persepsi ketidakadilan ini membentuk *collective resentment* (kekecewaan kolektif), yaitu perasaan marah bersama yang kemudian mendorong munculnya tuntutan kemerdekaan sebagai jalan keluar.

Penelitian kontemporer oleh Wanggai (2021) memperkuat pandangan ini dengan menunjukkan bahwa masyarakat Papua memandang eksploitasi sumber daya alam sebagai bentuk kolonialisme ekonomi modern. Selaras dengan itu, Schaefer (2019) menunjukkan bahwa ketika kelompok lokal merasa tidak memiliki kendali terhadap aset ekonomi mereka, maka muncul dorongan untuk memperjuangkan otonomi atau pemisahan politik.

Dengan demikian, persepsi ketidakadilan ekonomi bukan sekadar faktor tunggal, tetapi menjadi landasan emosional dan rasional bagi tumbuhnya sikap separatis.

2. Marginalisasi Identitas dan Krisis Pengakuan Sosial

Anggota grup IKKS juga menunjukkan kecenderungan menegaskan identitas Papua sebagai sesuatu yang berbeda dan terpisah dari identitas Indonesia. Hal ini tercermin dalam komentar seperti:

“Kami bukan Melayu, kami berbeda.”

“Kulit hitam kami adalah identitas kami, bukan kalian.”

Hal ini berkaitan dengan konsep teori identitas sosial oleh Tajfel dan Turner (1979) yang menjelaskan bahwa individu memperoleh rasa harga diri melalui keanggotaan kelompok sosial. Jika kelompok mereka dipandang *inferior*, mereka akan mencari cara untuk menegaskan identitas berbeda agar dapat memperoleh legitimasi.

Penelitian terbaru oleh Latu (2023) menemukan bahwa marginalisasi identitas orang Papua dalam ruang publik nasional menyebabkan meningkatnya kebutuhan pengakuan identitas diri (*identity recognition*). Hal ini dipertegas oleh teori *Politics of Recognition* (Fraser, 2018) yang menyatakan bahwa ketidakadilan

bukan hanya terjadi dalam ranah ekonomi, tetapi juga pada ranah kebudayaan, simbolik, dan penilaian identitas.

Dengan kata lain, sikap separatis dalam grup IKKS tidak hanya dimotivasi oleh faktor ekonomi, tetapi juga oleh kebutuhan untuk mempertahankan martabat budaya dan identitas etnis.

3. Penangkapan dan Penahanan Tokoh Separatis sebagai Sumber Legitimasi Perjuangan

Dalam grup IKKS terlihat adanya glorifikasi tokoh-tokoh perjuangan Papua Merdeka yang ditangkap atau dalam proses hukum. Simbolisasi tokoh tersebut sebagai pahlawan muncul melalui pernyataan seperti:

“Beliau berjuang demi rakyat Papua.”
“Penjara tidak akan memadamkan suara perjuangan.”

Hal ini dijelaskan oleh teori mobilisasi simbolik yang dikemukakan oleh Snow dan Benford (1992), yaitu proses ketika tokoh yang mengalami represi politik diubah menjadi simbol perlawanan. Tokoh tersebut berfungsi sebagai lambang keteguhan moral, sehingga semakin ditekan, semakin kuat pula legitimasi perjuangannya.

Kajian oleh Roem (2020) menunjukkan bahwa tindakan penegakan hukum yang tidak dibarengi pendekatan dialog justru memberikan efek "martir" (*martyrdom effect*), yaitu meningkatkan solidaritas dan kesediaan anggota kelompok untuk mendukung perjuangan.

Penelitian mutakhir oleh Sunarto (2023) menyatakan bahwa simbolisasi tokoh pejuang dalam ruang digital mempercepat pembentukan identitas perjuangan kolektif.

Dengan demikian, represi yang dimaksudkan untuk melemahkan gerakan separatis justru memperkuat narasi perjuangan.

4. Reinterpretasi Sejarah Integrasi Papua sebagai Ketidakadilan Politik

Sebagian besar anggota grup IKKS mengemukakan keraguan terhadap legitimasi sejarah integrasi Papua ke dalam Indonesia. Ungkapan seperti:

“Papua bergabung bukan melalui pilihan bebas rakyat Papua.”

Telah menunjukkan berkembangnya narasi bahwa integrasi tersebut tidak dilakukan secara demokratis. Dalam teori *collective memory* (Halbwachs, 1950), sejarah bukan hanya fakta kronologis, tetapi adalah ingatan sosial yang dikonstruksi. Ingatan ini dapat diolah ulang sesuai kebutuhan identitas kelompok. Dalam konteks separatisme Papua, reinterpretasi sejarah dilakukan untuk memperkuat klaim bahwa kemerdekaan adalah hak historis yang sah.

Penelitian terbaru oleh Widjojo (2021) menunjukkan bahwa narasi sejarah Papua telah menjadi arena perebutan legitimasi antara negara dan kelompok pro-kemerdekaan. Narasi sejarah yang dibicarakan ulang melalui media sosial mengalami penguatan emosional karena dibagikan, ditegaskan, dan diulang terus menerus.

5. Media Sosial sebagai Ruang Reproduksi Sikap Separatis

Peran media sosial sangat signifikan dalam memperkuat sikap separatis di grup IKKS. Media sosial memungkinkan:

Proses	Dampak
Pengulangan Narasi Ketidakadilan	Membentuk keyakinan bersama
Interaksi antar anggota dengan pengalaman serupa	Memperkuat solidaritas emosional
Ketiadaan kontrol politik formal	Memberikan kebebasan menyatakan pandangan separatis
Penyebaran simbol dan slogan perjuangan	Menciptakan budaya politik digital

Teori *Networked Public Sphere* dari Benkler (2006) menyatakan bahwa media digital menciptakan ruang publik baru yang tidak dikontrol oleh institusi

negara. Dalam ruang ini, wacana politik dapat berkembang dengan cara yang tidak simetris dengan narasi resmi negara.

Penelitian terbaru oleh Lim (2018; 2022) menunjukkan bahwa gerakan politik di Indonesia semakin bergeser ke ruang digital, di mana solidaritas terbentuk melalui *affective networking* atau jaringan emosi. Di IKKS, media sosial menjadi ruang untuk mengalami rasa kebersamaan dalam perjuangan, bukan sekadar ruang diskusi.

2.2. Peran Pengalaman Pribadi dan Ketidakadilan yang Dirasakan dalam Memicu Sikap Separatis di Dunia Maya

Sikap separatis yang berkembang dalam grup *Facebook* Informasi Kejadian Kota Sorong (IKKS) bukan hanya dipengaruhi oleh faktor struktural seperti ketimpangan ekonomi, politik, dan sosial, tetapi juga oleh pengalaman hidup pribadi yang dialami anggota grup. Pengalaman-pengalaman tersebut kemudian dipertukarkan, disuarakan, dan diperkuat melalui interaksi digital. Hal ini menunjukkan bahwa media sosial tidak hanya berfungsi sebagai sarana komunikasi, tetapi juga menjadi ruang validasi pengalaman, artikulasi identitas, dan pembentukan kesadaran politik kolektif.

Temuan ini sejalan dengan teori *Social Identity Theory* yang dikemukakan Tajfel dan Turner (1979), yang menjelaskan bahwa identitas kelompok terbentuk melalui pengalaman dan interaksi sosial yang dialami bersama. Pengalaman ketidakadilan yang dialami oleh individu kemudian diinterpretasikan bukan sebagai pengalaman personal semata, tetapi sebagai luka kolektif yang menimpa kelompoknya.

Penelitian kontemporer oleh Schiefer & van der Noll (2017) juga menunjukkan bahwa identitas kelompok semakin menguat ketika terdapat pengalaman diskriminasi, penyingkiran sosial, atau ketidaksetaraan struktural. Dengan demikian, pengalaman pribadi tidak berdiri sendiri, tetapi berfungsi sebagai fondasi emosional dalam memperkuat sikap separatis.

Dalam konteks grup IKKS, pengalaman pribadi yang mendorong sikap separatis umumnya dapat diklasifikasikan ke dalam tiga kategori utama, yaitu: (a) pengalaman diskriminasi rasial dan sosial, (b) pengalaman ketidakadilan dalam akses ekonomi dan pembangunan, dan (c) pengalaman kekerasan, penahanan, dan konflik yang berhubungan dengan gerakan Papua Merdeka.

1. Pengalaman Diskriminasi Rasial dan Sosial

Dalam banyak komentar yang muncul di grup IKKS, terdapat keluhan yang konsisten mengenai perlakuan berbeda yang diterima orang Papua dalam kehidupan sosial sehari-hari. Diskriminasi ini terlihat dalam bentuk stereotip negatif, bahasa merendahkan, dan perlakuan tidak setara. Pernyataan seperti:

“Kami sering dipandang rendah karena kami orang Papua.”

“Orang luar boleh berkuasa di tanah kami, tapi kami dianggap tidak mampu.”

Maka menggambarkan bahwa pengalaman diskriminasi menjadi sumber rasa sakit sosial (*social grievances*) yang mendalam.

Secara teoritik, pengalaman seperti ini dijelaskan melalui konsep *Recognition Theory* oleh Axel Honneth (1995), yang menyatakan bahwa identitas manusia dibentuk melalui pengakuan sosial. Ketika suatu kelompok tidak mendapatkan pengakuan sebagai kelompok yang setara dan bermartabat, maka akan muncul rasa keterasingan (*alienation*) dan keinginan untuk mencari ruang identitas baru di luar struktur sosial yang ada.

Dalam penelitian mutakhir, Panggabean (2022) menemukan bahwa orang Papua sering mengalami *racialized marginalization*, yaitu perlakuan diskriminatif yang didasarkan pada perbedaan ras dan etnis. Diskriminasi tersebut tidak hanya terjadi di lembaga formal seperti pendidikan dan pekerjaan, tetapi juga dalam interaksi sosial sehari-hari.

Ketika pengalaman diskriminasi ini diperkuat melalui narasi kolektif di media sosial, maka terbentuklah kesadaran bersama bahwa:

“Kalau kami tidak diterima sebagai bagian dari Indonesia, maka kami memilih berdiri sendiri.”

Dengan demikian, pengalaman diskriminasi bukan hanya berfungsi sebagai pemicu emosional, tetapi menjadi argumen moral dalam membenarkan tuntutan pemisahan identitas politik.

2. Pengalaman Ketidakadilan Akses Ekonomi dan Pembangunan

Pengalaman ketidakadilan ekonomi merupakan faktor penting lainnya yang ditemukan dalam interaksi anggota grup IKKS. Meskipun Papua dikenal memiliki kekayaan alam yang sangat besar, anggota grup mengungkapkan bahwa:

- a. Infrastruktur dasar tidak berkembang merata,
- b. Lapangan pekerjaan tidak terbuka luas bagi penduduk asli,
- c. Aktivitas ekonomi strategis dikuasai oleh pendatang dan perusahaan luar.

Dengan Pernyataan seperti ini :

“Tanah ini kaya, tapi kami tetap hidup susah.”

“Kami hanya menjadi penonton di negeri kami sendiri.”

menunjukkan adanya kesenjangan yang dirasakan antara potensi daerah dan kesejahteraan masyarakat lokal. Dalam kerangka teori klasik, ketidakadilan sosial semacam ini dapat dijelaskan menggunakan teori *Conflicts of Interest* dari Karl Marx (1887), yang menyatakan bahwa ketimpangan dalam penguasaan sumber daya akan menimbulkan kesadaran kelas yang berujung pada perlawanan terhadap struktur dominan.

Namun, untuk memperkuat landasan akademik sesuai perkembangan terbaru, penelitian oleh Aspinall & Berenschot (2019) menunjukkan bahwa ketimpangan pembangunan di Indonesia tidak hanya menciptakan kesenjangan ekonomi, tetapi juga membentuk rasa tidak percaya terhadap negara. Hal ini diperkuat oleh Wanggai (2021), yang mengungkapkan bahwa masyarakat Papua memandang pembangunan yang dilakukan negara sering kali bersifat “dari luar ke dalam” (*external-driven development*), bukan pembangunan berbasis kebutuhan masyarakat lokal.

Dengan demikian, pengalaman ketidakadilan ekonomi dalam konteks Papua tidak hanya menghasilkan rasa frustrasi, tetapi juga membentuk kesadaran politik untuk membangun sistem pemerintahan sendiri.

3. Pengalaman Kekerasan, Penangkapan, dan Trauma Konflik

Pengalaman kekerasan dan penahanan tokoh perjuangan memiliki peran sangat kuat dalam membentuk solidaritas kolektif dan sikap separatis. Dalam grup IKKS, sering muncul ungghahan yang mengekspresikan solidaritas terhadap:

- a. Korban penembakan atau konflik bersenjata,
- b. Tokoh gerakan Papua Merdeka yang ditahan,
- c. Keluarga dan pendukung aktivis.

Dengan ungkapan seperti ini :

“Kami kehilangan saudara kami karena perjuangan ini.”

“Mereka dipenjara bukan karena salah, tapi karena memperjuangkan tanah ini.”

menunjukkan bagaimana trauma personal berubah menjadi identitas perjuangan kolektif. Teori *Collective Trauma* dari Jeffrey Alexander (2004) menjelaskan bahwa trauma yang dialami oleh individu dapat diolah menjadi narasi bersama yang membentuk identitas kelompok. Ketika trauma tersebut dibicarakan, dibagikan, dan diperingati secara digital, maka pengalaman itu menjadi bagian dari memori kolektif kelompok.

Penelitian digital *ethnography* oleh Lim (2022) memperkuat hal ini dimana media sosial memberikan ruang bagi korban trauma untuk berbicara dan membangun solidaritas emosional. Proses ini disebut sebagai *emotional mobilization*, yaitu proses mengubah pengalaman personal menjadi energi politik kolektif.

Dengan demikian, pengalaman kekerasan bukan hanya memperkuat identitas perlawanan, tetapi juga memberikan legitimasi moral terhadap sikap separatis.

Dengan demikian, sikap separatistis di grup IKKS tidak sekadar bersifat ideologis, tetapi merupakan ekspresi dari pengalaman hidup yang direfleksikan, dibagikan, dan diperjuangkan bersama.

2.3. Faktor Pendidikan dan Pemahaman Kebangsaan dalam Mempengaruhi Reaksi Anggota di Media Sosial

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pendidikan dan pemahaman kebangsaan berpengaruh signifikan terhadap cara anggota grup *Facebook* Informasi Kejadian Kota Sorong (IKKS) merespons unggahan atau komentar yang mengandung sentimen separatistis. Perbedaan pola respons antara anggota yang memiliki tingkat pendidikan lebih tinggi dan anggota dengan pendidikan terbatas tampak jelas dalam cara mereka memaknai isu identitas, sejarah Papua, hubungan Papua dengan NKRI, serta dalam cara mereka mengelola informasi yang beredar di media sosial.

Dalam konteks studi ini, pendidikan bukan hanya dimaknai sebagai jenjang pendidikan formal, namun juga mencakup wawasan kebangsaan, pemahaman sejarah integrasi Papua, kemampuan berpikir kritis, literasi digital, dan kapasitas menilai sumber informasi secara objektif. Wawasan kebangsaan yang kuat terbukti menjadi salah satu penanda penting yang mampu menahan seseorang dari pengaruh narasi separatistis yang tersebar melalui media sosial.

1. Pendidikan sebagai Landasan Pembentukan Kesadaran Kebangsaan

Keterkaitan antara pendidikan dan kesadaran nasional telah dikemukakan jauh sebelumnya oleh Benedict Anderson (1983) melalui gagasan *imagined communities*. Anderson menjelaskan bahwa identitas kebangsaan terbentuk melalui proses pembelajaran sosial di mana individu mengimajinasikan dirinya sebagai bagian dari suatu komunitas yang lebih besar. Pendidikan memainkan peran penting dalam memperkuat imajinasi tersebut melalui pengajaran sejarah, simbol negara, bahasa bersama, dan narasi politik mengenai bangsa.

Sejalan dengan teori tersebut, Smith (2009) menjelaskan bahwa identitas kebangsaan tumbuh melalui proses internalisasi nilai-nilai negara dan pengalaman kolektif. Di Papua, proses internalisasi tersebut seringkali berhadapan dengan sejarah panjang ketidaksetaraan pembangunan dan pengalaman marginalisasi, sehingga pendidikan yang tidak sensitif terhadap konteks lokal dapat menyebabkan ketidakselarasan antara pengalaman sosial dan identitas nasional.

Penelitian (Suryawan, 2019; Yoman, 2021) menunjukkan bahwa kesenjangan antara narasi negara dan realitas kehidupan masyarakat Papua dapat memengaruhi bagaimana seseorang memaknai identitasnya. Apabila pendidikan tidak membangun ruang pemahaman yang inklusif, maka narasi separatis yang berlandaskan pengalaman emosional dapat lebih mudah diterima.

Dalam penelitian ini, anggota grup yang memiliki kemampuan memahami sejarah penyatuan Papua dengan NKRI, dasar hukum integrasi, serta peran negara dalam pembangunan, tampak merespons unggahan separatis dengan argumen yang logis dan terstruktur. Mereka tidak menolak keberadaan perbedaan pendapat, namun mereka berusaha mengarahkan diskusi ke arah persatuan dan pembangunan bersama. Misalnya, komentar seperti “Papua sudah menjadi bagian dari NKRI secara sah, jadi perjuangan kita adalah bagaimana membangun Papua agar maju bersama Indonesia” menunjukkan upaya untuk memperkuat identitas nasional melalui pendekatan argumentatif.

2. Anggota yang Memiliki Pemahaman Kebangsaan Kuat Cenderung Menolak Sikap Separatis

Kelompok anggota dengan pemahaman kebangsaan yang kuat biasanya menunjukkan respons penolakan terhadap narasi separatis. Penolakan tersebut tidak dilakukan secara emosional, melainkan melalui pembahasan yang menempatkan masalah pada kerangka hukum, sejarah, dan gagasan tentang masa depan bersama. Sikap ini sejalan dengan pandangan Gellner (1983) yang menyatakan bahwa nasionalisme terbentuk dari kesadaran rasional mengenai pentingnya hidup dalam satu unit politik yang terorganisir.

Penelitian terbaru oleh Rosalina dan Supriyadi (2020) memperkuat pandangan tersebut. Mereka menemukan bahwa individu dengan literasi kebangsaan baik tidak mudah terprovokasi oleh narasi politik identitas yang bertentangan dengan integrasi nasional. Hal ini terlihat dalam pola diskusi pada grup IKKS, di mana sebagian anggota berupaya meredam komentar separatis dengan menekankan kesamaan tujuan, pentingnya stabilitas sosial, serta manfaat pembangunan bersama dalam kerangka negara.

Kelompok ini memandang Papua tidak hanya sebagai ruang geografis yang terpisah, tetapi sebagai bagian integral dari identitas nasional. Sikap tersebut tercermin dalam ungkapan-ungkapan seperti “Kita semua punya tanggung jawab untuk membangun Papua dalam bingkai Indonesia”. Pola penolakan yang argumentatif ini menunjukkan bahwa pemahaman kebangsaan berfungsi sebagai benteng ideologis yang dapat menahan penetrasi narasi separatis.

3. Anggota dengan Pendidikan Terbatas Lebih Rentan Terpengaruh Narasi Separatis

Berbeda dengan kelompok sebelumnya, anggota yang memiliki tingkat pendidikan terbatas atau pemahaman kebangsaan yang kurang mendalam cenderung merespons unggahan bernuansa separatis secara emosional. Narasi ketidakadilan, pengalaman diskriminasi, atau perasaan tidak diperhatikan menjadi faktor yang memperkuat kecenderungan mendukung sikap separatis.

Hal ini sejalan dengan teori *relative deprivation* yang dikemukakan oleh Gurr (1970), yang menjelaskan bahwa rasa ketidakadilan kolektif dapat memicu orientasi perlawanan politik. Dalam konteks Papua, pengalaman pembangunan yang belum merata dan ketimpangan kesejahteraan sering menjadi dasar emosional dari sikap separatis.

Penelitian terbaru oleh Laksmi (2022) menunjukkan bahwa media sosial memberikan ruang yang luas bagi pembentukan solidaritas emosional melalui narasi penderitaan kolektif. Karena itu, anggota yang tidak memiliki landasan pengetahuan sejarah atau kebangsaan yang kuat dapat dengan mudah menerima

narasi separatis sebagai jawaban emosional atas persoalan sosial. Hal ini terlihat dalam komentar seperti:

“Kalau hidup masih begini terus, lebih baik kami merdeka.”

Komentar demikian menunjukkan bahwa sikap separatis pada kelompok ini bukan merupakan pilihan ideologis yang matang, tetapi bentuk ekspresi ketidakpuasan dan kekecewaan.

4. Literasi Digital Berperan dalam Cara Menanggapi Informasi Separatis

Selain pendidikan, literasi digital juga memiliki peran penting dalam membentuk reaksi anggota grup terhadap unggahan separatis. Menurut teori *critical media literacy* (Kellner & Share, 2007), kemampuan individu untuk memahami, menilai, dan mengkritisi informasi menentukan apakah ia menjadi konsumen pasif atau pengguna yang reflektif.

Penelitian yang dilakukan oleh Nasrullah (2023) menegaskan bahwa media sosial di Papua merupakan arena perebutan narasi antara kelompok pro-negara dan kelompok pro-separatis. Individu dengan literasi digital rendah cenderung langsung mempercayai informasi provokatif tanpa melakukan verifikasi. Sedangkan individu dengan literasi digital tinggi akan mencari sumber pembandingan dan menilai konteks pesan sebelum memberikan respons.

5. Pendidikan Membentuk Cara Memaknai Identitas Kolektif

Pada akhirnya, pendidikan dan pemahaman kebangsaan berpengaruh terhadap bagaimana seseorang memaknai identitasnya. Mereka yang memandang Papua sebagai bagian dari Indonesia cenderung menggunakan bahasa persatuan. Sebaliknya, mereka yang memandang identitas Papua sebagai identitas yang terpisah cenderung memperkuat narasi pemisahan.

Teori identitas sosial (Tajfel & Turner, 1986) menjelaskan bahwa konflik identitas muncul ketika individu merasa identitasnya tidak diakui dalam identitas kolektif yang lebih besar. Penelitian Warikar (2021) menunjukkan bahwa

sebagian masyarakat Papua merasa identitas kulturalnya kurang terwakili dalam narasi nasional, sehingga mereka mencari representasi melalui simbol separatis.

Dengan demikian bahwa pendidikan dan pemahaman kebangsaan merupakan faktor penting yang memengaruhi pola respons anggota grup IKKS terhadap narasi separatis. Semakin tinggi kemampuan individu dalam memahami sejarah, hukum, dan identitas nasional, semakin besar kecenderungan mereka menolak sikap separatis dengan cara yang rasional dan konstruktif. Sebaliknya, keterbatasan pendidikan dan literasi digital membuka ruang bagi penerimaan narasi separatis berbasis emosi.

Oleh karena itu, penanganan isu separatis tidak dapat dilakukan hanya melalui kontrol informasi, tetapi harus melalui:

- a. Penguatan pendidikan kebangsaan yang kontekstual di Papua,
- b. Peningkatan literasi digital masyarakat,
- c. Pengakuan identitas budaya Papua dalam bingkai nasional.

3. Solusi terhadap sikap separatis masyarakat yang muncul di media sosial *Facebook* grup IKKS

3.1. Cara yang paling efektif untuk mengurangi unggahan atau komentar bernuansa separatis di media sosial

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dalam Grup *Facebook* Informasi Kejadian Kota Sorong (IKKS), ditemukan bahwa upaya mengurangi unggahan dan komentar bernuansa separatis tidak dapat dilakukan hanya dengan pendekatan represif seperti penghapusan, pemblokiran akun, atau penegasan aturan kelompok. Pendekatan yang bersifat pemaksaan cenderung menimbulkan resistensi dalam bentuk kemarahan, penolakan, hingga munculnya narasi “pembungkaman suara” atau “ketidakadilan terhadap orang Papua.” Hal ini sesuai dengan teori klasik mengenai komunikasi dan konflik sosial yang diajukan oleh Paul Watzlawick (1976), yang menyatakan bahwa tindakan komunikasi yang bersifat menolak atau membungkam pendapat justru dapat memperkuat oposisi dan memperluas konflik, bukan meredamnya.

Temuan lapangan menunjukkan bahwa metode yang paling efektif adalah pendekatan komunikatif, partisipatif, dan konsisten, di mana anggota grup tidak merasa diperlakukan sebagai objek kontrol, tetapi sebagai bagian dari dialog bersama. Pendekatan ini sejalan dengan teori konstruksi identitas sosial Tajfel dan Turner (1986) yang menjelaskan bahwa identitas kelompok akan semakin menguat ketika kelompok merasa terancam. Oleh karena itu, strategi pencegahan harus diarahkan pada penguatan kesadaran bersama, bukan pemaksaan identitas nasional secara satu arah.

Dalam perkembangan terbaru, studi-studi mengenai moderasi digital (Gillespie, 2018; Papacharissi, 2021) juga menegaskan bahwa komunitas daring hanya dapat bertahan dalam kondisi yang stabil ketika terdapat sistem pengaturan interaksi yang dilakukan secara transparan, komunikatif, dan tidak otoriter. Dengan demikian, keberhasilan reduksi komentar separatis dalam grup IKKS dapat dijelaskan melalui empat strategi utama yang ditemukan dalam data penelitian, yaitu: moderasi aktif, penguatan narasi identitas positif, pembukaan ruang dialog aman, dan penanaman pengetahuan kebangsaan yang tidak bersifat menggurui.

1. Moderasi Konten secara Aktif oleh Admin Grup

Moderasi aktif menjadi langkah paling dasar dalam pengelolaan percakapan daring. Namun, penelitian dalam grup IKKS menunjukkan bahwa moderasi yang efektif bukanlah sekadar menghapus atau melaporkan unggahan, melainkan menjelaskan alasan tindakan tersebut. Admin grup yang memberi peringatan terlebih dahulu, memberikan waktu bagi anggota untuk menyampaikan klarifikasi, atau bahkan menutup kolom komentar sebelum situasi memanas, terbukti lebih dapat diterima oleh anggota grup.

Pendekatan ini sejalan dengan teori “*participatory governance*” (Jenkins, 2015), yaitu pengelolaan komunitas berbasis partisipasi anggota, bukan sekadar perintah satu arah. Ketika admin menjelaskan dengan bahasa yang sopan dan

komunikatif, muncul respon penerimaan karena tindakan tersebut dianggap adil dan tidak memihak.

Hal ini juga memenuhi prinsip komunikasi antarbudaya (Gudykunst, 2004) yang menekankan pentingnya penyampaian pesan yang sensitif terhadap identitas dan perasaan kelompok minoritas. Dengan demikian, moderasi aktif yang disertai edukasi menjadi fondasi pencegahan ketegangan, bukan pemicu konflik baru.

2. Penguatan Narasi Positif tentang Identitas Papua dalam Bingkai NKRI

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dorongan separatist sering berhubungan dengan munculnya perasaan tidak dihargai sebagai orang Papua. Oleh karena itu, strategi efektif bukanlah menghapus identitas lokal, melainkan memberi ruang bagi ekspresi budaya, sejarah, dan kebanggaan Papua, tetapi tetap dalam bingkai persatuan nasional.

Teori mengenai nasionalisme emosional (Anderson, 1983) menjelaskan bahwa rasa memiliki terhadap negara terbentuk melalui pengalaman dan simbol yang dirasakan bersama. Sementara itu, penelitian baru mengenai identitas daerah di Indonesia (Faraby, 2020; Wenda, 2022) menunjukkan bahwa ketika identitas Papua dihargai sebagai bagian integral dari Indonesia, bukan sebagai identitas yang bertentangan, maka potensi sikap separatist menurun.

Unggahan mengenai tarian tradisional, lagu daerah, tokoh Papua yang sukses di tingkat nasional, dan prestasi pelajar Papua dalam pendidikan formal terbukti menjadi penyeimbang emosional dalam grup IKKS. Konten-konten semacam ini tidak hanya menumbuhkan rasa bangga, tetapi juga menunjukkan bahwa Papua ada dalam ruang nasional, bukan berada di luar atau terpinggirkan.

3. Membuka Ruang Dialog yang Aman dan Terarah

Temuan penelitian menunjukkan bahwa sikap separatist sering menguat bukan semata-mata karena ideologi, tetapi karena perasaan tidak didengarkan. Ketika seseorang merasa suaranya diabaikan, ia cenderung memilih bentuk

penyampaian yang lebih keras dan provokatif. Oleh karena itu, strategi yang digunakan admin atau anggota senior dalam grup IKKS yaitu memberikan ruang dialog yang hangat, terarah, dan tidak menghakimi adalah menjadi salah satu mekanisme penurunan konflik yang paling berhasil.

Teori komunikasi dialogis yang dikemukakan oleh Habermas (1984) menegaskan bahwa konsensus hanya dapat dicapai ketika komunikasi dilakukan melalui tindakan rasional yang setara, bukan dominatif atau koersif. Sementara itu, penelitian terbaru mengenai digital peacebuilding (Hawkins, 2021) menunjukkan bahwa forum diskusi daring dapat menjadi ruang rekonsiliasi sosial apabila dikelola dengan aturan kesopanan, alokasi ruang bicara yang seimbang, dan penghargaan terhadap pengalaman emosional. Dengan ucapan seperti “Ceritakan apa yang kamu maksud, agar kita bisa mengerti,” terbukti lebih meredam konflik dibandingkan dengan ungkapan “Pendapatmu salah.”

Dengan demikian, dialog bukan hanya berfungsi sebagai alat pertukaran informasi, tetapi juga sebagai sarana penyembuhan luka sosial.

4. Penanaman Pengetahuan Kebangsaan yang Tidak Bersifat Menggurui

Penyampaian narasi kebangsaan secara doktriner justru menimbulkan resistensi. Dalam konteks Papua, penegasan nasionalisme yang tidak peka terhadap sejarah ketidaksetaraan dapat dianggap sebagai bentuk dominasi simbolik. Oleh karena itu, penyampaian informasi mengenai kebijakan afirmasi, pembangunan infrastruktur, atau keterlibatan tokoh Papua dalam pemerintahan harus dilakukan dengan cara mengajak memahami, bukan memaksakan penerimaan.

Teori nasionalisme integratif (Hatta, 1932) menekankan bahwa persatuan hanya mungkin terbentuk melalui kesediaan untuk saling memahami, bukan memaksa keseragaman. Sementara penelitian terbaru oleh Widjojo (2021) menegaskan bahwa pembangunan narasi kebangsaan di Papua harus berbasis penghargaan terhadap pengalaman emosional dan sejarah lokal, bukan hanya diyakinkan melalui data statistik.

Dengan demikian, penanaman pengetahuan kebangsaan yang efektif adalah yang bersifat empatik, persuasif, dan dialogis, bukan indoktrinatif. Pendekatan paling efektif untuk mengurangi komentar atau unggahan bernuansa separatis dalam grup IKKS bukanlah tindakan pemaksaan, melainkan strategi yang menekankan moderasi humanis, penguatan identitas positif, dialog terbuka, dan edukasi kebangsaan yang sensitif dan tidak menggurui. Pendekatan ini sesuai dengan teori lama mengenai identitas sosial serta diperkuat oleh teori terbaru mengenai moderasi digital dan komunikasi persuasif dalam ruang daring. Dengan strategi ini, potensi konflik dapat dikendalikan tanpa menciptakan luka sosial baru.

3.2. Tindakan yang Sebaiknya Dilakukan oleh Admin Grup untuk Mencegah Penyebaran Sikap Separatis di IKKS

Peran admin dalam sebuah komunitas digital, termasuk Grup *Facebook* Informasi Kejadian Kota Sorong (IKKS), memiliki kedudukan strategis dalam menentukan arah komunikasi dan kualitas interaksi anggotanya. Dalam perspektif teori *gatekeeping* yang diperkenalkan oleh Lewin (1947), admin berfungsi sebagai pengatur arus informasi yang masuk, tersebar, dan dikonsumsi dalam kelompok. Namun, teori *gatekeeping* klasik ini berkembang seiring munculnya media sosial yang bersifat partisipatif. Moderasi tidak lagi dapat dilakukan secara otoriter karena anggota memiliki ruang untuk melawan, berpindah platform, atau memobilisasi dukungan. Penelitian terbaru mengenai moderasi komunitas daring (Gillespie, 2018; Jhaver et al., 2020) menegaskan bahwa efektivitas admin bukan hanya terletak pada kemampuan menghapus konten, tetapi pada kemampuan membangun komunikasi yang adil dan transparan.

Dalam konteks IKKS, hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan admin yang paling efektif adalah tindakan yang menggabungkan ketegasan dengan pendekatan inklusif, sehingga anggota tidak merasa tertekan atau dimusuhi. Berikut tindakan-tindakan strategis yang dapat dilakukan admin untuk mencegah penyebaran sikap separatis.

1. Membuat Aturan Grup yang Jelas dan Terbuka untuk Semua Anggota

Langkah pertama dan paling mendasar adalah penyusunan aturan grup yang jelas, terstruktur, dan dapat diakses oleh semua anggota. Aturan ini tidak hanya berfungsi sebagai pedoman etika komunikasi, tetapi juga memberikan legitimasi bagi tindakan moderasi admin. Dalam teori kontrol sosial dari Hirschi (1969), aturan yang tertulis berperan sebagai mekanisme internalisasi nilai yang menahan individu dari perilaku menyimpang. Dalam konteks digital, penelitian Phillips & Seering (2022) menyatakan bahwa komunitas daring yang memiliki peraturan eksplisit cenderung menunjukkan konflik lebih rendah dan tingkat kepatuhan lebih tinggi.

Dalam kasus IKKS, aturan tertulis dapat mencakup larangan terhadap penyebaran simbol separatis, ajakan pemisahan diri, ujaran kebencian berdasarkan etnis, dan provokasi terhadap kekerasan. Dengan adanya aturan yang jelas, anggota tidak dapat mengklaim bahwa tindakan admin bersifat sewenang-wenang, sehingga mengurangi kemungkinan timbulnya perlawanan psikologis.

2. Melakukan Moderasi Diskusi Secara Aktif dan Konsisten

Moderasi yang bersifat pasif terbukti tidak efektif dalam menekan penyebaran narasi separatis. Sikap separatis dapat menyebar dengan cepat terutama bila didukung oleh komentar yang bersifat emosional dan viral. Moderasi aktif berarti admin memantau diskusi secara rutin, mengidentifikasi potensi provokasi sejak awal, dan bertindak sebelum konflik berkembang. Hal ini selaras dengan teori *situated moderation* (Seering, 2020) yang menjelaskan bahwa moderator yang hadir dalam percakapan mampu mengarahkan nada diskusi dan mencegah eskalasi ketegangan.

Bentuk moderasi yang ditemukan efektif pada grup IKKS meliputi menghapus komentar provokatif, menutup kolom komentar pada unggahan sensitif, serta memberikan peringatan langsung kepada anggota yang melanggar. Namun, konsistensi menjadi kunci keberhasilan moderasi. Jika admin hanya menindak sebagian kasus dan membiarkan kasus lain, maka akan muncul persepsi

ketidakadilan dan bias, yang pada akhirnya dapat memperkuat narasi “ketertindasan” yang menjadi salah satu dasar sikap separatistis.

3. Menegur Anggota dengan Pendekatan yang Menjaga Harga Diri

Hasil penelitian menunjukkan bahwa reaksi anggota terhadap teguran sangat dipengaruhi oleh cara teguran tersebut disampaikan. Teori *face negotiation* yang dikemukakan oleh Ting-Toomey (1988) menjelaskan bahwa rasa harga diri atau “*face*” merupakan elemen penting dalam interaksi sosial, terutama pada kelompok yang memiliki pengalaman marginalisasi. Jika teguran dilakukan dengan gaya memojokkan atau mempermalukan, anggota akan merespons dengan defensif dan memperkuat identitas perlawanan.

Sebaliknya, teguran yang disampaikan dengan bahasa netral, sopan, dan mengajak kepada kepentingan bersama cenderung lebih diterima. Misalnya, kalimat seperti “Mari kita saling menghargai dalam berdiskusi, karena grup ini dibuat untuk berbagi informasi, bukan konflik” menunjukkan bahwa admin menghargai anggota sekaligus tetap menjaga aturan. Pendekatan ini tidak hanya menurunkan ketegangan emosional tetapi juga memperkuat rasa keanggotaan atau *sense of belonging* dalam komunitas.

4. Mengarahkan Diskusi pada Isu Pembangunan dan Informasi Positif

Narasi separatistis sering kali tumbuh dari rasa ketidakadilan dan pengalaman keterpinggiran. Oleh karena itu, salah satu strategi penting adalah menyediakan narasi tandingan yang bersifat konstruktif. Teori komunikasi naratif dari Fisher (1984) menjelaskan bahwa manusia membuat keputusan berdasarkan cerita yang mereka anggap masuk akal dan relevan dengan pengalaman hidup. Penelitian terbaru terkait komunikasi konflik di Papua (Widjojo, 2021; Sumule, 2023) juga menunjukkan bahwa identitas Papua dapat diperkuat tanpa harus mengarah pada pemisahan, apabila ekspresi budaya dan kebanggaan lokal diberi ruang.

Admin dapat berperan dengan memposting atau memfasilitasi konten yang menonjolkan prestasi orang asli Papua, kemajuan pembangunan infrastruktur yang bermanfaat langsung bagi masyarakat, atau kisah tokoh Papua yang berperan dalam institusi nasional. Ketika anggota melihat bahwa identitas Papua diakui dan dihargai dalam bingkai keindonesiaan, maka kebutuhan untuk menunjukkan identitas melalui sikap separatis menjadi berkurang.

Upaya mencegah penyebaran sikap separatis dalam grup IKKS tidak dapat dilakukan dengan pendekatan represif, melainkan melalui tindakan admin yang komunikatif, konsisten, dan menghargai martabat anggota. Admin perlu menjalankan fungsi sebagai pengatur wacana, mediator, dan pembangun narasi positif yang mampu memperkuat rasa kebersamaan dalam bingkai NKRI. Dengan pendekatan ini, ruang digital dapat menjadi wadah dialog yang sehat, bukan arena reproduksi trauma sosial dan konflik identitas.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Sikap separatis masyarakat yang muncul dalam komentar di Grup Facebook IKKS

Berdasarkan hasil penelitian, sikap separatis yang muncul dalam unggahan dan komentar anggota Grup Facebook IKKS merupakan bentuk konstruksi identitas politik yang terbentuk secara sadar, terstruktur, dan berkelanjutan. Ekspresi separatis tidak berdiri sebagai luapan emosi sesaat, tetapi berkembang melalui narasi ideologis yang diperkuat dengan bahasa, simbol, tokoh perjuangan, sejarah, serta pengalaman ketidakadilan yang dipahami secara kolektif.

Bentuk ekspresi yang tampak meliputi: penolakan verbal terhadap identitas Indonesia, penggunaan simbol visual seperti Bendera Bintang Kejora, glorifikasi tokoh perjuangan, serta narasi ketidakadilan struktural yang menegaskan identitas politik Papua sebagai identitas tandingan. Media sosial dalam konteks ini menjadi ruang reproduksi identitas dan solidaritas politik yang menciptakan echo chamber dan memperkuat orientasi separatis.

Reaksi anggota grup terbagi ke dalam tiga kelompok: pendukung separatis, kelompok pro-NKRI yang menolak narasi tersebut, serta kelompok netral yang memilih diam karena tekanan sosial sebagaimana dijelaskan dalam teori spiral of silence. Interaksi ini membentuk polarisasi identitas yang tajam di dalam grup.

2. Faktor-faktor yang memunculkan sikap separatis di Grup IKKS

Sikap separatis yang berkembang di IKKS merupakan hasil interaksi kompleks antara faktor struktural, historis, sosial, budaya, dan psikologis yang saling memperkuat.

Faktor utama yang ditemukan meliputi: (1) faktor struktural–historis, seperti ketidakadilan dalam pengelolaan sumber daya alam, ketimpangan pembangunan, marginalisasi masyarakat Papua, reinterpretasi sejarah integrasi, serta penahanan tokoh gerakan; (2) faktor pengalaman personal–kolektif, meliputi diskriminasi, trauma konflik, ketimpangan akses, dan pengalaman ketidakadilan yang membentuk memori kolektif dan solidaritas emosional di ruang digital; serta (3) faktor pendidikan dan literasi, yaitu rendahnya literasi digital, minimnya wawasan kebangsaan, dan lemahnya kemampuan berpikir kritis yang membuat sebagian anggota mudah terpengaruh oleh narasi provokatif.

Keseluruhan faktor ini menunjukkan bahwa sikap separatis yang muncul bukanlah fenomena spontan, melainkan hasil akumulasi kekecewaan struktural dan dinamika identitas yang kemudian diperkuat oleh pola komunikasi di media sosial.

3. Solusi terhadap sikap separatis masyarakat

Solusi untuk meredam sikap separatis di IKKS harus dilakukan melalui pendekatan komunikatif, dialogis, dan edukatif, bukan pendekatan represif. Penelitian ini menemukan dua arah utama penanganan, yaitu strategi mengurangi unggahan separatis dan langkah strategis peran admin sebagai gatekeeper.

Langkah efektif dalam mengurangi unggahan separatis mencakup: moderasi konten secara aktif namun edukatif; penguatan narasi identitas positif Papua dalam bingkai NKRI; penyediaan ruang dialog aman dan terarah; serta penanaman pengetahuan kebangsaan secara persuasif dan empatik. Pendekatan ini dinilai mampu mengurangi polarisasi dan mencegah resistensi psikologis dari anggota grup.

Peran admin sangat menentukan melalui penerapan aturan yang jelas, moderasi konsisten, teguran yang menjaga martabat anggota, dan pengalihan diskusi pada isu-isu positif mengenai pembangunan dan kontribusi masyarakat Papua.

Secara keseluruhan, solusi tersebut menegaskan bahwa penanganan munculnya sikap separatis harus mengedepankan rekonsiliasi, edukasi, dan penguatan kohesi sosial, sehingga ruang digital seperti IKKS dapat menjadi ruang informasi yang sehat, bukan arena konflik identitas.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Pemerintah perlu mengubah pendekatan komunikasi mengenai Papua, dari pendekatan yang dominan berorientasi keamanan (security approach) menjadi pendekatan kultural-dialogis. Kebijakan harus mengakui pengalaman sejarah masyarakat Papua, bukan menolaknya. Program pembangunan harus disertai dengan kebijakan restitusi martabat, termasuk rekognisi budaya dan pelibatan penuh orang asli Papua dalam perumusan kebijakan.

2. Bagi Tokoh Adat, Tokoh Agama, dan Tokoh Masyarakat

Tokoh lokal perlu memperkuat narasi identitas Papua yang inklusif, yaitu identitas yang tidak hanya berorientasi pada perlawanan, tetapi juga pada rekonsiliasi sosial. Peran tokoh ini penting dalam menghadirkan ruang dialog emosional yang dapat meredam intensifikasi afektif dalam ruang digital.

3. Bagi Pengelola Grup IKKS dan Komunitas Media Sosial Papua

Admin grup perlu mengembangkan model moderasi partisipatif, yaitu moderasi yang tidak hanya menghapus konten tertentu, tetapi mengedukasi anggota melalui dialog, penjelasan, dan klarifikasi konteks sejarah. Pendekatan penghapusan konten tanpa penjelasan hanya akan memperkuat perasaan ditekan dan meningkatkan resistensi.

4. Bagi Dunia Pendidikan dan Akademisi

Kajian mengenai separatisme digital perlu diperluas dan diperdalam, terutama dengan pendekatan antropologi digital, sosiologi komunikasi, dan psikologi budaya. Penelitian lanjutan dapat berfokus pada analisis semiotik, dinamika algoritma platform, atau perubahan identitas generasi muda Papua dalam era media digital.

5. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini memiliki ruang untuk diperluas dengan menggunakan beberapa metode seperti berikut ini:

- a. Menggunakan pendekatan etnografi digital jangka panjang,
- b. Menganalisis perbedaan pola komunikasi antar platform (*Facebook*, *TikTok*, *Instagram*, *X/Twitter*),
- c. Dan mengkaji korelasi antara representasi digital dan tindakan kolektif offline.

DAFTAR PUSTAKA

Anderson, B. (1983). *Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism*. London: Verso.

Askanius, T. (2021). *Emotional Amplification in Digital Activism*. *Digital Journalism*, 9(2), 145-163.

Aditjondro, G. (2000). *Cahaya Bintang Kejora: Papua Barat dalam Kajian Sejarah, Budaya, Ekonomi, dan Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Barker, C. (2014). *Cultural Studies: Theory and Practice*. London: Sage Publications.

Berger, P., & Luckmann, T. (1991). *The Social Construction of Reality*. London: Penguin Books.

Boelaars, J. H. (1986). *Papua dan Papua Barat: Identitas Budaya dan Perubahan Sosial*. Jayapura: STFT Fajar Timur.

Castells, M. (2012). *Networks of Outrage and Hope: Social Movements in the Internet Age*. Cambridge: Polity Press.

Dewi, S. (2019). *Konflik Identitas dan Nasionalisme di Papua: Perspektif Kultural dan Politik Lokal*. *Jurnal Penelitian Politik*, 16(2), 189-204.

Dewan, R. (2021). *Media Sosial dan Pembentukan Opini Politik Generasi Muda Papua*. *Jurnal Komunikasi Indonesia*, 10(1), 55-68.

Dove, M. R. (2016). *Indigenous Knowledge and Environmental Politics in Papua*. *Oceania*, 86(3), 341-359.

Gillespie, T. (2018). *Custodians of the Internet: Platforms, Content Moderation, and the Hidden Decisions That Shape Social Media*. New Haven: Yale University Press.

Gurr, T. R. (1970). *Why Men Rebel*. Princeton: Princeton University Press.

Hall, S. (1997). *Representation: Cultural Representations and Signifying Practices*. London: Sage Publications.

Heryanto, A. (2015). *Identitas dan Kenikmatan: Politik Budaya Layar Indonesia*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.

Kirksey, S. (2012). *Freedom in Entangled Worlds: West Papua and the Architecture of Global Power*. Durham: Duke University Press.

Kirsch, S. (2006). *Reverse Anthropology: Indigenous Analysis of Social and Environmental Relations in New Guinea*. Stanford: Stanford University Press.

Kymlicka, W. (2001). *Politics in the Vernacular: Nationalism, Multiculturalism, Citizenship*. Oxford: Oxford University Press.

Melucci, A. (1996). *Challenging Codes: Collective Action in the Information Age*. Cambridge: Cambridge University Press.

Mihelj, S., & Jimenez-Martinez, C. (2021). *Digital Nationalism*. Oxford: Oxford University Press.

Mote, O., & Rutherford, D. (2001). From Irian Jaya to Papua: *The Limits of Primordialism in Indonesia's Troubled East*. *Indonesia*, 72, 115-140.

Papacharissi, Z. (2015). *Affective Publics: Sentiment, Technology, and Politics*. Oxford: Oxford University Press.

Pigay, F. (2018). *Nasionalisme Orang Papua: Pergeseran Identitas dan Kontestasi Politik di Ruang Publik*. *Jurnal Antropologi Papua*, 6(1), 41–57.

Postill, J. (2018). *The Rise of Nerd Politics: Digital Activism and Political Change*. London: Pluto Press.

Rogers, R. (2019). *Doing Digital Methods*. London: Sage Publications.

Siregar, B. (2017). *Representasi Simbol Bintang Kejora dalam Gerakan Papua Merdeka*. Jurnal Wacana Politik, 3(2), 201-219.

Scott, J. C. (1990). *Domination and the Arts of Resistance: Hidden Transcripts*. New Haven: Yale University Press.

Smith, A. D. (2009). *Ethno-symbolism and Nationalism: A Cultural Approach*. London: Routledge.

Tajfel, H., & Turner, J. C. (1986). *The Social Identity Theory of Intergroup Relations*. Chicago: Nelson-Hall.

Tapsell, R. (2020). *Media Power in Indonesia: Oligarchs, Citizens and the Digital Revolution*. London: Rowman & Littlefield.

Trigger, D. (2010). *Anthropology and Indigenous Political Movements*. *Annual Review of Anthropology*, 39, 415-432.

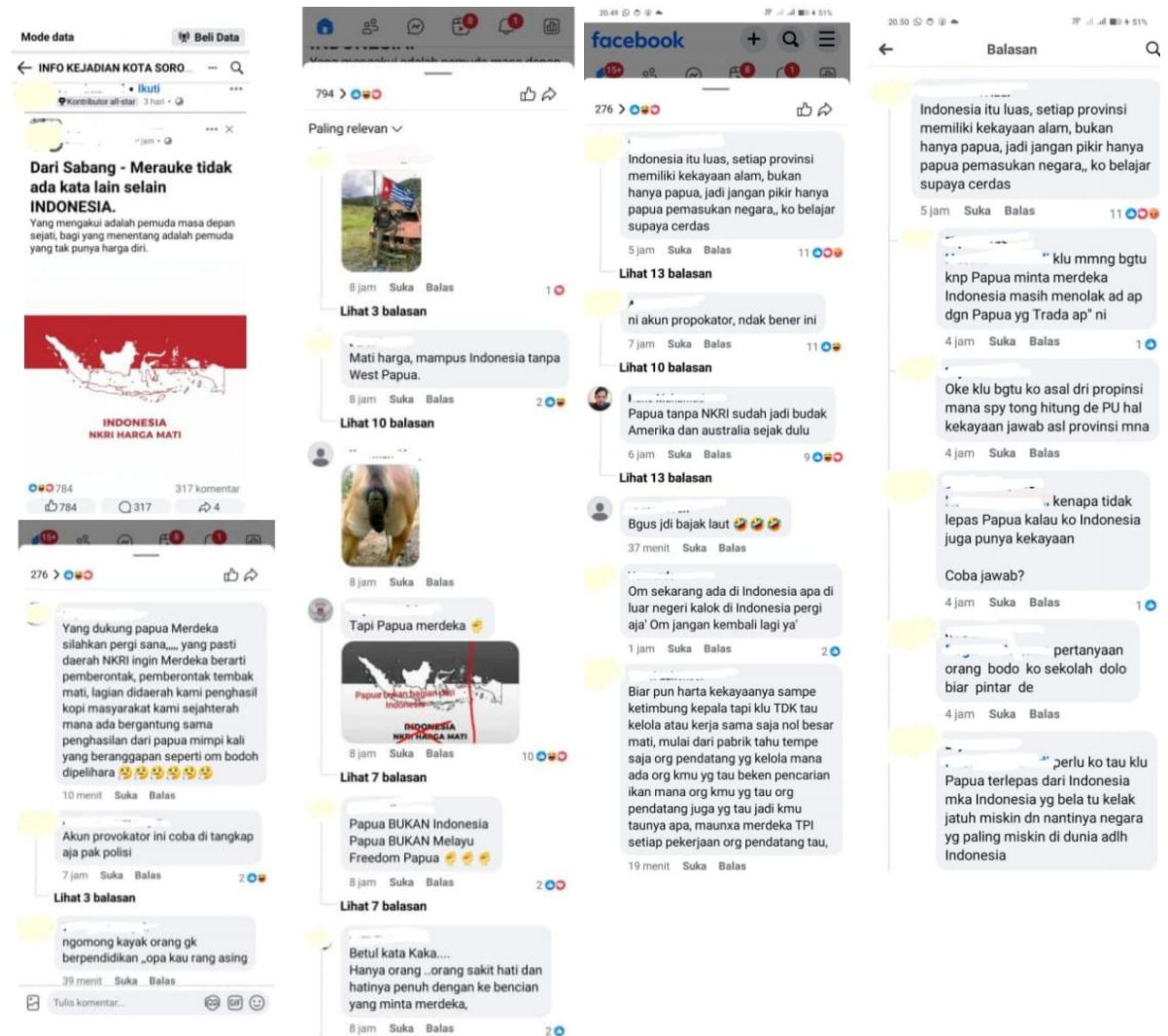
Widjojo, M. S., et al. (2009). *Papua Road Map: Negotiating the Past, Improving the Present, and Securing the Future*. Jakarta: LIPI Press.

Wonda, J. (2020). *Perubahan Identitas Orang Papua dalam Arus Migrasi dan Modernisasi di Sorong*. Jurnal Masyarakat dan Budaya, 22(3), 301-318.

Wurm, S. A. (1984). *Papuan Languages and the West Papuan Phylum*. Canberra: Australian National University Press.

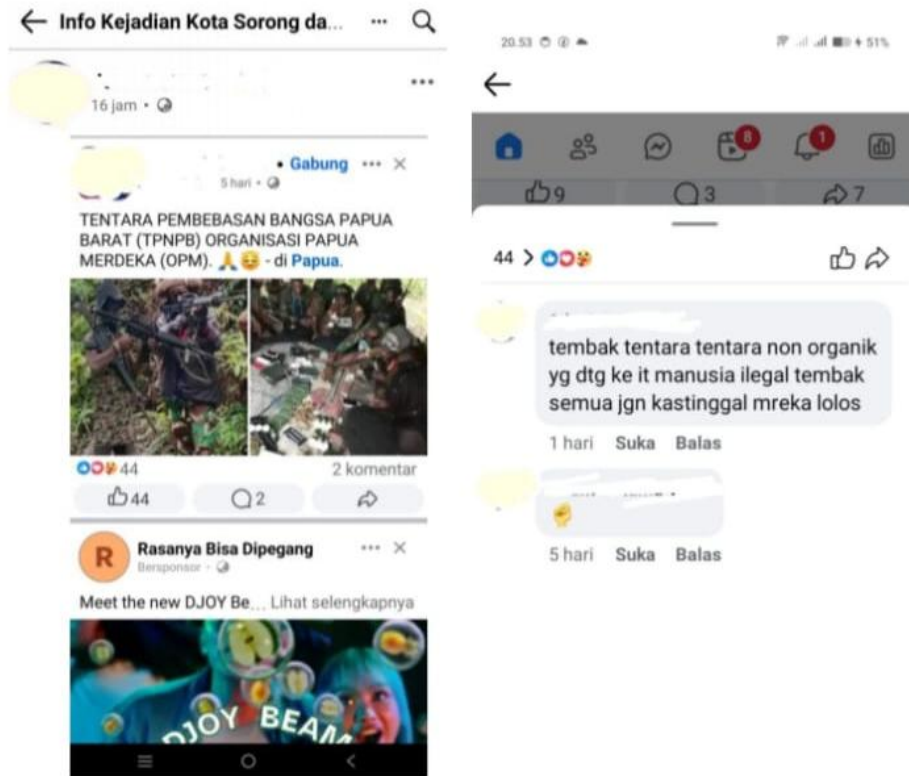
LAMPIRAN-LAMPIRAN

Gambar 1

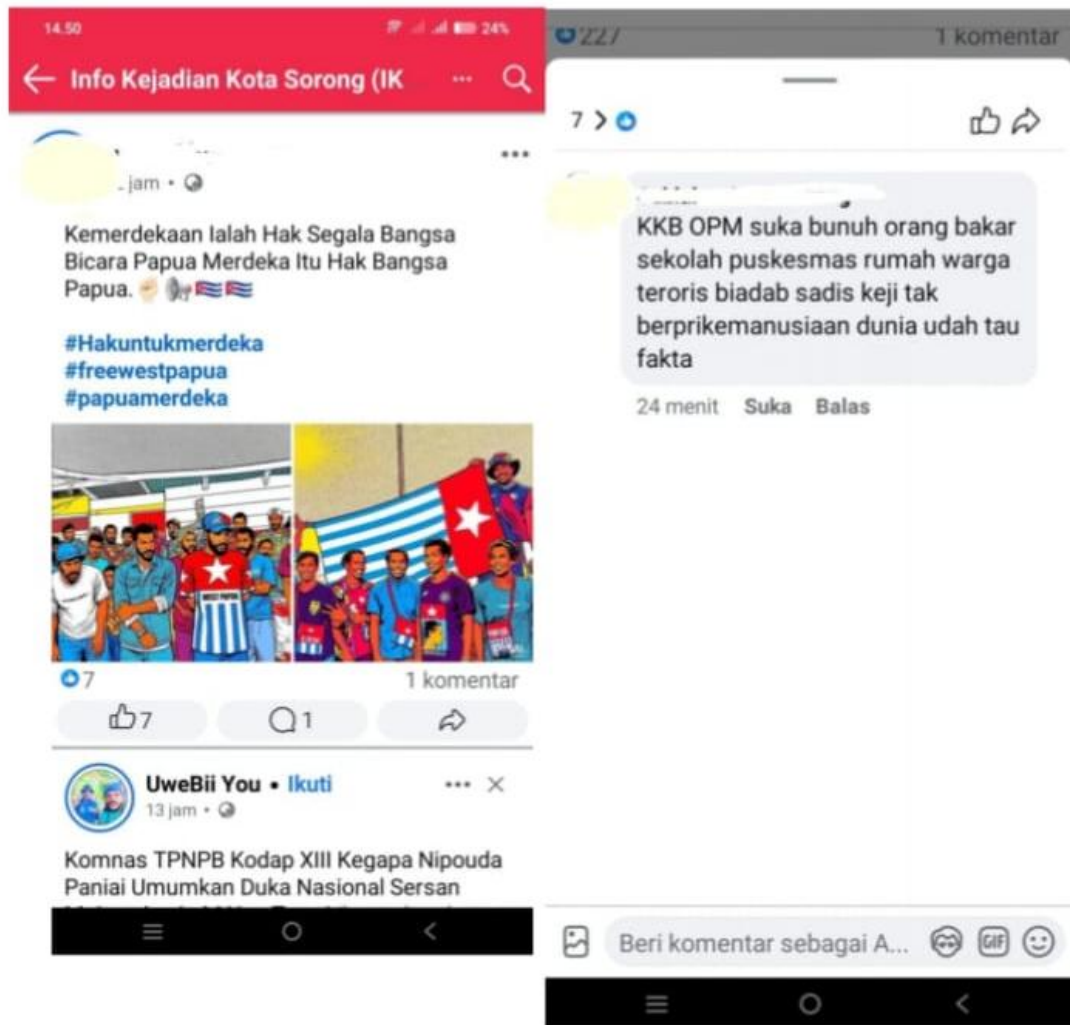




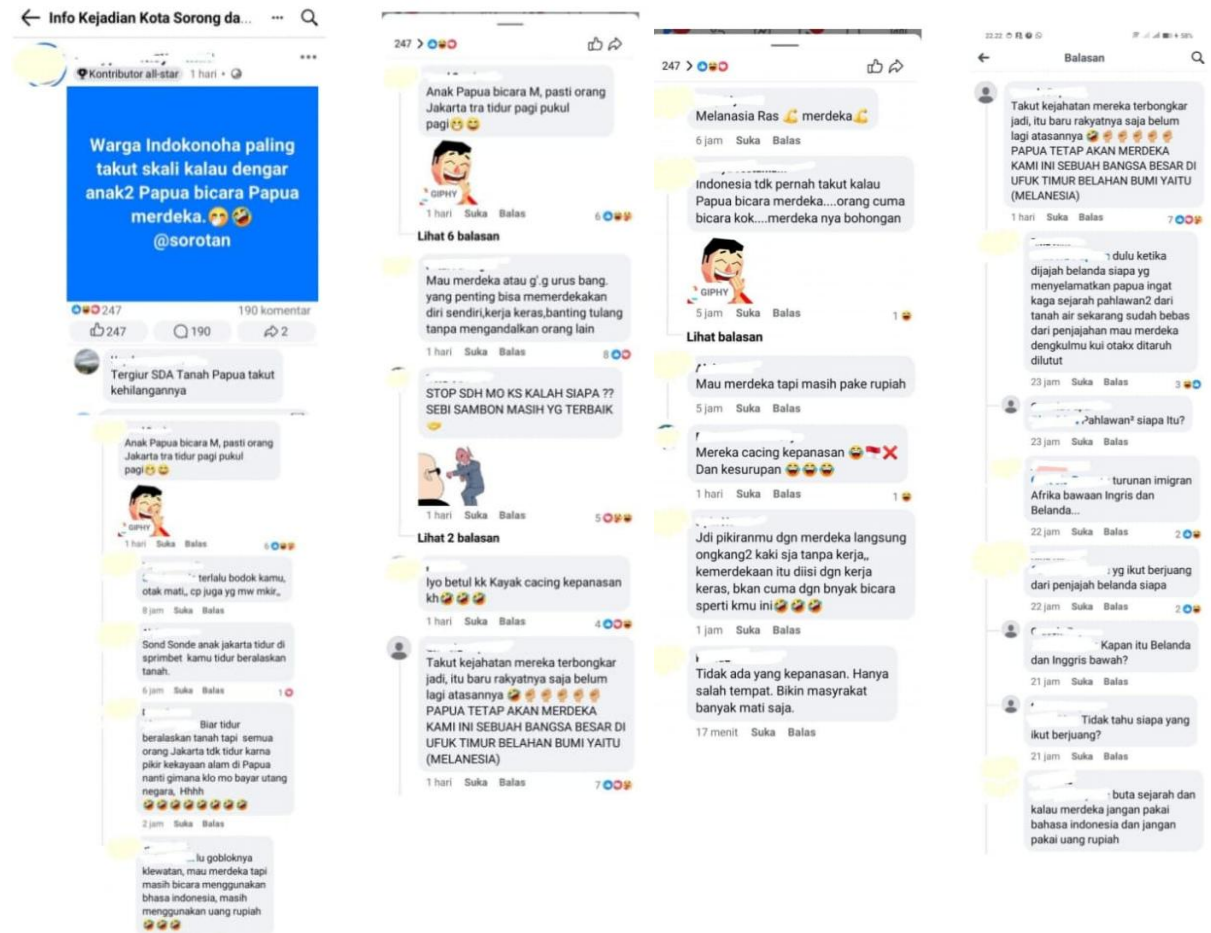
Gambar 2



Gambar 3



gambar 4

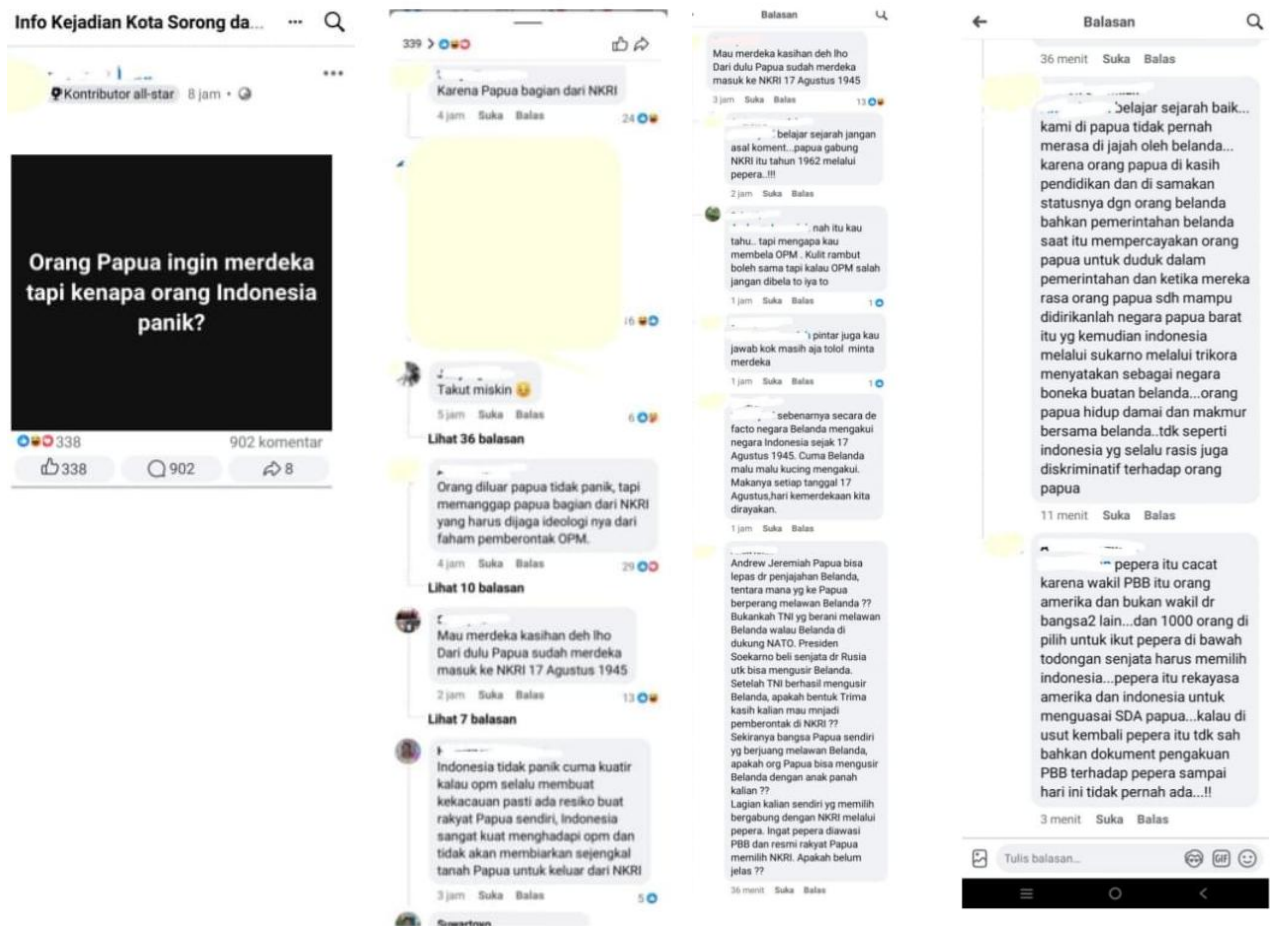




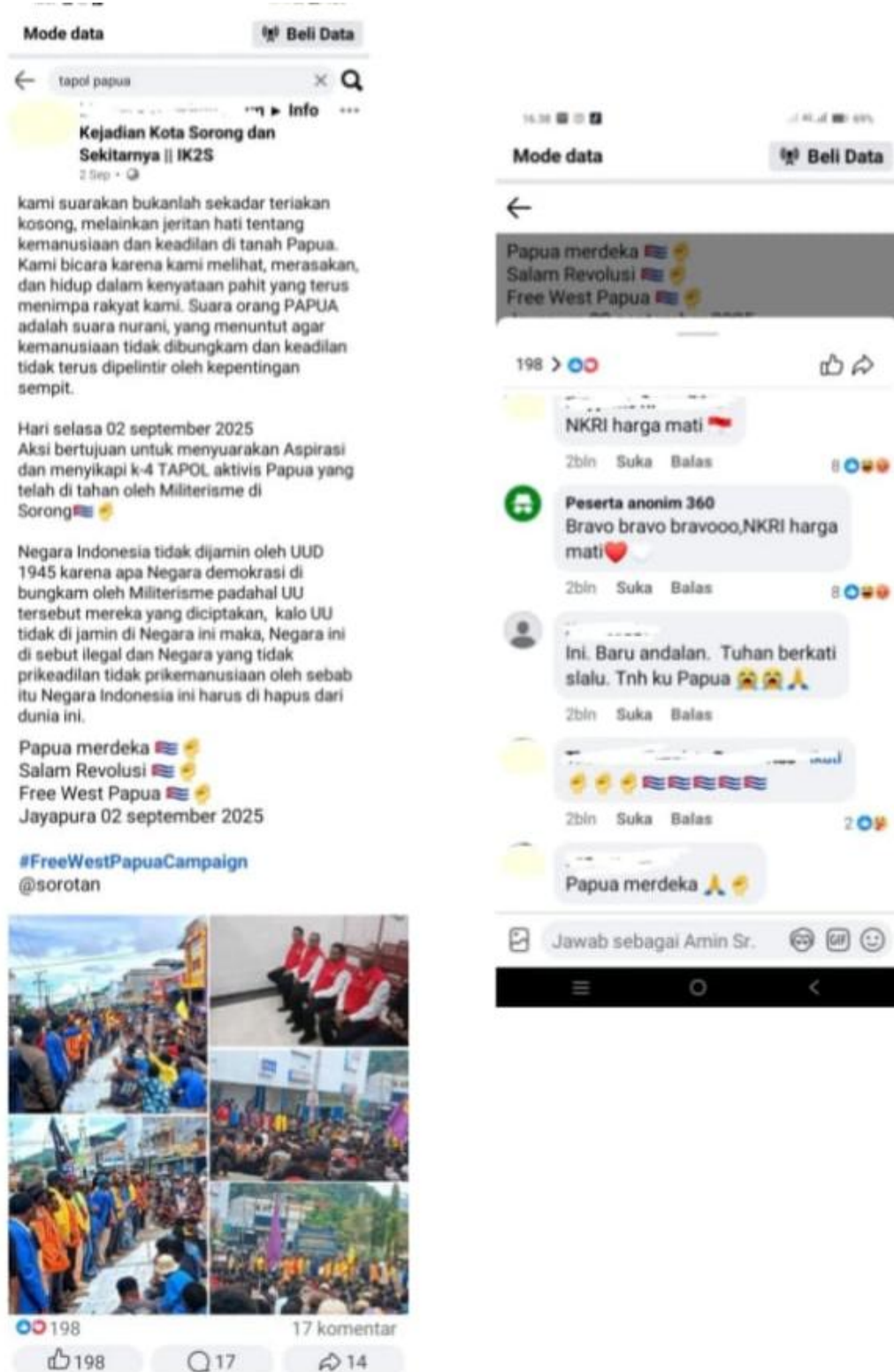
Gambar 5



Gambar 6



Gambar 7



Gambar 8

